



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 perlu mengubah Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan Daerah serta pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (2) Perubahan pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun Berkenan;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.

- (3) Uraian secara rinci Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen rencana daerah yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan Daerah serta pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun Berkenan;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum.



Yonas Rumbabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
BARAT TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI - 8 -

DAFTAR TABEL..... - 10 -

DAFTAR GAMBAR..... - 12 -

BAB I PENDAHULUAN - 14 -

1.1 Latar Belakang..... - 14 -

1.2 Tujuan - 15 -

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan..... - 16 -

1.4 Dasar Hukum Penyusunan - 17 -

1.5 Sistematika Perubahan RKPD - 19 -

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 - 21 -

2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Hasil Evaluasi Triwulan I
Tahun 2025 - 21 -

2.2 Kinerja Perangkat Daerah - 83 -

2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Papua Barat
(2020-2024) - 85 -

2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat - 85 -

2.3.2 Aspek Daya Saing Daerah - 87 -

2.3.3 Aspek Pelayanan Umum..... - 88 -

2.4 Program Perangkat Daerah Berdasarkan Kinerja Outcome - 107 -

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH - 152 -

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi..... - 152 -

3.2 Pokok-Pokok Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... - 152 -

3.3 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah..... - 153 -

3.3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi - 153 -

3.3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan RKPD
Tahun 2025 - 157 -

3.3.3	Proyeksi Inflasi pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	- 157 -
3.3.4	Proyeksi Tingkat Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	- 162 -
3.3.5	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	- 163 -
3.3.6	Proyeksi Tingkat Ketimpangan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	- 165 -
3.3.7	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia pada Perubahan RKPD Tahun 2025	- 166 -
3.4	Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....	- 168 -
3.4.1	Pelaksanaan APBD Papua Barat.....	- 168 -
3.4.2	Pendapatan Daerah.....	- 168 -
3.4.3	Belanja Daerah	- 177 -
3.4.4	Realisasi Anggaran yang Berasal dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur menurut SKPD	- 180 -
3.4.5	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	- 183 -
3.4.6	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	- 184 -
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT.....		- 200 -
4.1	Sasaran Pembangunan	- 200 -
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	- 206 -
4.3	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	- 210 -
4.4	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	- 297 -
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBAGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025		- 298 -
BAB VI PENUTUP.....		- 299 -
LAMPIRAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	- 83 -
Tabel II.2 Rekapitulasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Papua Barat Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	- 83 -
Tabel II.3 Capaian IKD Provinsi Papua Barat (Aspek Kesejahteraan Masyarakat)	- 86 -
Tabel II.4 Capaian IKD Provinsi Papua Barat (Aspek Daya Saing Daerah) ..	- 87 -
Tabel II.5 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan).....	- 88 -
Tabel II.6 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan).....	- 90 -
Tabel II.7 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (PUPR)	- 92 -
Tabel II.8 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Trantibumlinmas)	- 93 -
Tabel II.9 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Tenaga Kerja)	- 94 -
Tabel II.10 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Dukcapil)	- 96 -
Tabel II.11 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat Kampung).....	- 97 -
Tabel II.12 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Perhubungan)	- 98 -
Tabel II.13 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Komunikasi dan Informatika)	- 99 -
Tabel II.14 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Persandian).....	- 101 -
Tabel II.15 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Perpustakaan).....	- 101 -
Tabel II.16 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kearsipan).....	- 102 -
Tabel II.17 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pemerintahan Umum) -	- 103 -
Tabel II.18 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kepegawaian Daerah) .-	- 106 -
Tabel II.19 Program Perangkat Daerah berdasarkan Kinerja Outcome	- 107 -
Tabel III.1 Inflasi Bulanan (<i>mtm</i>) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran s.d Triwulan II 2025 (persen)	- 160 -
Tabel III.2 Asumsi dan Realisasi Inflasi Papua Barat Pada Tahun 2019-2024.....	- 161 -
Tabel III.3 Pagu dan Realisasi APBD s.d. Semester I Prov. Papua Barat Tahun 2024/2025 (Milyar Rp).	- 169 -
Tabel III.4 Daftar Alokasi Dan Realisasi Dana Otsus Dan DTI Sampai Dengan Semester I Di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 (RpJuta)	181
Tabel III.5 Estimasi Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 -	- 183 -
Tabel IV.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat periode 2025 ...	- 201 -

Tabel IV.2 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2025 - 207 -

Tabel IV.3 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Flagship RIPPP Dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2025..... - 211 -

Tabel IV.4 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah 2025 - 282 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat (%) Tahun 2015-2025	157 -
Gambar III.2	Inflasi Papua Barat Tahun 2025	160 -
Gambar III.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2025.....	163 -
Gambar III.4	Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Tahun 2020 – 2025.....	164 -
Gambar III.5	Perkembangan Gini Ratio Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2025	165 -
Gambar III.6	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat dan Nasional tahun 2020-2024.....	167 -
Gambar III.7	Target dan Realisasi PAD APBD Papua Barat Tahun 2021– 2025 (Milyard).....	172 -
Gambar III.8	Realisasi per jenis PAD 2024 dan Semester I APBD Tahun 2025 Regional Papua Barat (Milyard).....	173 -
Gambar III.9	Realisasi per jenis Pajak Daerah APBD Papua Barat Tahun 2024 (Milyard).....	173 -
Gambar III.10	Realisasi per jenis Retribusi Daerah APBD Papua Barat Tahun 2024 (Milyard).....	174 -
Gambar III.11	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Papua Barat Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard).....	174 -
Gambar III.12	Realisasi lain-lain PAD yang sah Semester I APBD Papua Barat Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard)	175 -
Gambar III.13	Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer APBD Semester I APBD Papua Barat Tahun 2025 (Milyard)	176 -
Gambar III.14	Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Papua Barat Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard).....	177 -
Gambar III.15	Proporsi menurut jenis Belanja Daerah APBD Semester I APBD Papua Barat Tahun 2025 (Milyard)	178 -
Gambar III.16	Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Operasi APBD Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard)	178 -
Gambar III.17	Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Modal APBD Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard)	179 -

Gambar III.18 Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Transfer APBD

Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard) - 180 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musrembang yakni wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis-partisipatif yang dilakukan Perangkat Daerah (PD) Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyerasian perencanaan provinsi dan kabupaten dalam rangka penguatan sinergitas nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Papua Barat maka pada tataran operasisonal pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dan menjadi pedoman Gubernur Papua Barat dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang telah terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai dokumen rencana operasional pemerintah daerah yang dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB). Selanjutnya dokumen KUPA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar didalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan

Dengan memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan serta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman umum bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 utamanya menyangkut perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;

2. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;
3. memberikan pedoman bagi Penyesuaian perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025;
4. melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan sebagai pedoman dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
5. memberikan pedoman bagi Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
6. melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku; dan
7. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

1. capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Papua Barat Tahun Anggaran 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah;
2. terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. adanya komitmen Pemerintah terkait dinamika permasalahan yang timbul utamanya Kemiskinan ekstrim, pengentasan stunting dan pengendalian inflasi yang perlu terus memperkuat strategi pengendalian untuk mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
4. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan sub kegiatan serta antar jenis belanja;
5. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;

6. terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
7. kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang; dan
9. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika Dan Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 73); dan
20. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025.

1.5 Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD Tahun 2025, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025.

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I Tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Memuat perubahan asumsi makro ekonomi, arah perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan, dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

6. Bab VI Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2025 di Provinsi Papua Barat.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

Sesuai amanat Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 merupakan RKPD tahun pertama dari RPJMD Provinsi Papua Barat Periode 2025-2029, oleh karena itu RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Realisasi terhadap capaian kinerja RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 secara kumulatif merupakan capaian terhadap realisasi RPJMD Provinsi Papua Barat Periode 2025-2029 yang saat ini telah memasuki trwulan I.

Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat di jabarkan sebagai berikut;

1. Dinas Pendidikan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan OPD;
- b. Meningkatnya Partisipasi Warga negara usia 16-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA/SMK dan Meningkatnya Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus;
- c. Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 28
 - Pagu : Rp30.953.563.647
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari:
 - Kegiatan : 5
 - Sub Kegiatan : 16
 - Pagu : Rp104.983.269.434
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp1.500.000.000
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp137.436.833.081

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Dinas Kesehatan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan secara Merata
- c. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin
- d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan secara merata
- e. Meningkatnya Akses Kemandirian, dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- f. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 28
 - Pagu : Rp70.383.362.551,20
 - Realisasi : Rp14.031.638.591

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- Kegiatan : 5
- Sub Kegiatan : 43
- Pagu : Rp50.512.389.129,38
- Realisasi : Rp0

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp13.904.475.356,00
- Realisasi : Rp0

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp350.000.000,00
- Realisasi : Rp0

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp800.000.000,00
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp135.950.227.036,58

Realisasi Anggaran : Rp14.031.68.5913

% Realisasi Anggaran : 10,32 %

% Kinerja : 1 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

3. BLUD RSUD Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan administrasi perangkat daerah
- b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit rujukan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 22
 - Pagu : Rp29.613.308.460
 - Realisasi : Rp28.174.733.182
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan : 5
 - Pagu : Rp32.939.693.540
 - Realisasi : Rp1.463.359.135
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 1
 - Pagu : Rp298.248.000
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp62.851.250.000

Realisasi Anggaran : Rp1.553.269.135

% Realisasi Anggaran : 2,47 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sasaran

:

- a. Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih, Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan Permukiman
- b. Meningkatnya Pelayanan Dan Kualitas Jalan Provinsi, Infrastruktur Bangunan Gedung Pemerintahan, Dan Tata Ruang Dan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Di Wilayah Provinsi Papua Barat
- c. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Permukiman, Dan Kinerja Layanan Infrastruktur Irigasi Dan Berkurangnya Dampak Daya Rusak Air
- d. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Di Provinsi Papua Barat
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan, Dan Administrasi Perangkat Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 32
 - Pagu : Rp29.577.139.602
 - Realisasi : Rp4.441.265.279
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 11
 - Pagu : Rp50.272.142.000,00
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 6
 - Pagu : Rp40.760.868.000,50
 - Realisasi : Rp28.433.000,00

- d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp1.050.000.000,00
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 4
 - Pagu : Rp25.789.200.000,00
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp3.000.000.000,00
 - Realisasi : Rp0
- g. Program Pengembangan Permukiman Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp7.406.300.000,00
 - Realisasi : Rp0
- h. Program Penataan Bangunan Gedung Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 7
 - Pagu : Rp14.122.000.000,00
 - Realisasi : Rp0
- i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp14.920.900.000,00
 - Realisasi : Rp0
- j. Program Penyelenggaraan Jalan Terdiri Dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 9
 - Pagu : Rp334.523.247.794,00
 - Realisasi : Rp0

k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Terdiri

Dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 17
- Pagu : Rp2.000.000.000,00
- Realisasi : Rp0

l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Terdiri

Dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 16
- Pagu : Rp5.250.000.000,00
- Realisasi : Rp0

m. Program Pengembangan Perumahan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp2.250.000.000,00
- Realisasi : Rp0

n. Program Kawasan Permukiman Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp6.630.000.000,00
- Realisasi : Rp0

o. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp1.120.000.000,00
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp538.671.797.396,50

Realisasi Anggaran : Rp4.665.482.793

% Realisasi Anggaran : 0,87 %

% Kinerja : 7,25 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan: 28
- Pagu : Rp30.525.700.685
- Realisasi : Rp

b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan: 22
- Pagu : Rp2.683.203.628
- Realisasi : Rp

c. Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 7
- Pagu : Rp2.600.000.000
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp35.808.904.313,12

Realisasi Anggaran : Rp

% Realisasi Anggaran : %

% Kinerja : %

6. Badan Penanggulangan Bencana

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan
dan Administrasi Perangkat Daerah

b. Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana

Program, Kegiatan, dan :
Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 21
- Pagu : Rp12.515.000.929,50
- Realisasi : Rp1.399.730.425

b. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan: 15
- Pagu : Rp1.091.600.000,00
- Realisasi : Rp0

Pagu anggaran : Rp13.606.600.929,50

Realisasi : Rp1.399.730.425

% Realisasi Anggaran : 10,29 %

% Kinerja : 16,65 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

7. Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sasaran :

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah
- b. Mewujudkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan

Program, Kegiatan, dan :
Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 38
- Pagu : Rp21.891.575.859,04
- Realisasi : Rp0

b. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 11
- Pagu : Rp767.221.997,55
- Realisasi : Rp0

c. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 51
- Pagu : Rp2.198.904.796,31
- Realisasi : Rp0

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp2.950.000.000,00
- Realisasi : Rp0

e. Program Penanganan Bencana terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 8
- Pagu : Rp1.999.999.985,70
- Realisasi : Rp0

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp0,00
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp29.807.702.638,60

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Penganggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Meningkatnya Penerapan Perundangan-undangan Tenaga Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Perusahaan di Papua Barat
- d. Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- e. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 30
 - Pagu : Rp17.549.209.656,00
 - Realisasi : Rp1.449.250.820,00
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- c. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp300.000.000,00

- Realisasi : Rp0,00
- d. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp500.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 8
 - Pagu : Rp400.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- f. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp200.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp600.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- h. Program Hubungan Industrial terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp7.000.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- i. Program Pengawasan Ketenegakerjaan terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp500.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp27.049.209.656

Realisasi Anggaran : Rp1.449.250.820

% Realisasi Anggaran : 5,36 %

% Kinerja : 1,67 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
- c. Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Serta Ketersediaan Informasi data Gender dan Anak
- d. Meningkatnya Data Gender dan Anak
- e. Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan
- f. Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Anak
- g. Meningkatnya Kabupaten Kota Layak Anak

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 24
 - Pagu : Rp11.724.104.104,00
 - Realisasi : Rp736.247.436,00
- b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp362.030.384,00
 - Realisasi : Rp50.048.000,00

c. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 2
- Pagu : Rp200.000.000,00
- Realisasi : Rp

d. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp662.745.250,00
- Realisasi : Rp0,00

e. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp2.809.389.061,00
- Realisasi : Rp0,00

f. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp0,00
- Realisasi : Rp0,00

g. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 2
- Pagu : Rp118.326.825,00
- Realisasi : Rp0,00

h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 2
- Pagu : Rp968.474.000,00
- Realisasi : Rp0,00

i. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp500.016.210,00
- Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp17.145.085.834

Realisasi Anggaran : Rp786.295.436

% Realisasi Anggaran : 4,59 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

10. Dinas Ketahanan Pangan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan : 18
 - Pagu : Rp13.415.304.697,00
 - Realisasi : Rp0,00
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan : 8
 - Pagu : Rp3.650.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp1.000.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 6
 - Pagu : Rp1.850.000.000,00

- Realisasi : Rp0,00
Pagu Anggaran : Rp19.915.304.697,00
Realisasi Anggaran : Rp0,00
% Realisasi Anggaran : 0 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 24
 - Pagu : Rp12.584.535.308,00
 - Realisasi : Rp0,00
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00

- c. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- d. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 6
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- g. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp750.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- i. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- j. Program Penetapan Tanah Ulayat
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- k. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
- Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- l. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- m. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- n. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00
- o. Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0,00
 - Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp13.334.535.308.,00
Realisasi Anggaran : Rp0,00
% Realisasi Anggaran : 0 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk
- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil
- Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 29
 - Pagu : Rp10.841.821.462,00
 - Realisasi : Rp0,00
- Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp700.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00

- c. Program Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp500.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 7
 - Pagu : Rp850.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp200.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp13.091.821.462,00

Realisasi Anggaran : Rp0,00

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penataan penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Meningkatkan Kerjasama antar desa
- c. Meningkatkan pemerintah kampung yang transparan dan akuntabel

- d. Meningkatkan kapasitas jenis Lembaga kemasyarakatan desa
- e. Meningkatkan ekonomi Masyarakat desa dan kampung

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 14
 - Pagu : Rp13.981.906.334
 - Realisasi : Rp0,00
- b. Program Penataan Desa Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp1.952.761.441,00
 - Realisasi : Rp0,00
- c. Program Peningkatan Kerja Sama Desa Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp450.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp961.185.440,00
 - Realisasi : Rp0,00
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp4.385.000.000,00
 - Realisasi : Rp0,00
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat terdiri dari:
 - Kegiatan : 6
 - Sub Kegiatan: 12

- Pagu : Rp4.645.076.035,00
- Realisasi : Rp0,00
Pagu anggaran : Rp26.375.929.249,50
Realisasi : Rp0,00
% Realisasi Anggaran : 0 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

14. Dinas Perhubungan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan: 28
- Pagu : Rp16.631.870.899,00
- Realisasi : Rp0,00

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp32.498.131.234,00
- Realisasi : Rp0,00

c. Program Pengelolaan Pelayaran terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0,00

d. Program Pengelolaan Penerbangan terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1

- Pagu : Rp26.000.000.000,00

- Realisasi : Rp0,00

e. Program Pengelolaan Perkeretaapian terdiri dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 2

- Pagu : Rp0

- Realisasi : Rp0,00

Pagu anggaran : Rp75.130.002.133,00

Realisasi : Rp0,00

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

15. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur TIK
- b. Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan Sistem Informasi media pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Daerah
- d. Meningkatnya pengamanan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 22
- Pagu : Rp12.065.384.320,00
- Realisasi : Rp0,00

b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 9
- Pagu : Rp674.308.680,00
- Realisasi : Rp0,00

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 7
- Pagu : Rp11.804.156.000,00
- Realisasi : Rp0,00

d. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp176.289.320,00
- Realisasi : Rp0,00

e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp1.304.139.000,00
- Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp26.024.277.320,00

Realisasi Anggaran : Rp0,00

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,
Dan Menengah

Sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat
- b. Meningkatnya Investasi Daerah Guna Menopang Bertumbuhnya Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 35
 - Pagu : Rp17.741.244.161,00
 - Realisasi : Rp1.372.325.871
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp210.717.811,00
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp236.946.495,00
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp221.015.864,00
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian terdiri dari:
 - Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp1.000.000.000,00
- Realisasi : Rp0
- f. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 8
 - Pagu : Rp1.131.319.834,00
 - Realisasi : Rp0
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 13
 - Pagu : Rp1.000.000.000,00
 - Realisasi : Rp0
- h. Program Pengembangan Umkm terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 7
 - Pagu : Rp3.264.395.003,00
 - Realisasi : Rp0
- i. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp435.604.997,00
 - Realisasi : Rp0

Pagu anggaran : Rp25.241.244.165,00

Realisasi : Rp1.372.325.871

% Realisasi Anggaran : 5,44 %

% Kinerja : 5,63 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah guna Menopang
Pertumbuhan

Program, Kegiatan/dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 30
 - Pagu : Rp11.261.129.299,00
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp499.997.150,00
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Promosi Penanaman Modal Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp499.999.680,00
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp699.982.100,00
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp599.963.056,00
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0

- Realisasi : Rp0

Pagu anggaran : Rp13.561.071.285,00

Realisasi : Rp0

% Realisasi Anggaran : %

% Kinerja : %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

18. Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Kreatifitas Pemuda
- c. Meningkatnya Prestasi Olahraga
- d. Meningkatnya Kreatifitas Kepramukaan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 32
 - Pagu : Rp14.091.989.580
 - Realisasi : Rp1.101.845.285
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 7
 - Pagu : Rp1.050.000.000
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp19.890.217.050
- Realisasi : Rp3.490.217.050

d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp35.032.206.630

Realisasi Anggaran : Rp4.592.062.335

% Realisasi Anggaran : 1,45 %

% Kinerja : 5,30 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sasaran : -

Program, Kegiatan/ dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 25
 - Pagu : Rp13.899.627.955
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pengembangan Kebudayaan Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp358.215.927
 - Realisasi : Rp0

- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp1.019.999.852
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp273.012.598
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pengelolaan Permuseuman
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp158.771.468
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp300.000.000
 - Realisasi : Rp0
- g. Program Pemasaran Pariwisata
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp1.499.972.986
 - Realisasi : Rp0
- h. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp0
- i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 4

- Pagu : Rp825.000.010
- Realisasi : Rp0
Pagu anggaran : Rp18.334.600.796
Realisasi : Rp0
% Realisasi Anggaran : 0 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sasaran :

- a. Meningkatnya nilai Tingkat kegemaran membaca Masyarakat
- b. Meningkatnya Indeks pembangunan literasi Masyarakat
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- d. Meningkatnya ketersediaan arsip
- e. Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip

Program, Kegiatan/ dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 15
 - Pagu : Rp400.000.000
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp100.000.000

- Realisasi : Rp0
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri Dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 31
 - Pagu : Rp11.548.830.773
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Akreditasi Perpustakaan Dan Sertifikasi Pustakawan terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pengelolaan Arsip terdiri Dari:
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 11
 - Pagu : Rp500.000.000
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp0
- g. Program Perizinan Penggunaan Arsip terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp0
- h. Program Akreditasi Dan Sertifikasi terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp0

Pagu anggaran : Rp12.548.830.773

Realisasi : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

21. Dinas Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (BLUD)

Sasaran :

- a. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 15
 - Pagu : Rp27.433.668.422
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp369.999.608
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp4.517.109.668
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari :

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan: 10
- Pagu : Rp2.583.569.253
- Realisasi : Rp0

e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp830.643.473
- Realisasi : Rp0

f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 6
- Pagu : Rp1.249.995.897
- Realisasi : Rp0

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD) terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp36.984.986.321

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : %

% Kinerja : %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sasaran :

1. Meningkatnya Administrasi penunjang Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2. Meningkatnya Infrastruktur sarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Meningkatnya Infrastruktur Prasarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4. Meningkatnya perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Meningkatnya Infrastruktur Prasarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6. Meningkatnya kualitas dan keterampilan SDM Pertanian Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 17
 - Pagu : Rp35.712.944.543
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp10.522.000.000
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp1.328.000.000
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp1.050.000.000
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari:
 - Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp219.606.600
- Realisasi : Rp0

f. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp1.200.000.000
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp50.032.551.143

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Meningkatnya Tata Kelola, Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Asal Hewan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 24
 - Pagu : Rp36.608.039.561
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 7

- Pagu : Rp1.900.000.000
- Realisasi : Rp0
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp550.000.000
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 7
 - Pagu : Rp450.000.000
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp50.000.000
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp650.000.000
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp40.258.039.561

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

24. Dinas Kehutanan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sasaran : Meningkatnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) sektor kehutanan.

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 28
- Pagu : Rp53.397.639.596
- Realisasi : Rp0

b. Program Pengelolaan Hutan terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 25
- Pagu : Rp41.405.289.133
- Realisasi : Rp0

c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp477.642.074
- Realisasi : Rp0

d. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 4
- Pagu : Rp3.564.846.803
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp98.845.417.606

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber
Daya

Sasaran :

- a. Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah
- b. Meningkatkan elektrifikasi Daerah
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan penatausahaan pertambangan mineral dan Batubara
- d. Mengoptimalkan pengembangan sumber daya geologi dan air bawah tanah
- e. Meningkatkan Elektrifikasi Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 24
 - Pagu : Rp21.893.939.387
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian terdiri dari :
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp1.012.063.240
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara terdiri dari :
 - Kegiatan : 5
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp1.195.098.400
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Minyak Dan Gas Bumi terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp594.668.963
 - Realisasi : Rp
- e. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan terdiri dari :
 - Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan: 2
- Pagu : Rp302.447.040
- Realisasi : Rp

f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 6
- Pagu : Rp43.360.844.655
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp68.359.061.685

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pemerintahan :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
- c. Meningkatnya Ekspor Non Migas Papua Barat.
- d. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Industri Non

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 21
 - Pagu : Rp17.543.297.484
 - Realisasi : Rp0

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting terdiri dari :
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp1.440.000.000
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Pengembangan Ekspor terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp1.200.000.000
 - Realisasi : Rp0
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp1.250.000.000
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 1
 - Pagu : Rp310.000.000
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp699.945.999
 - Realisasi : Rp0
- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 2
 - Pagu : Rp150.000.000
 - Realisasi : Rp0
- h. Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3

- Pagu : Rp450.000.000
- Realisasi : Rp0
Pagu Anggaran : Rp23.043.243.483
Realisasi Anggaran : Rp0
% Realisasi Anggaran : 0 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

27. Biro Umum

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 13
 - Sub Kegiatan : 25
 - Pagu : Rp24.240.000.001
 - Realisasi : Rp53.300.000

Pagu Anggaran : Rp24.240.000.001

Realisasi Anggaran : Rp53.300.000

% Realisasi Anggaran : 0,22 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

28. Biro Administrasi Pimpinan

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- a. Tercapainya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Daerah Provinsi Dalam Pelayanan Administrasi Pimpinan, Pelayanan Umum, Sekretariat dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah.

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 21
 - Pagu : Rp4.900.000.000,30
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp4.900.000.000,30

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

29. Biro Organisasi

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp750.000.000
- Realisasi : Rp0

- b. Program Penataan Organisasi terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 8
- Pagu : Rp2.750.000.000
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp3.500.000.000

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

30. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 0
- Sub Kegiatan : 0
- Pagu : Rp
- Realisasi : Rp

- b. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 9

- Pagu : Rp6.909.999.746
- Realisasi : Rp64.000.000
Pagu Anggaran : Rp6.909.999.746
Realisasi Anggaran : Rp64.000.000
% Realisasi Anggaran : 29 %
% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

31. Biro Kesejahteraan Rakyat

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah
Sasaran : Meningkatnya pelayanan Kepada Umat Beragama
Program, Kegiatan, dan :
Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp1.024.707.230
- Realisasi : Rp0

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 8
- Pagu : Rp91.368.874.771
- Realisasi : Rp7.000.000.000

Pagu Anggaran : Rp92.393.582.001
Realisasi Anggaran : Rp7.000.000.000
% Realisasi Anggaran : 7,58 %
% Kinerja : 0 %.

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga

Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan da Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

32. Biro Hukum

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- b. Penataan Arsip Dinamis yang efisien
- c. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang sesuai Kebutuhan Daerah
- d. Pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pertimbangan Hukum

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp1.409.999.900,00
 - Realisasi : Rp117.040.000
- b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 6
 - Pagu : Rp3.440.000.000,00
 - Realisasi : Rp141.000.000

Pagu Anggaran : Rp4.849.999.900,00

Realisasi Anggaran : Rp258.040.000

% Realisasi Anggaran : 5,32 %

% Kinerja : 1,52 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan da Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

33. Biro Perekonomian

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan: 3

- Pagu : Rp1.094.621.332

- Realisasi : Rp0

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 3

- Sub Kegiatan: 9

- Pagu : Rp3.905.298.779

- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp4.999.920.111

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

34. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

a. Meningkatnya Program Kebijakan dan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 6

- Sub Kegiatan: 12
- Pagu : Rp1.750.760.400
- Realisasi : Rp0

b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan
Barang Dan Jasa terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 9
- Pagu : Rp3.749.239.600
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp5.500.000.000

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

35. Biro Administrasi Pembangunan

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 12
- Pagu : Rp3.109.697.728,70
- Realisasi : Rp0

b. Program Program Penataan Organisasi terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp102.217.620
- Realisasi : Rp0

c. Program Program Kebijakan Administrasi
Pembangunan terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 6
- Pagu : Rp1.288.084.175,00
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp4.499.999.523,70

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

36. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- a. Tercapainya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam pelayanan Administrasi Pimpinan, pelayanan Umum Sekretariat dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
- b. Tercapainya pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 6
 - Sub Kegiatan: 10
 - Pagu : Rp229.999.347,00
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Program Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan: 4
 - Pagu : Rp999.999.412,00
 - Realisasi : Rp0

c. Program Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp900.000.000
- Realisasi : Rp0

d. Program Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp536.999.826
- Realisasi : Rp

e. Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp1.333.000.132,00
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp3.999.998.717,00

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

37. Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 9
- Sub Kegiatan: 24

- Pagu : Rp133.730.246.423
- Realisasi : Rp0,00
Pagu Anggaran : Rp133.730.246.423
Realisasi Anggaran : Rp0,00
% Realisasi Anggaran : 0,00 %
% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

38. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 10
 - Sub Kegiatan: 33
 - Pagu : Rp71.905.683.989
 - Realisasi : Rp26.034.907
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 35
 - Pagu : Rp46.824.258.143
 - Realisasi : Rp0,00
- Program Sekretariat DPRD Papua Barat terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp118.729.942.132
Realisasi Anggaran : Rp26.034.907
% Realisasi Anggaran : 0,07 %

% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Pemerintahan : Perencanaan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 41
 - Pagu : Rp20.174.631.328
 - Realisasi : Rp0,00
- b. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 14
 - Pagu : Rp4.989.214.748
 - Realisasi : Rp0,00
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 24
 - Pagu : Rp5.802.199.125
 - Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp30.966.045.201

Realisasi Anggaran : Rp0,00

% Realisasi Anggaran : 0,00 %

% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

40. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Pemerintahan : Keuangan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah
- c. Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan SOP
- d. Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan: 47
 - Pagu : Rp202.916.346.270
 - Realisasi : Rp0,00
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 5
 - Sub Kegiatan: 37
 - Pagu : Rp1.073.653.702.108,52
 - Realisasi : Rp0,00
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 12
- Pagu : Rp4.200.000.550
- Realisasi : Rp0,00
Pagu Anggaran : Rp1.285.770.048.928.65
Realisasi Anggaran : Rp0,00
% Realisasi Anggaran : 0,00 %
% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

41. Badan Pendapatan Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang, Urusan Pemerintahan Keuangan

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan: 31
- Pagu : Rp188.850.628.259
- Realisasi : Rp2.017.256.702

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan: 5
- Pagu : Rp1.442.316.600
- Realisasi : Rp0,00

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 15
- Pagu : Rp6.860.733.180
- Realisasi : Rp35.151.838

Pagu Anggaran : Rp197.153.678.038

Realisasi Anggaran : Rp2.052.408.540

% Realisasi Anggaran : 0,74 %

% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

42. Badan Kepegawaian Daerah

Urusan Penunjang : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Kepegawaian

Sasaran :

- a. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 35
 - Pagu : Rp15.611.725.698
 - Realisasi : Rp2.841.870.692
- b. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 4
 - Sub Kegiatan: 40
 - Pagu : Rp9.346.176.977
 - Realisasi : Rp3.233.504.473

Pagu Anggaran : Rp24.957.902.675

Realisasi Anggaran : Rp6.075.375.165

% Realisasi Anggaran : 4,52 %

% Kinerja : 0,00 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

43. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pendidikan Dan Pelatihan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penganggaran
dan Administrasi Perangkat

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan: 17
- Pagu : Rp13.602.176.419
- Realisasi : Rp2.861.130.094

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 12
- Pagu : Rp584.217.012
- Realisasi : Rp0

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp15.737.194.040
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp29.923.587.471

Realisasi Anggaran : Rp2.861.130.094

% Realisasi Anggaran : 9,56 %

% Kinerja : 18,16 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan da

Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

44. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian
Dan Pengembangan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas, Kreativitas dan Inovasi dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah melalui Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 22
 - Pagu : Rp8.609.469.958
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - Kegiatan : 3
 - Sub Kegiatan: 7
 - Pagu : Rp2.250.373.783
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp10.859.843.740,50

Realisasi Anggaran : Rp0

% Realisasi Anggaran : 0 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

45. Badan Penghubung Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Penghubung

Sasaran :

- a. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan administrasi Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Program Pelayanan Penghubung.

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 22
 - Pagu : Rp11.641.755.633
 - Realisasi : Rp1.099.335.834
- b. Program Pelayanan Penghubung terdiri dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp1.018.472.532
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp12,660,228,165.25

Realisasi Anggaran : Rp1.099.335.834

% Realisasi Anggaran : 8,68 %

% Kinerja : 9,26 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

46. Inspektorat

Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

- b. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Penganggaran dan administrasi Perangkat Daerah

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan: 23
- Pagu : Rp24.320.072.907
- Realisasi : Rp2.596.568.768

- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 9
- Pagu : Rp4.020.574.925
- Realisasi : Rp349.953.420

- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp3.511.156.000
- Realisasi : Rp78.722.000

Pagu Anggaran : Rp31.851.803.831,78

Realisasi Anggaran : Rp3.025.244.188

% Realisasi Anggaran : 5,32 %

% Kinerja : 9,50 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan: 38
 - Pagu : Rp11.699.914.287
 - Realisasi : Rp0
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 6
 - Pagu : Rp1.350.000.000
 - Realisasi : Rp0
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp3.563.394.438
 - Realisasi : Rp221.865.665
- d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 1
 - Pagu : Rp36.225.000.000
 - Realisasi : Rp0
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 5
 - Pagu : Rp100.000.000
 - Realisasi : Rp0
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Terdiri Dari:
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan: 3
 - Pagu : Rp1.350.000.000
 - Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp54.288.308.724,97

Realisasi Anggaran : Rp221.865.665

% Realisasi Anggaran : 0,41 %

% Kinerja : 0 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

48. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penganggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga MRP

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan: 34
- Pagu : Rp15.011.662.482
- Realisasi : Rp1.505.018.327

- b. Program Utama Dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 21
- Pagu : Rp35.456.927.218
- Realisasi : Rp5.268.887.251

Pagu Anggaran : Rp50.468.589.700,00

Realisasi Anggaran : Rp6.773.905.578

% Realisasi Anggaran : 13,42 %

% Kinerja : 6,02 %

Permasalahan :

- Tingkat serapan anggaran rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, sehingga Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga serapan hanya dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2 Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, maka untuk menilai kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel II.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65%	Rendah
5	0 % ≤ 50%	Sangat Rendah

Kategori Capaian berdasarkan serapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2 Rekapitulasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Papua Barat Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3	12	46	137.436.833.081	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	12	10	127	135.950.227.036,58	14.031.68.5913	1	10,32	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	3	8	28	62.851.250.000	1.553.269.135	0,00	2,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	15	10	127	538.671.797.396,50	4.665.482.793	7,25	0,87	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	9	57	35.808.904.313,12	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	36	13.606.600.929,50	1.399.730.425	16,65	10,29	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Dinas Sosial	7	27	116	29.807.702.638,60	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	9	22	60	27.049.209.656,00	1.449.250.820	1,67	5,36	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	22	44	17.145.085.834,00	786.295.436	0,00	4,59	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	34	19.915.304.697,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	15	24	53	23.602.708.188,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	18	48	13.091.821.462,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	6	17	36	26.375.929.250	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	Dinas Perhubungan	5	11	38	75.130.002.133	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik	3	11	46	26.024.277.320	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9	11	71	25.241.244.165	1.372.325.871	5,63	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	8	41	13.561.071.285	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4	7	44	35.032.206.630	4.592.062.335	5,30	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6	9	45	18.334.600.796	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5	11	71	12.548.830.773	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6	12	41	36.984.986.321	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	6	7	44	50.032.551.143	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7	22	47	40.258.039.561	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Dinas Kehutanan	4	17	58	98.845.417.606	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	6	21	42	68.359.061.685,24	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8	18	40	23.043.243.483,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Sekretariat Daerah	5	12	19	3.999.998.717,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	Biro Umum	3	10	19	4.499.999.523,70	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	21	4.900.000.000,30	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
30	Biro Organisasi	2	4	11	4.849.999.900,00	258.040.000	1,52	5,32	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2	5	11	92.393.582.001	7.000.000.000	0,00	7,58	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	6	13	3.500.000.000	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	Biro Hukum	1	3	9	6.909.999.746	64.000.000	0,00	29	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	Biro Perekonomian	2	9	21	5.500.000.000	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	2	5	12	4.999.920.111	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
36	Biro Administrasi Pembangunan	1	13	35	24.240.000.001	53.300.000	0	0,22	Sangat Rendah	Sangat Rendah
37	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	1	9	24	133.730.246.423	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	3	29	71	118.729.942.132	26.034.907	0,07	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	79	30.966.045.201	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3	14	85	1.285.770.048.928.65	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
41	Badan Pendapatan Daerah	3	13	51	197.153.678.038	2.02.408.540	0,00	0,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah
42	Badan Kepegawaian Daerah	2	11	75	24.957.902.675	6.075.375.165	0,00	4,52	Sangat Rendah	Sangat Rendah
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	8	30	29.923.587.471,00	2.861.130.094	18,16	9,56	Sangat Rend ah	Sangat Rendah
44	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2	9	29	10.859.843.740,50	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
45	Badan Penghubung Daerah	2	7	27	12.660.228.165,25	1.099.335.834	9,26	8,68	Sangat Rendah	Sangat Rendah
46	Inspektorat	3	6	35	31.851.803.831,78	3.025.244.188	5,32	9,50	Sangat Rendah	Sangat Rendah
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	7	63	54.288.308.724,97	221.865.665	0,00	0,41	Sangat Rendah	Sangat Rendah
48	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	2	10	55	50.468.589.700,00	6.773.905.578	6,02	13,42	Sangat Rendah	Sangat Rendah

2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Papua Barat (2020-2024)

2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian IKD Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, terjadi pertumbuhan ekonomi yang bervariasi dari -0,51% di 2020 menjadi 20,80% di 2024, dengan pendapatan per kapita yang juga mengalami peningkatan dari Rp54.488 ribu menjadi Rp85.513 ribu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat secara bertahap dari 65,09 menjadi 67,02, meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan fluktuasi dengan angka 21,37% di 2020, sempat turun menjadi 20,49% di 2023, dan kembali naik menjadi 21,66% di 2024 (lihat Tabel II.3).

Tabel II.3 Capaian IKD Provinsi Papua Barat (Aspek Kesejahteraan Masyarakat)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,51	2,01	3,91	5,18	20,80
Pendapatan (PDRB ADHK) per Kapita	RpRibu	54.488	53.324	53.517	71.924	85.513
Indeks Gini Rasio	Indeks	0,38	0,38	0,37	0,37	0,39
Tingkat Kemiskinan	Persen	21,37	21,84	21,33	20,49	21,66
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,09	65,26	65,89	66,66	67,02
Angka melek huruf	persen					
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,60	7,69	7,84	7,93	7,86
Harapan Lama sekolah	Tahun	12,91	13,13	13,21	13,34	13,17
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,02	66,14	66,46	66,79	67,05
Prevalensi balita stunting	persen			30,00	24,80	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,55	70,34	68,55	-	-
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,91	83,00	83,61	84,18	82,26
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,17	62,17	61,93	62,42	-
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,80	5,84	5,37	5,38	4,13
Peningkatan nilai PAD	Persen					
Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Indeks Ketahanan pangan	Indeks	49,40	46,05	45,92	47,95	51,36
Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen					
Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,81	7,98	8,00	7,43	7,63
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	25,68	25,31	26,84	30,80	31,00
Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	10,85	10,98	10,46	5,22	5,24
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks		55,17	55,83	57,17	

Pada indikator Kinerja daerah lainnya, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,80% menjadi 4,13%, dan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah mengalami perubahan dari WTP menjadi WDP. Beberapa sektor ekonomi menunjukkan perkembangan positif, seperti kontribusi sektor industri pengolahan yang meningkat dari 25,68% menjadi 31,00%, sementara kontribusi subsektor perikanan mengalami penurunan. Indeks Ketahanan Pangan juga mengalami fluktuasi, dengan nilai 49,40 di 2020 dan 51,36 di 2024.

2.3.2 Aspek Daya Saing Daerah

Capaian indikator daya saing daerah Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Nilai Tukar Petani mengalami tren penurunan secara bertahap, yaitu dari 101,08 pada tahun 2020 menjadi 98,88 pada tahun 2024. Nilai Investasi mencatatkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2021, peningkatan pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan hingga tahun 2021, sebelum kemudian menunjukkan penurunan hingga tahun 2024. Indeks Demokrasi juga mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Di sisi lain, Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan konsisten berada pada angka 100%. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) juga memperlihatkan variasi nilai dari tahun ke tahun.

Tabel II.4 Capaian IKD Provinsi Papua Barat (Aspek Daya Saing Daerah)

Aspek Daya Saing Daerah	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	Indeks	101,08	100,43	99,89	99,81	98,88
Nilai Investasi	RpMilyar	1925,4	635,6	2139,1	1261,9	
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	70,46	78,63	78,63	76,2	72,84
Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen					
Indeks Demokrasi	Indeks	61,76	68,68	64,02	65,55	
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Persen	129,66	130,59	124,82	124,26	124,71
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	78,65	81,8	84,22	83,31	
Indeks Resiko Bencana	Indeks					
Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	57,24	58,12	60,13	60,02	
Tingkat maturitas SPIP	Level	1	1	1		
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	65,69	63,04	63,11	63,17	63,22
Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori				Klaster Papua Terinovatif (Kabupaten Kaimana)	Klaster Papua Terinovatif (Kabupaten Kaimana)
Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang		Kurang Inovatif		

Capaian indikator Kinerja daerah pada aspek daya saing daerah mengungkapkan adanya tantangan dan peluang dalam upaya pembangunan daerah. Penurunan Nilai Tukar Petani mengindikasikan perlunya perhatian

lebih terhadap sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Fluktuasi Nilai Investasi menggarisbawahi pentingnya penciptaan iklim investasi yang stabil dan kondusif untuk menarik modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penurunan Indeks Kerukunan Umat Beragama mengisyaratkan perlunya penguatan toleransi dan harmoni sosial di masyarakat. Capaian kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang berada pada level "Sedang" dan "Kurang Inovatif" menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu terus berupaya meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai kebijakan dan program strategis.

2.3.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.3.1 Pendidikan

Berdasarkan data capaian Indeks Kinerja Daerah (IKD) untuk Aspek Pelayanan Umum Pendidikan, terdapat beberapa poin penting. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 24,71% dari 65% di tahun 2023. Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB konsisten di angka 90 per satuan murid dari tahun 2020 hingga 2024, namun persentase SLB terakreditasi minimal B masih 0% untuk periode yang sama.

Tabel II.5 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pendidikan		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	62	63	64	65	24,71
Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	per satuan murid	90	90	90	90	90
Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	0	0	0	0	0
Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	60	62	100	100
Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	55	56	57,75	60
Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	60	65	68	70
Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	60	65	68	70
Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	60	65	68	70
Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Persen	Tidak ada	60	65	68	70

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pendidikan		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Iklim Keamanan SDLB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Persen	65	65	70	75	80
Indeks Inkusisivitas SDLB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Inkusisivitas SMPLB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Iklim Keamanan SMALB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	Persen	60	65	70	75	80
Indeks Inkusisivitas SMALB	Persen	60	65	70	75	80
Rasio guru/murid sekolah SDLB	Rasio per 10.000 murid	20	20	20	20	20
Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio per 10.000 murid	20	20	20	20	20
Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio per 10.000 murid	20	20	20	20	20
Persentase Guru SLB yang tersertifikasi (SDGs)	Persen	3	3	3	3	2
Persentase Guru SDLB,SMPLB,SMALB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	100	100	100	100	100
Persentase penataaan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	63	64	72	80	85
Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	dokume n	0	0	0	0	8
Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meningkawt kompetensinya	orang	0	0	0	30	30

Capaian rerata kompetensi Numerasi dan Literasi untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2021 hingga 2024, dengan beberapa mencapai 100% (Numerasi SDLB) atau 70% (Literasi dan Numerasi SMPLB/SMALB) pada tahun 2024, meskipun data tahun 2020 tidak tersedia. Indeks Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 60-65% pada tahun 2020-2021 menjadi 80% pada tahun 2024. Rasio guru/murid untuk ketiga jenjang (SDLB, SMPLB, SMALB) stabil di angka 20 per 10.000 dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase guru SLB yang tersertifikasi (SDGs) sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 2% dari 3% di tahun-tahun sebelumnya, namun persentase guru SDLB, SMPLB, SMALB yang memiliki kualifikasi

standar tetap 100%. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dari 0 dokumen di tahun-tahun sebelumnya menjadi 8 dokumen di tahun 2024, serta peningkatan jumlah penyusun kurikulum muatan lokal dari 0 orang menjadi 30 orang di tahun 2024.

2.3.3.2 Kesehatan

Capaian sektor kesehatan di Papua Barat dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, namun masih menyisakan berbagai tantangan mendasar. Akreditasi rumah sakit rujukan yang meningkat menjadi 100% pada 2024 serta konsistensi pelayanan saat krisis dan cakupan imunisasi yang tinggi menjadi bukti komitmen dalam peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan penanggulangan TBC juga menonjol, dengan capaian pengobatan yang melampaui target. Namun demikian, kapasitas rumah sakit rujukan masih belum memadai, terlihat dari rendahnya rasio daya tampung, dan sebagian besar puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan sesuai standar.

Angka kematian ibu dan bayi kembali meningkat pada 2024, memperlihatkan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan maternal dan neonatal. Penanganan penyakit menular seperti HIV dan malaria juga belum optimal, dengan prevalensi HIV yang stagnan dan API malaria yang masih jauh di atas target. Selain itu, penurunan cakupan Kawasan Tanpa Rokok serta turunnya pelaksanaan surveilans gizi mengindikasikan perlunya penguatan di bidang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Capaian pelatihan pegawai rumah sakit yang masih jauh dari target memperlihatkan pentingnya investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya sistem kesehatan yang tangguh dan merata di Papua Barat.

Tabel II.6 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Bidang Kesehatan		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT: 1000 Penduduk				1,8	1.77
Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	0	0	0	50	100
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang	Persen				95,16	97,14

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Bidang Kesehatan		2020	2021	2022	2023	2024
terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi						
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	192,22	240,87	101,48	137,93	175,82
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	8	5,06	7,59	4,7	8,79
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	72	69,6	71	85	88
Prevalensi HIV	Persen	2,3	2,3	2,3	2,3	Menunggu STBP
Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	10,6	7,6	13,1	20,33	13,09
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	54,2	60,4	74,5	95	89
Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100	100	100	Tidak ada PBF Cabang	100
Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	Tidak ada UKOT	Tidak ada UKOT	Tidak ada UKOT	Tidak ada UKOT	Tidak ada UKOT
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen				19	24,05
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	9	10	10	6	6
Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen				100	92,14
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT: 1000 Penduduk					
Cakupan pegawai rumah Sakit yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen				45	45

2.3.3.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Indeks Kinerja Daerah (IKD) untuk Aspek Pelayanan Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan beberapa hasil. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi menunjukkan stabilitas di angka 95% dari tahun 2020 hingga 2022, dengan sedikit peningkatan menjadi 95,04% pada tahun 2023 dan 95,08% pada tahun 2024. Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD menunjukkan tren penurunan dari 2,32% di tahun 2020 menjadi 0,4007823% di tahun 2024.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi konsisten 100% dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.7 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (PUPR)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	95	95	95	95,04	95,08
Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Persen	2,32	0,82	0,45	0,392767	0,400782
Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen					
Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	Persen					
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	Persen	100	100	100	100	100
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen					
Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi	Persen				73	26
Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen			4,27	19,16667	20,2381
jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen					
Rasio Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA Regional	Persen					
Cakupan Pemukiman yang dibangun sesuai dengan rencana	persen					
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen					
Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Persen					
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen					
Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani	Persen					
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen					
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen					

2.3.3.4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan data capaian IKD (Indikator Kinerja Daerah) Provinsi Papua Barat, aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan kinerja yang konsisten tinggi selama periode 2020-2024. Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran, persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, serta cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, semuanya mencapai 100% secara berkelanjutan dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.8 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Trantibumlinmas)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen					
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen					
Presentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah Atau Legal	Persen					
Presentase Penanganan Pra Bencana	Persen					

Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Papua Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator seperti Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Persentase penanganan tanggap

darurat bencana, Presentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah Atau Legal, dan Presentase Penanganan Pra Bencana yang datanya tidak lengkap atau tidak tersedia, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengumpulan dan pelaporan data di masa mendatang.

2.3.3.5 Sosial

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.6 Tenaga Kerja

Berdasarkan data Capaian IKD (Indeks Kinerja Daerah) untuk Aspek Pelayanan Umum Tenaga Kerja, angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun menunjukkan peningkatan dari 1,2 per 1000 kasus pada tahun 2023 menjadi 1,69 pada tahun 2024. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek juga meningkat dari 45% menjadi 60,6% dalam periode yang sama. Namun, persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan dari 0,94% menjadi 0,68%.

Tabel II.9 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Tenaga Kerja)

Aspek Pelayanan Umum Tenaga Kerja	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka sengketa perusahaan-pekerja per Tahun	Per 1000 kasus				1,2	1,69
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen				45	60,6
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persen				0,94	0,68
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					7,3	17
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen				1,78	
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen				10	4,51
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen					20
Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persen				0	0
Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Persen				0	0
Persentase satuan pemukiman transmigrasi	Persen				22	22

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Tenaga Kerja		2020	2021	2022	2023	2024
yang difasilitasi pembangunannya						
Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen				20	44
Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada/tidak ada				ada	ada
Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Persen					
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen					
Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani	Persen					
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen					
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen					

Pada Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, terdapat peningkatan yang signifikan dari 7,3% di tahun 2023 menjadi 17% di tahun 2024. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) tidak tersedia datanya untuk tahun 2024, sementara persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan menurun dari 10% menjadi 4,51%. Di sisi lain, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 20% pada tahun 2024. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja, serta persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya, tetap 0% dari tahun 2023 hingga 2024. Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya stabil di 22%, sedangkan yang difasilitasi pembinaannya meningkat dari 20% menjadi 44%. Ketersediaan kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi tetap "ada" di tahun 2023 dan 2024.

2.3.3.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.8 Pangan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.9 Pertanian

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.10 Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data Capaian Indeks Kinerja Daerah (IKD) untuk Aspek Pelayanan Umum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlihat beberapa perkembangan positif. Persentase penduduk berumur 0-17 tahun dengan kepemilikan Akte Kelahiran menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 58% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024. Rasio pasangan berakte nikah juga mengalami peningkatan, dari 37% pada tahun 2021 menjadi 44% pada tahun 2024.

Tabel II.10 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Dukcapil)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	58%	62%	75%	77%	80%
Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	n/a	37%	39%	41%	44%
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Cakupan Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	61%	70%	78%	63%	83%
Pemanfaatan data kependudukan	Persen	3%	3%	3%	3%	5%
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Lebih lanjut, persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan tetap stabil di angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan efektivitas dalam pencatatan kematian. Rasio Cakupan Penduduk ber-KTP per satuan penduduk menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 83%, naik dari 61% di tahun 2020. Pemanfaatan data kependudukan juga mengalami peningkatan dari 3% pada tahun 2020-2023 menjadi 5% pada tahun 2024. Konsistensi juga terlihat pada penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun yang selalu mencapai 100% dari tahun 2020 hingga 2024.

2.3.2.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Capaian indikator kinerja daerah pada aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Papua Barat menunjukkan perkembangan yang beragam selama periode yang diamati. Persentase Posyandu aktif mengalami peningkatan dari 63,32% di tahun 2020 menjadi 76,92% di tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Di sisi lain, persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 20,00% di tahun 2020 menjadi hanya 4,17% di tahun 2024. Jumlah pembinaan kelompok PKK juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan hingga 1501 kelompok di tahun 2023 sebelum menurun menjadi 720 kelompok di tahun 2024.

Tabel II.11 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat Kampung)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2020	2021	2022	2023	2024
persentase Posyandu aktif	Persen	63,32	63,72	70,32	68,46	76,92
Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	20	12,84	18,18	10,83	4,17
Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok			1438	1501	720
Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen			26,23	31,82	23,29
Persentase kampung mandiri	Persen	0	0	0,11	0,21	1,04
Persentase kampung maju	Persen	0,65	0,84	1,26	0,98	1,56
Persentase kampung berkembang	Persen	6,48	7,92	10,91	13,29	25,42
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0,34	0,18	0,23	7,55	17,52
Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit	ada/tidak ada					

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2020	2021	2022	2023	2024
layanan untuk kesejahteraan masyarakat						
Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persen				72,23	

Selanjutnya, persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan, dan informasi kampung menunjukkan penurunan dari 31,82% di tahun 2023 menjadi 23,29% di tahun 2024. Namun, terdapat peningkatan dalam persentase kampung mandiri, kampung maju, dan kampung berkembang selama periode tersebut, meskipun dengan angka yang relatif rendah. Persentase pengentasan desa tertinggal juga mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya dinamika dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan positif sementara yang lain menunjukkan penurunan atau fluktuasi.

2.3.3.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.14 Perhubungan

Dalam periode 2020 hingga 2024, Provinsi Papua Barat menunjukkan stabilitas dalam beberapa indikator kinerja daerah di bidang perhubungan. Rasio konektivitas provinsi tercatat konsisten di angka 90% selama periode ini. Untuk jalan provinsi, V/C Ratio tetap di bawah 0.8, menunjukkan kapasitas jalan masih memadai, sementara persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang mengalami peningkatan bertahap dari 40% di 2020 menjadi 43% di 2024. Namun, persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi tetap pada 0% selama periode ini.

Tabel II.12 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Perhubungan)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Perhubungan		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas Provinsi	Persen	90	90	90	90	90
V/C Ratio di Jalan Provinsi	Persen	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen	40	41	41	42	43

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perhubungan						
Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen	0	0	0	0	0
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen	55	55	57	57	57
Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	1.022.826	75.897.688	165.328.314		
Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	1.022.826	206.229	268.342	431.812	
Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen					
Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton				5.417.516	7.490.033
Jumlah arus penumpang angkutan udara	arus penumpang				699.463	644.289

Di sisi lain, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian mengalami sedikit peningkatan dari 55% di 2020-2021 menjadi 57% pada 2022-2024. Data jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan menunjukkan peningkatan signifikan dari 1.0228.26,00 ton di 2020 menjadi 165.328.314 ton pada 2022, sementara jumlah penumpang angkutan laut juga menurun dari 1.022.826 orang di 2020 menjadi 431.812 orang pada 2023. Untuk angkutan udara, data menunjukkan jumlah bongkar/muat barang meningkat dari 5.417.516 ton menjadi 7.490.033 ton, namun jumlah arus penumpang mengalami penurunan dari 699.463 menjadi 644.289

2.3.3.15 Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang Komunikasi dan Informatika, persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo mengalami fluktuasi. Dimulai dari 50,00% pada tahun 2020, meningkat menjadi 60,00% pada tahun 2021, 80,00% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di 85,0% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun menjadi 70,20% pada tahun 2024. Di sisi lain, cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 50,00% pada tahun 2020 menjadi 92,65% pada tahun 2024.

Tabel II.13 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Komunikasi dan Informatika)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Komunikasi dan Informatika		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	50,00	60,00	80,00	85,0	70,20
Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	50,00	60,00	75,00	80,0	92,65
Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)	Persen	-	-	-	-	-

2.3.3.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.17 Penanaman Modal

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.18 Kepemudaan, dan Olahraga

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.19 Statistik

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.20 Persandian

Untuk bidang Persandian, persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah juga mengalami perubahan dari 30,00% pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 75,00% pada tahun 2021 dan 90,00% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 80,00% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 95,00% pada tahun 2024. Namun, untuk bidang Statistik, data mengenai persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dan persentase Data Spasial Papua Barat tidak tersedia dalam tabel.

Tabel II.14 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Persandian)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Komunikasi dan Informatika		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	30,00	75,00	90,00	80,00	95,00

2.3.3.21 Kebudayaan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.22 Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Papua Barat menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IPLM tercatat sebesar 10,50, mengalami sedikit penurunan menjadi 10,41 pada tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan IPLM mencapai 37,58, dan terus meningkat hingga 64,29 pada tahun 2023 serta 65,86 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya pengembangan literasi masyarakat yang cukup progresif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat penurunan di awal periode.

Tabel II.15 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Perpustakaan)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Perpustakaan		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	10,5	10.41	37,58	64,29	65,86

Secara keseluruhan, tren positif dalam peningkatan IPLM dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perhatian dan intervensi yang efektif dalam meningkatkan literasi di Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program literasi yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi IPLM, guna memastikan peningkatan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.

2.3.3.23 Kearsipan

Indikator capaian daerah bidang urusan kearsipan di Provinsi Papua Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan. Persentase pemberian izin penggunaan arsip dan tingkat keberadaan serta keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berada pada angka 0,00% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan kearsipan di

wilayah tersebut. Tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kearsipan menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan tidak terlaksananya program/kegiatan yang seharusnya mendukung pencapaian indikator ini.

Tabel II.16 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kearsipan)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Kearsipan		2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen	0	0	0	0	0
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	0	0	0	0	0

Selain ketiadaan Perda, faktor krusial lainnya adalah tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang kompeten, terutama Arsiparis. Kekurangan tenaga ahli di bidang kearsipan ini mengakibatkan tidak adanya program/kegiatan pendukung indikator yang dapat diimplementasikan, sehingga data capaian yang dihasilkan pun nihil. Dengan demikian, perlunya perhatian dan serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi kedua permasalahan ini agar tata kelola kearsipan di Provinsi Papua Barat dapat diperbaiki.

2.3.3.24 Kelautan dan Perikanan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.25 Pariwisata

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.26 Pertanian

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.27 Perdagangan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.28 Perindustrian

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.29 Kehutanan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.30 Energi dan Mineral

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.31 Pemerintahan Umum

Berdasarkan data Capaian IKD (Indeks Kinerja Daerah) untuk Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan Umum, persentase tercapainya pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan kerja sama daerah menunjukkan penurunan signifikan dari 100% pada tahun 2020-2022 menjadi 57,58% pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali menjadi 68% pada tahun 2024. Persentase produk hukum yang difasilitasi menunjukkan angka 100% dari tahun 2020 hingga 2023, namun menurun menjadi 96% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu konsisten 100% dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.17 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Pemerintahan Umum)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Pemerintahan Umum		2020	2021	2022	2023	2024
Rumusan kebijakan dan model afirmasi perlindungan sosial OTSUS bagi OAP kontekstual Papua	ada/tidak ada					
Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persen					
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persen					
Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kerjasama daerah	Persen	100	100	100	57,58	68
cakupan penyepakatan batas wilayah provinsi papua barat	persen					
Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persen					
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen					
Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Layanan Administrasi pemerintahan desa	Persen					

Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan Umum	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelaporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persen					
Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	96
Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
Persentase capaian bantuan kepada masyarakat terutama OAP	Persen					
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	B	B	B
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	CC	CC	B	B	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		B	C	B	A
Rumusan kebijakan dan model penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan distrik yang dihasilkan	ada/tidak ada					
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen					
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen					
Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Persen					
Presentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah	Persen					
Persentase Rumusan Kebijakan koperasi, ekonomi kreatif dan sumber daya alam	Persen					
Persentase fasilitasi Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen					
Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	Persen					
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada	ada/tidak ada					

Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan Umum	Satuan	Capaian IKD				
		2020	2021	2022	2023	2024
setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPB						
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPB untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	ada/tidak ada					
Terintegrasi program-program DPRP untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRP	ada/tidak ada					
Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjangkauan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP	Persen					
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan MRP	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan Pembangunan	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkauan aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

2.3.3.32 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.33 Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.34 Pendapatan Daerah

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.35 Kepegawaian Daerah

indikator kinerja daerah di bidang kepegawaian Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Dalam hal cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah, persentase tertinggi dicapai pada tahun 2024, yaitu sebesar 98,67%, mendekati target 90-100%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 82,40% sebelum kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga mengalami perubahan, dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 43% dan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,73%.

Tabel II.18 Capaian IKD Aspek Pelayanan Umum (Kepegawaian Daerah)

Aspek Pelayanan Umum	Satuan	Capaian IKD				
Kepegawaian Daerah		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	0,9405	0,9553	0,824	0,9133	0,9867
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	89,61	83,06	88,27	90,21	97,57
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	0,9612	0,909	0,9026	0,43	0,9973

Secara umum, persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024, meningkat dari 89,61% menjadi 97,57%. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 setelah penurunan tajam pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pengelolaan kepegawaian, dengan peningkatan capaian di tahun 2024 yang menunjukkan upaya perbaikan dan fokus pada pengembangan kompetensi ASN.

2.3.3.36 Pengawasan Pembangunan Daerah

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.37 Penelitian dan Pengembangan

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.3.3.38 Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat Daerah Belum mengumpulkan data sehingga belum dapat dievaluasi.

2.4 Program Perangkat Daerah Berdasarkan Kinerja Outcome

Program perangkat daerah berdasarkan kinerja outcome tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.19 Program Perangkat Daerah berdasarkan Kinerja Outcome

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
PENDIDIKAN				
DINAS PENDIDIKAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PENDIDIK AN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	Rasio		DINAS PENDIDIK AN
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persentase		
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persentase		
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persentase		
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	tingkat nasional untuk Numerasi			
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase		
	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	Persentase		
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Persentase		
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase		
	Persentase Kabupaten yang tersedia Pendidikan Akademi Komunitas	Persentase		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio		DINAS PENDIDIK AN
	Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio		
	Persentase Guru SLB yang tersertifikasi	Persentase		
	Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Pendidikan Khusus			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan pendidikan khusus yang tersusun	Silabus		DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Penduduk OAP usia sekolah yang menerima Pelayanan Program Kartu Papua Cerdas	Orang		
KESEHATAN				
DINAS KESEHATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk		DINAS KESEHATAN
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persentase		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase		
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup		
	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase		
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persentase		
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di kampung	Layanan		
	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota		
	Persentase Kabupaten/Kota mencapai target STBM	Persentase		
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase		
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase		
	Positive Rate HIV	Persentase		
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase		
	Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun	Persentase		
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persentase		
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persentase		
	Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	Persentase		
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persentase		
	Kabupaten Kota dengan Eliminasi Kusta	Kabupaten		
	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persentase		
	Persentase Kab/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase		
	Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase		
	Persentase Diabetes dalam Pengendalian	Persentase		
	Prevalensi Depresi pada Usia lebih dari 15 tahun	Persentase		
	Presentase Alat Kesehatan yang digunakan sesuai standar	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	Persentase		DINAS KESEHATAN
	Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	Persentase		DINAS KESEHATAN
	Persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase		
	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kab/Kota		DINAS KESEHATAN
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	Persentase		DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persentase		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait	Persentase		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	penurunan prevalensi stunting)			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persentase		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Barat Sehat	Orang		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		Blud RSUD Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe RSUD Provinsi	Tipe		Blud RSUD Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Nakes dan Non Nakes Bersertifikat keahlian pada RSUD Provinsi	Persentase		Blud RSUD Provinsi
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan	Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase cakupan	Persentase		DINAS PEKERJA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	drainase dalam kondisi baik			AN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Rasio		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan irigasi Multi Komoditas	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah			
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	Lokasi		
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
SATPOL PP				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persentase		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Persentase		
	Persentase Penyelenggaraan	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Trantibumlinmas			
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase		
BPBD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terselenggaranya program Penanggulangan Bencana	Persentase		
Sosial				
DINAS SOSIAL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase		DINAS SOSIAL
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase		
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase		
PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase		DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase		
	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan Pendataan data Fakir Miskin	Persentase		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase		DINAS SOSIAL
	Presentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagannya	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase		
	Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase		
	Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Persentase		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persentase		DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM OAP Bantuan Sosial Afirmasi bagi Lansia dan Kelompok Rentan (Gender dan Disabilitas)	Persentase		DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase		
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase		
Tenaga Kerja				
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase		DINAS TRANSMI GRASI DAN TENAGA KERJA
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persentase		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persentase		DINAS TRANSMI GRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Persentase		
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase		
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:			
	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari	Orang		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan			
	b. Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit		
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Transmigrasi				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi potensinya	Persentase		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date di kabupaten di Provinsi Papua Barat	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 perempuan)	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pangarusutama an Gender ke kabupaten/kota	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persentase		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persentase		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	Persentase		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pangan				
DINAS KETAHANAN PANGAN				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Persentase		DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persentase		DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Konsumsi Pangan	Persentase		DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase		DINAS KETAHANAN PANGAN
Pertanahan				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang di tetapkan	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
Lingkungan Hidup				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persentase		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Indeks		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUMADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen		DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS	Ada/Tidak ada		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase pasangan berakte nikah	Rasio		
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase		
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Aktivasi	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Identitas Kependudukan Digital (IKD)			
	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Data Penduduk Terpilah (OAP dan Non OAP) pada aplikasi SIAK	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	Persentase		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase Keluarga Miskin Beresiko Stunting yang mendapatkan bantuan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kampung	Persen		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Posyandu aktif	Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT				KAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentasi Peningkatan Satus desa maju / mandiri	Persen		
	Jumlah pembinaan kelompok PKK			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen		
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri	Persen		DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN KAMPUNG
	Persentase kampung maju	Persen		
	Persentase kampung berkembang	Persen		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen		DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN KAMPUNG
	Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat	ada/tidak ada		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraa n pemerintahan kampung	Persentase		DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Cakupan Data Kondisi Sosial Ekonomi OAP	Persen		DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN KAMPUNG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat OAP	Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Laju pertumbuhan penduduk	persen		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	persen		
Perhubungan				
DINAS PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio		DINAS PERHUBUNGAN
	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Rasio		
	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen		
	Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen		
	Persentase Kelengkapan	Persen		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal			
	Tersedianya Terminal Type B	Unit		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen		DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton		DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah penumpang (keberangkatan / kedatangan) angkutan laut	Orang		
	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton		DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah arus penumpang angkutan udara	Orang		
Komunikasi dan Informatika				
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Persen		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan	Persen		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	restrukturisasi usaha			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persen		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	Persen		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM yang di bina	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen		
	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Rasio kewirausahaan daerah (%)	Persen		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	Persen		DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penanaman Modal				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan	Persen		DINAS PENANAMAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	perijinan dan non perijinan			MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Kepemudaan, dan Olahraga				
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang dimanfaatkan	Persen		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persen		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Statistik				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		DINAS KOMUNIKASI

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
				INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Persandian				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Kebudayaan				
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya guna pelestarian	Persen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum yang dikelola secara baik	Persen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan guna pelestarian	Persen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	Persen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan sejarah yang didokumentasi, dilindung, dan dimanfaatkan	Persen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Perpustakaan				
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Persentase		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Cakupan Perpustakaan yang diakreditasi sesuai SNP	Persentase		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Persentase		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Persentase		
	Persentase Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat)	Persentase		
Kearsipan				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip sesuai NSKP	Persen		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Digitalisasi Arsip dalam SIKN	Persen		
	Cakupan Pembinaan	Persen		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGK AT DAERAH
	Kearsipan di Provinsi	Kategori		
	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah			
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Presentase Lembaga Kearsipan yang diakreditasi	Persentase		DINAS KEARSIPA N DAN PERPUSTA KAAN
	Presentase Arsiparis yang disertifikasi	Persentase		
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen		DINAS KEARSIPA N DAN PERPUSTA KAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen		DINAS KEARSIPA N DAN PERPUSTA KAAN
Kelautan dan Perikanan				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen		DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		DINAS KELAUTA N DAN PERIKANA N
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Ton		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		DINAS KELAUTA N DAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
				PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pelayanan kepelabuhan	Persentase		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau- pulau kecil yang operasional	Ha		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BLUD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pariwisata				
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan media pemasaran pariwisata	persentase		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	persentase		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisata	persentase		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	dan ekonomi kreatif			
	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	orang		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	persentase		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	jumlah wisatawan domestik	orang		
	jumlah wisatawan mancanegara	Ribu Orang		
	rata rata lama tinggal wisatawan	hari		
	Jumlah Event	event		
Pertanian				
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Perternakan	Persen		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Peternakan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Perternakan	Persen		DINAS PETERNA KAN DAN KESEHAT AN HEWAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL TURA DAN PERKEBU NAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL TURA DAN PERKEBU NAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL TURA DAN PERKEBU NAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL TURA DAN PERKEBU NAN
Perdagangan				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non Migas	Juta US\$		DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	persen		DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase inflasi tahunan	persen		DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	persen		
	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	persen		DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
Perindustrian				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	persentase		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	persentase		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	persen		
Kehutanan				
DINAS KEHUTANAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha		DINAS KEHUTANAN
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen		
	Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen		
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persentase		DINAS KEHUTANAN
	Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3/Tahun		
	Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi	Ha		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	pemanfaatannya			
	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen		DINAS KEHUTANAN
Energi dan Mineral				
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Persen		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen		
Sekretariat Daerah				
SEKRETARIAT DAERAH				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan kerumahtangaa n pimpinan daerah	Persentase		SEKRETA RIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Umum Sekretariat Daerah	Persentase		BIRO UMUM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Persentase		BIRO ADMINIST RASI PIMPINAN
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persen		BIRO ADMINIST RASI PELAKSAN AAN OTONOMI KHUSUS
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persen		BIRO ADMINIST RASI PELAKSAN AAN OTONOMI KHUSUS
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen		BIRO ADMINIST RASI PEMBANG UNAN
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persen		BIRO HUKUM
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen		BIRO KESEJAH TERAAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori		BIRO ORGANISA SI
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerja Sama Daerah	Persentase		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase		
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persentase		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase		BIRO PEREKON OMIAN
	Tingkat Inflasi	Persentase		
	Aset Dana Pensiun/ PDRB	Persentase		
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah		
	Total Kredit/ PDRB	Persentase		
Penghubung Daerah				
BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggarany a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		BADAN PENGHUB UNG DAERAH
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	persen		BADAN PENGHUB UNG DAERAH
Sekretariat DPRD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Program Dukungan	Persentase		SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKIL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			AN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase		
PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjaringan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP	Persen		SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretariat MRP				
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		SEKRETA RIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MEJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	Persentase Alat Kelengkapan MRPyang Memiliki Rencana Kerja Tahunan	Persen		SEKRETA RIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	Persentase Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	persen		
	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjaringan aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	persen		
Perencanaan Pembangunan Daerah				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen		BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH
	Persentase Keselarasaan RPJMD dengan Renstra PD	Persen		
	Cakupan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Persen		
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
				ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Ya/Tidak		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persentase		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Waktu penetapan APDB	Tepat waktu/tidak tepat waktu		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu/tidak tepat waktu		
Pendapatan Daerah				
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Rasio		BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persentase		
	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	Persentase		
	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	Persentase		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan penerimaan PAD UPT Fak- Fak	Persentase		UPT SAMSAT KABUPATEN FAKFAK
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Kaimana	Persentase		UPT SAMSAT KABUPATEN KAIMANA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari	Persentase		UPT SAMSAT KABUPAT EN MANOKW ARI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari Selatan	Persentase		UPT SAMSAT KABUPAT EN MANOKW ARI SELATAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Bintuni	Persentase		UPT SAMSAT KABUPAT EN TELUK BINTUNI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Wondama	Persentase		UPT SAMSAT KABUPAT EN TELUK WONDAM A
Kepegawaian Daerah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	persen		BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH
	Cakupan peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	persen		
	Cakupan peningkatan Kompetensi ASN	persen		
	Cakupan peningkatan Kualitas Data ASN dan Penataan SDM Aparatur	persen		
Pendidikan dan Pelatihan				
Badan Pengembangan SDM				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	persen		BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Inspektorat				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1	Persen		INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level		INSPEKTORAT
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level		
Penelitian dan Pengembangan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	Persen		BADAN PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase		BADAN PENELITIA N DAN PENGEMB ANGAN DAERAH
	Cakupan Riset Bidang Sosial dan Pemerintahan yang Terimplementas i	Persentase		
	Cakupan Riset Bidang Ekonomi Pembangunan yang Terimplementas i	Persentase		
	Cakupan Riset Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah yang Terimplementas i	Persentase		
	Cakupan Diseminasi dan Publikasi Ilmiah dalam Pelayanan Peemrintahan Daerah	Persentase		
	Cakupan Pendaftaran Kekayaan Intelektual HaKI	Persentase		
Kesatuan Bangsa dan Politik				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang Aktif	persen		BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA (2024)	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persen		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat dengan dinamika dan kebijakan nasional, serta mempertimbangkan keterbatasan fiskal yang ada, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan arah kebijakan ekonomi dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua regulasi tersebut memberikan penekanan pada pentingnya efisiensi, efektivitas, dan penyesuaian belanja daerah dalam menghadapi tekanan fiskal, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2 Pokok-Pokok Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dalam skema Perubahan RKPD ditetapkan melalui beberapa strategi utama sebagai berikut:

1. Penajaman Belanja Daerah yang Produktif dan Efisien

Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan *refocusing* belanja daerah dengan mengutamakan pembiayaan program/kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi. Kegiatan yang tidak mendukung output pembangunan, bersifat seremonial, atau memiliki efektivitas rendah akan dikurangi atau dialihkan.

Efisiensi belanja difokuskan pada:

- Perjalanan dinas dan honorarium yang tidak berdampak langsung terhadap output pembangunan;
- Belanja barang/jasa non-prioritas;
- Kegiatan rapat, seminar, dan pelatihan yang tidak esensial.

2. Penyesuaian Pendapatan Daerah yang Realistis dan Berbasis Potensi

Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diarahkan pada:

- Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah;

- Diversifikasi sumber PAD sesuai potensi unggulan wilayah.

Penyesuaian pendapatan dilakukan dengan memperhitungkan potensi riil dan kondisi ekonomi makro daerah, serta menghindari asumsi pendapatan yang tidak realistis.

3. Penguatan Sektor Strategis Daerah dan Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan sektor unggulan menjadi prioritas. Fokus diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian dan perikanan berbasis masyarakat;
- Penguatan UMKM dan koperasi lokal;
- Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan;
- Peningkatan konektivitas wilayah dan akses pasar.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

4. Efektivitas Program Prioritas dan Sinkronisasi dengan Prioritas Nasional

Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong efektivitas program prioritas melalui pendekatan *money follows program*, yaitu anggaran mengikuti program prioritas dan berbasis hasil. Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap diarahkan untuk mendukung:

- Penyesuaian pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat 2025–2029;
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
- Target SDGs dan agenda pembangunan nasional lainnya.

5. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Fiskal

Dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, melalui:

- Pengendalian belanja melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Monitoring dan evaluasi capaian output dan outcome program;
- Pelibatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3.3 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

3.3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah pada periode waktu

tertentu. Untuk menghitungnya, digunakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan / riil dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir pada kurun waktu 2020-2024 memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, sebagai imbas dari pandemi COVID-19, ekonomi Papua Barat mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -0,76 persen, walaupun masih diatas pertumbuhan nasional sebesar -2,77. Kondisi ini terus berlangsung ditahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh pandemi yang terjadi namun mampu tumbuh menjadi -0,51 persen. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi lebih baik dengan perekonomian yang tumbuh 3,69 persen, Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan nasional pada 2021 mengindikasikan belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Papua Barat hingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Papua Barat naik mencapai 2,01 persen dan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01 persen. Sementara ekonomi Papua Barat ditahun 2024 terus meningkat mencapai 3,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun capaian tersebut masih dibawah nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya ekspor permintaan domestik dan luar negeri, serta meningkatnya seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif kecuali pada dua sektor yang terkontraksi yaitu sektor kontruksi dan sektor pertanian. Lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Provinsi Papua Barat adalah industri pengolahan, pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami lonjakan yang signifikan dengan mencatat laju pertumbuhan sebesar 20,8 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen secara tahunan (y-on-y), kinerja ekonomi Provinsi Papua Barat pada Triwulan I Tahun 2025 juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat sebesar 25,53 persen (y-on-y), jauh melampaui capaian tahun 2024 yang hanya tumbuh sebesar 2,27 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Industri Pengolahan mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 41,89 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan terbesar berasal dari Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 56,57 persen.

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), yakni Triwulan IV Tahun 2024, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 0,76 persen pada Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan lapangan usaha, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,43 persen. Dari sisi

pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan paling mencolok sebesar 12,16 persen.

Ditinjau dari nominal PDRB sisi pengeluaran di Provinsi Papua Barat, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan sebesar 17,86 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mencatat pertumbuhan sebesar 6,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, angka kemiskinan, dan laju inflasi. Meskipun sejumlah sektor lain menunjukkan perkembangan positif, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan mayoritas penduduk terhadap sektor pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun demikian, pola konsumsi rumah tangga juga mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan umumnya memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah pedesaan. Ketimpangan ini menimbulkan perbedaan dalam tingkat pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Papua Barat.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merujuk pada pengeluaran untuk pengadaan barang modal yang digunakan dalam kegiatan produksi, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dan peralatan kerja. Pada Triwulan I Tahun 2025, kontribusi PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 8,9 persen. Namun demikian, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,52 persen dibandingkan Triwulan I Tahun 2024. Sebagian besar investasi ini berasal dari sektor konstruksi dan pertambangan, yang didorong oleh pelaksanaan proyek-proyek besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif. Sementara itu, meskipun sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi pengembangan yang cukup besar, investasi di sektor tersebut masih tergolong rendah akibat keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur pendukung. Tingginya investasi pada sektor konstruksi dan pertambangan mencerminkan adanya upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat, khususnya dalam mendukung pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana umum lainnya. Namun, pola investasi yang lebih banyak berfokus pada sektor-sektor ekstraktif kerap menimbulkan ketimpangan, karena manfaatnya belum dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur PDRB dari sisi pengeluaran, karena mencerminkan peran aktif

pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran untuk barang dan jasa. Di wilayah Papua Barat, pengeluaran ini meliputi pembiayaan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta subsidi sosial. Pada Triwulan I Tahun 2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 11,56 persen, dengan pertumbuhan mencapai 8,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

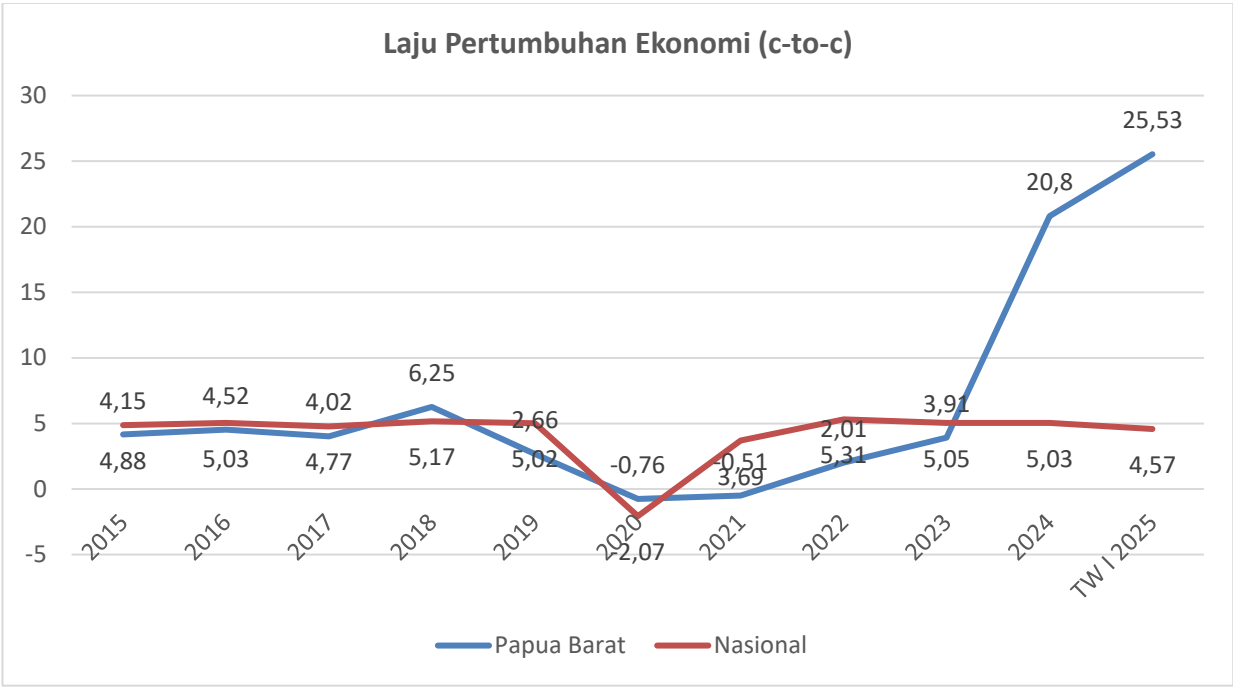
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat terjadi di hampir seluruh sektor usaha, kecuali sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami penurunan sebesar 1,44 persen, serta sektor Konstruksi yang mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,02 persen. Adapun sektor-sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi Industri Pengolahan yang melonjak sebesar 41,89 persen, Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh 36,07 persen, serta sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat sebesar 13,45 persen.

Jika dibandingkan secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Papua Barat pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 0,76 persen. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar 1,99 persen. Pertumbuhan ekonomi q-to-q terjadi di sebagian besar sektor usaha, meskipun beberapa sektor masih mengalami penurunan, seperti Jasa Perusahaan yang terkontraksi sebesar 6,52 persen, sektor Konstruksi turun 3,37 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman turun 2,27 persen, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang melemah 1,88 persen.

Di sisi lain, sektor-sektor yang mencatatkan kinerja positif tertinggi dalam periode q-to-q adalah Pertambangan dan Penggalan dengan pertumbuhan 1,43 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 1,40 persen, serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang tumbuh 0,68 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Papua Barat dan nasional sampai dengan Triwulan I 2025 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar III.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat (%) Tahun 2015-
2025



Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2025 (diolah)

3.3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan kondisi makroekonomi terkini dan mempertimbangkan risiko-risiko yang bersumber dari dalam negeri maupun global, maka ekonomi Papua Barat tahun 2025 diprediksi akan tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan global, walaupun secara umum terjadi deflasi di Provinsi Papua Barat.

Pada Rancangan RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tahun 2025 adalah sebesar 11,20 %. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian Papua Barat tahun 2025. Produksi LNG dari Train III Tangguh dan kontraksi investasi yang didorong oleh rencana akan dimulainya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan berdampak pada tingginya kontribusi dua sektor ini.

3.3.3 Proyeksi Inflasi pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum¹. Jika kenaikan harga barang hanya berasal dari satu atau dua barang saja, maka tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan rata-rata dari perubahan harga suatu komoditas dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke

waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu komoditas.

Secara umum, inflasi digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu: inflasi inti (*core inflation*), inflasi makanan yang bergejolak (*volatile food inflation*) dan inflasi harga yang diatur (*administered price inflation*).

Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan harga sebesar 1,82 persen pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau di Papua Barat pada Triwulan I 2025. Beberapa kelompok lain seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, listrik, serta jasa komunikasi dan keuangan juga mencatat deflasi. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti melemahnya permintaan, melimpahnya pasokan barang (terutama hasil pertanian lokal), serta efisiensi biaya produksi. Misalnya, sektor makanan dan minuman mengalami deflasi akibat surplus bahan baku lokal, sementara sektor perumahan mengalami penurunan harga karena peningkatan pasokan hunian.

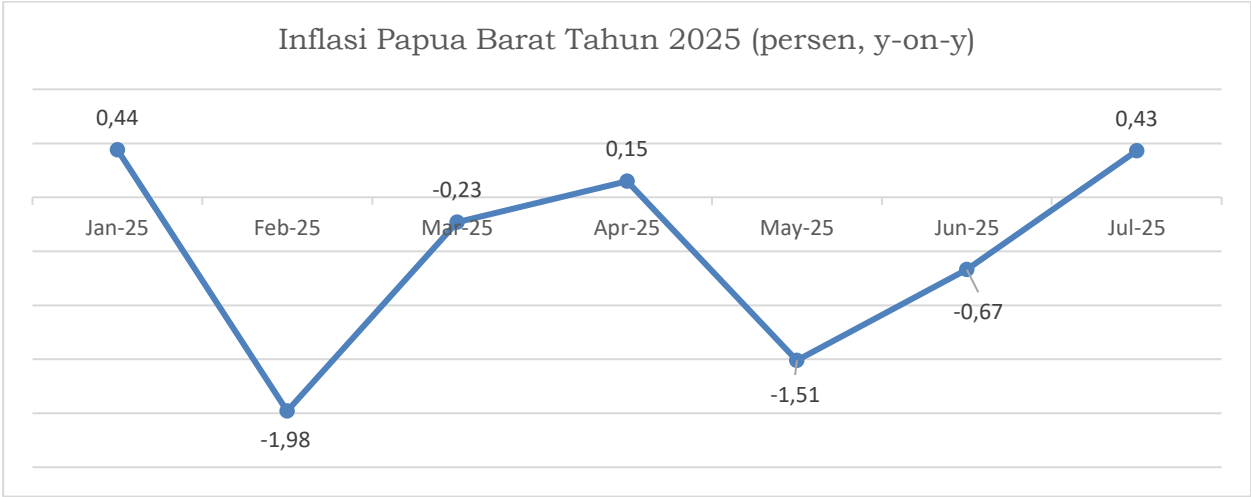
Turunnya daya beli masyarakat—akibat stagnasi pendapatan, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi—juga menekan konsumsi barang dan jasa. Produsen merespons dengan menurunkan harga untuk menjaga permintaan. Sektor-sektor seperti pakaian, perumahan, dan energi menunjukkan gejala ini, dengan deflasi masing-masing hingga lebih dari 2 persen.

Kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan menstabilkan harga, seperti peningkatan pasokan pangan dan subsidi energi, turut berkontribusi terhadap turunnya harga barang pokok. Selain itu, penurunan harga komoditas global dan bahan baku impor juga menekan harga barang-barang lokal yang bergantung pada impor. Secara keseluruhan, deflasi ini mencerminkan kombinasi antara penurunan daya beli, peningkatan pasokan, dan kebijakan stabilisasi harga yang efektif namun berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan stakeholder terkait. Namun capaian di Provinsi Papua Barat masih berada di bawah target nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2025. Papua Barat sendiri mengalami deflasi sebesar $-1,51\%$ (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang mencapai $4,78\%$ (yoy). Dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Papua Barat, TPID senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi yang intensif bersama dengan stakeholder daerah melalui pelaksanaan pasar murah, sidak pasar dan HLM TPID dalam upaya mengarahkan inflasi pada sasaran inflasi sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) melalui strategi 4K pengendalian inflasi.

Selanjutnya inflasi bulan Papua Barat tercatat pada bulan Januari inflasi Papua Barat berada pada level terkendali diangka 3,05 persen (*yoy*) lebih rendah dibanding bulan Desember 2024 sebesar 2,39 persen (*yoy*) kondisi ini menempatkan Papua Barat masuk dalam 25 provinsi yang mencatat inflasi tinggi dari nasional. Dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain tomat, beras, kangkung, ikan ekor kuning/lalosi, ikan layang/momar. Memasuki bulan Februari inflasi berada pada 3,61 persen (*yoy*), kenaikan harga beras, tarif angkutan udara, ikan cakalang, bayam dan bawang putih memberi dampak pada kenaikan indeks harga makan minum dan tembakau, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, transportasi dan . Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang menjadi contributor terbesar. Bulan Maret inflasi Papua Barat tercatat di angka 4,78 persen. Indeks makan minum dan tembakau serta indeks, transportasi, masih menjadi penyumbang terbesar. Pada bulan April turun menjadi 3,59 persen. Penyumbang utama inflasi April 2024 secara y-on-y di Provinsi Papua Barat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,69 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, bawang putih, tomat, dan ikan tuna, yang kemudian inflasi Papua Barat naik di bulan Mei tercatat di angka 4,56 Persen, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,37 persen; kelompok transportasi sebesar 6,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,27 persen; adalah tiga kelompok yang memberikan andil terbesar. Inflasi tahunan Juni 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,73 Persen, dipengaruhi oleh meningkat harga beberapa komoditas antara lain beras, tarif angkutan udara, ikan tuna, bawang putih dan tomat yang berdampak pada kenaikan indeks Makanan, Minuman, dan Tembakau, indeks Transportasi dan indeks Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Inflasi tahunan Papua Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar III.2 Inflasi Papua Barat Tahun 2025



Sumber : BRS Inflasi Papua Barat Tahun 2025

Secara umum, tingkat inflasi Papua Barat sepanjang tahun 2025 masih terkendali pada tingkat ≤ 2 persen (mtm) dan ≤ 5 persen (yoy). Adanya kesigapan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melakukan pengawasan distribusi mampu mencegah penimbunan barang dan permainan harga. Selain itu, TPID juga berhasil menjaga ketersediaan barang dengan melakukan operasi pasar agar dapat membentuk stabilitas harga.

Tabel III.1 Inflasi Bulanan (mtm) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran s.d Triwulan II 2025 (persen)

Kelompok Pengekuaran	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
UMUM (Headline)	0,63	0,13	0,50	0,17	1,35	0,58
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,58	0,13	1,12	0,08	3,13	0,65
Pakaian Alas Kaki	0,00	0,00	0,01	~0	~0	0,13
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	-0,02	0,04	-0,02	- 0,11	0,14	0,04
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,11	0,00	0,03	- 0,04	0,12	0,02
Kesehatan	0,00	0,00	0,05	0,12	- 0,20	0,14
Transportasi	-5,07	0,65	0,87	0,91	- 1,40	2,34
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	~0	- 0,05	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,00	0,00	~0	~0	~0
Pendidikan	0,00	0,00	0,00	~0	~0	~0

Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,00	0,00	~0	- 0,17	0,37
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,10	0,09	0,05	0,87	0,61	0,52

Sumber : BRS Inflasi Gabungan Kota Inflasi di Provinsi Papua Barat 2024

Kemudian berdasarkan perhitungan angka inflasi tahunan, angka Inflasi IHK Papua Barat pada 2024 diperkirakan lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya dengan rentang sasaran 2,5%±1% (yoy).

Realisasi dan Proyeksi inflasi pada perubahan RKPD tahun rencana 2024 selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2 Asumsi dan Realisasi Inflasi Papua Barat Pada Tahun 2019-2024

No	Inflasi (yoy)	Asumsi Tahun Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahunan (%)
1	2019	3,66	1,93
2	2020	3,67	1,52
3	2021	3,80	3,28
4	2022	3,71	4,0 s.d 5,0
5	2023	3,0	3,0±1
6	2024	3,30	2,5±1

Secara kumulatif, laju inflasi Provinsi Papua Barat tahun 2020 mencapai 1,52 persen, lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 1,93 persen dan inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Kebijakan pengendalian tingkat inflasi yang melibatkan banyak pihak sebagaimana tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tampaknya belum berhasil menekan laju pergerakan harga di Provinsi Papua Barat di tahun 2020 ke arah yang lebih moderat, factor yang sangat memberikan andil terhadap kondisi tersebut adalah dampak covid-19 yang berpengaruh terhadap inflasi komoditas yang mengandalkan pasokan dari luar daerah sementara terjadi pembatasan kapal penumpang yang mengangkut komoditas ke Papua Barat.

Untuk tahun 2021 secara umum, tingkat inflasi Papua Barat sepanjang tahun masih terkendali pada tingkat 3,28 persen masih lebih rendah dari yang ditargetkan berkat kesigapan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melakukan pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan barang dan permainan harga selama pandemi. Selain itu, TPID juga menjaga ketersediaan barang dengan melakukan operasi pasar agar dapat membentuk stabilitas harga.

Selanjutnya Inflasi IHK Papua Barat pada 2022 meningkat dibanding dari inflasi tahun 2021 dengan kisaran batas 4,0% - 5,0% (yoy). inflasi Papua Barat tersebut berada diatas rentang sasaran inflasi yang telah

ditetapkan secara Nasional yaitu sebesar $3\pm 1\%$ pada 2022 maupun yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2022. Secara umum, inflasi pada tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional pasca proses vaksinasi yang sedang berjalan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas. Ditinjau dari kelompok disagregasi inflasi, peningkatan harga juga tercermin dari meningkatnya inflasi *administered prices*, inflasi inti, dan inflasi *volatile food*. Dari *Inflasi administered prices* atau inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah,

Pemulihan ekonomi diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga menjadi pendorong inflasi inti kedepan. Berbagai stimulus juga tetap diberikan oleh pemerintah melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan dapat terus mendorong dan menjaga daya beli. Lebih lanjut, *Inflasi volatile food* juga diperkirakan turut meningkat seiring dengan adanya indikasi pemulihan aktivitas perekonomian di Papua Barat. Selain itu, faktor cuaca yang sangat mempengaruhi produksi dan distribusi bahan pangan menjadi salah satu sentimen dalam peningkatan *inflasi volatile food*. Komunikasi efektif terus dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Berbagai hal tersebut diharapkan dapat membawa inflasi 2025 tetap terjaga dan terkendali dalam kisaran yang telah ditetapkan.

3.3.4 Proyeksi Tingkat Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

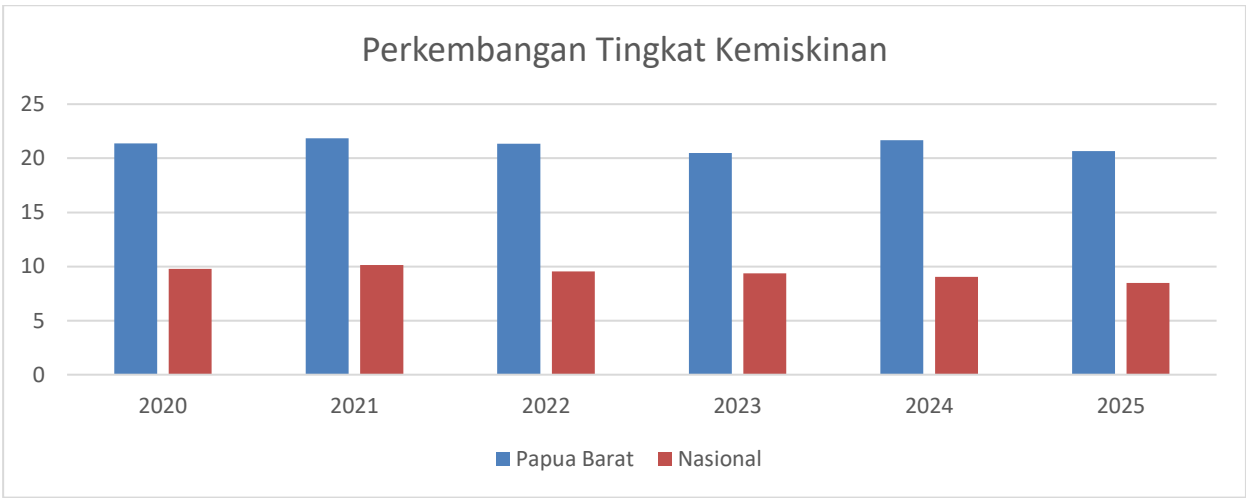
Tingkat kemiskinan di provinsi Papua Barat masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesejahteraan maupun pembangunan daerah ke depan. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kemiskinan Papua Barat yang masih tergolong sangat besar, menduduki peringkat kedua Nasional setelah Provinsi Papua. Selama tahun 2020 tingkat kemiskinan Papua Barat mencapai 21,37 persen jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,78 Persen atau sebanyak 208,58 ribu jiwa. Kemudian Penduduk miskin di Papua Barat 2021 berjumlah 219,07 ribu jiwa (21,84 persen), secara nilai absolut naik sebesar 10,49 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 2020, sedangkan secara persentase naik sebesar 0,47 persen poin. Kemudian disaat kemiskinan nasional mencapai 9,54 persen di tahun 2022 kemiskinan Papua Barat menurun 0,84 persen poin, dengan jumlah penduduk miskin Papua Barat sebesar 222,36 ribu, secara absolut absolut naik sebesar 3,29 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 2021. Sementara pada tahun 2023

jumlah penduduk miskin Papua Barat sebesar 214,98 ribu (sebesar 20,49 persen) masih jauh diatas kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen, menurun 0,84 persen poin terhadap tahun 2022. Secara absolut jumlah penduduk miskin Papua Barat pada tahun 2023, turun 7,38 ribu orang terhadap tahun sebelumnya. Selanjutnya Penduduk miskin di Papua Barat tahun 2024 berjumlah 110,16 ribu jiwa (21,66 persen), secara nilai absolut turun sebesar 104,82 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 2023.

Persentase penduduk miskin Papua Barat pada Maret 2025 sebesar 20,66 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin Papua Barat pada Maret 2025 sebesar 106,90 ribu orang, turun 1,38 ribu orang terhadap September 2024.

Dalam beberapa periode ke belakang penurunan tingkat kemiskinan Papua Barat masih belum begitu signifikan. Pembangunan yang berlangsung selama ini di Papua Barat tampaknya belum berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk keluar dari kemiskinan, ditambah lagi dengan dampak dari turunnya ekonomi baik itu secara volume maupun nilai akibat pandemic. Capaian tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2025 belum melampaui target RKPD provinsi yang sebesar 19,62 persen. Tingkat Kemiskinan Papua Barat dan Nasional pada perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2025



Sumber : BRS Kemiskinan Papua Barat 2025

3.3.5 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Secara teoritis, pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut mencerminkan penambahan output yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kapasitas produksi.

Gambar III.4 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Tahun 2020 – 2025



Sumber : BRS Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat 2025 (diolah)

Tren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren yang fluktuatif. Selama kurun lima tahun terakhir pengangguran tertinggi di Papua Barat terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah pengangguran Papua Barat mencapai 30.039 orang dan tingkat pengangguran sebesar 6,20 persen. Kemudian pada tahun 2021 jumlah pengangguran tercatat turun lagi menjadi 30.311 orang atau 6,18 persen. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran kembali mengalami penurunan menjadi 35.086 atau 5,78 persen. Sementara pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Papua Barat terus mengalami penurunan tercatat 5,53 persen dengan jumlah pengangguran Papua Barat mencapai 34.461 orang. Di tahun 2024 Tingkat Pengangguran Papua Barat terus mengalami penurunan tercatat 4,13 persen dari angkatan kerja yang tersedia, atau lebih kecil dari pengangguran nasional yang mencapai 4,82 persen. Tingkat pengangguran tersebut mengalami penurunan 1,22 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Papua Barat terus tercatat 4,21 persen dengan jumlah pengangguran Papua Barat mencapai 12.511 orang.

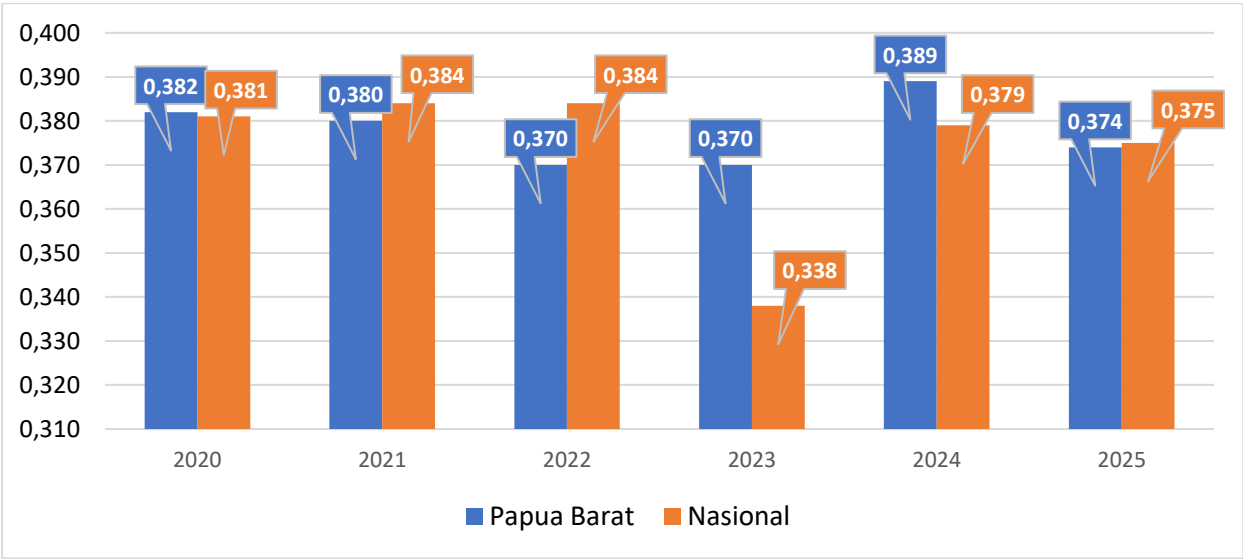
Kondisi ketenagakerjaan di Papua Barat mengalami perbaikan dengan cukup banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 43,08 persen (tumbuh 7,33 persen, *yoy*) dan disusul oleh perdagangan besar dan eceran yang mencapai 19,35 persen (tumbuh 3,86 persen, *yoy*). Selain itu, peningkatan permintaan dengan dorongan konsumsi pemerintah melalui beberapa proyek konstruksi (jalan, jembatan, drainase, dam, bendungan) yang melibatkan masyarakat di beberapa kabupaten, serta kembali bergeliatnya mobilitas yang mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan mampu menyediakan tambahan lapangan pekerjaan bagi ± 110.935 orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program padat karya pemerintah mampu menekan bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran di Papua Barat. Meski demikian, upaya meredam dampak buruk inflasi dan kenaikan harga BBM bagi perekonomian agar tidak semakin meluas tetap harus konsisten dilaksanakan dengan mengoptimalkan program stimulus berupa penyaluran subsidi seperti kartu sembako, kartu pra kerja dan lainnya, ditambah dengan percepatan dan perluasan stimulus kredit lanjutan kepada sektor riil.

3.3.6 Proyeksi Tingkat Ketimpangan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Pembangunan mengharuskan adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan yang tinggi perlu didukung oleh indikator utama lainnya yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang timpang menyebabkan terjadinya konflik social dalam masyarakat meskipun hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika peningkatan pendapatan hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak melambat dan ketimpangan semakin tinggi. Salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dengan menggunakan Rasio Gini. Rasio tersebut menggambarkan derajat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah yang nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna). Perkembangan Tingkat Ketimpangan Papua Barat dan Nasional pada perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.5 Perkembangan Gini Ratio Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2025



Sumber : BPS RI dan BPS Papua Barat 2025 (data diolah)

Berbeda dengan nasional, tingkat distribusi pendapatan Papua Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir bergerak dalam tren yang menurun atau berada pada tingkat moderat (0,3-0,5). Pada tahun 2020, gini ratio Papua Barat tercatat sebesar 0,382, kemudian menurun hingga mencapai 0,370 pada tahun 2023, 0,389 di tahun 2024, dan menurun menjadi 0.374 pada tahun 2025, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 0.375.

Terlepas dari keberadaan pandemi, penurunan tingkat ketimpangan terjadi karena pendapatan seluruh lapisan masyarakat utamanya sektor informal mengalami penurunan sehingga memperkecil tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, adanya program perlindungan sosial yang digulirkan, setidaknya mampu memperkuat ketahanan masyarakat miskin agar tidak jatuh semakin dalam. Jika dibandingkan dengan wilayah Papua, gini ratio Papua Barat yang lebih rendah juga menunjukkan kondisi infrastruktur kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

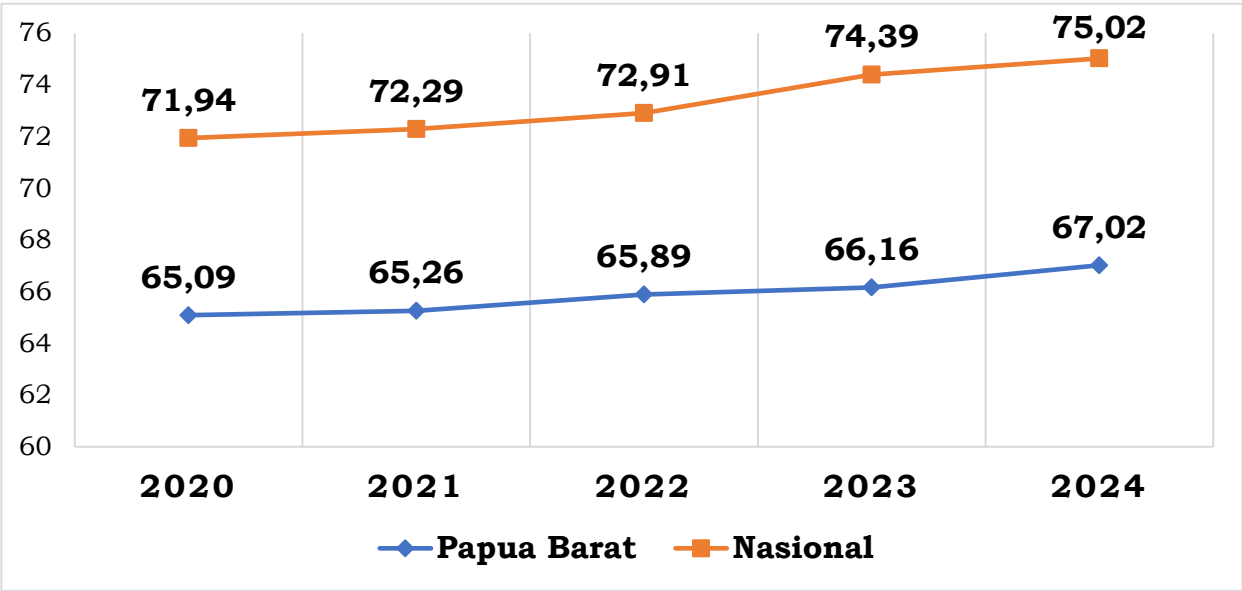
3.3.7 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Secara umum, indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Barat pada rentang periode 2020 - 2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 69,54 poin, meningkat pada tahun 2021 menjadi 66,11 persen yang kemudian terus bergerak naik menjadi 66,72 persen di tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 67,47 persen. Pada tahun 2024, IPM Papua Barat meningkat 0,85 poin menjadi 67,69. Perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari peningkatan komponen pendukung IPM, yaitu komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Seperti pada angka umur harapan hidup di Provinsi Papua Barat tahun 2024 yang sebesar 68,47 tahun naik 0,41 tahun dari tahun sebelumnya sebesar 68,28 tahun. Ini artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga umur 68 sampai 69 tahun. Selain itu, pada aspek pendidikan - komponen harapan lama sekolah Provinsi Papua Barat naik sebesar 0,03 tahun menjadi 13,17 pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,14. Lalu kenaikan komponen rata-rata lama sekolah dari 7,43 di tahun 2022 menjadi 7,86 pada tahun 2024 atau menyelesaikan pendidikan setara kelas 1 SMP. Komponen terakhir yaitu pengeluaran per kapita yang sebesar Rp8.058.000,00 (delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah) per kapita per tahun pada tahun 2022, naik menjadi

Rp8.805.000,00 (delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) per kapita per tahun pada tahun 2024. Dari capaian peningkatan komponen pendukung IPM tersebut, juga menunjukkan selama 5 tahun terakhir kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Barat telah mengalami peningkatan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat dan Nasional tahun 2020-2024 disajikan pada diagram dibawah ini :

Gambar III.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat dan Nasional tahun 2020-2024



Capaian IPM Provinsi Papua Barat pada 5 tahun terakhir juga menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan pada level nasional dan menempatkan Provinsi Papua Barat ke dalam kelompok capaian pembangunan manusia tingkat sedang. Terlihat pada tahun 2020 capaian IPM Papua Barat masih berada pada level 65.09, sedangkan capaian nasional sudah memiliki IPM sebesar 71.94. Selisih capaian IPM Papua Barat dengan nasional setiap tahunnya cukup besar. Tercatat pada tahun 2020 selisih IPM Papua Barat dengan nasional sebesar 6,85, sedangkan tahun 2024 sebesar 8 poin. IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 sebesar 67,02 juga menunjukkan telah tercapainya target provinsi dalam RKPD tahun 2025 yang sebesar 66,87.

Selain itu walaupun secara nasional, IPM Papua Barat pada tahun 2024 juga menjadi yang terendah ke-2 dari 34 provinsi lainnya, namun dari sisi tingkat perubahannya, peningkatan IPM Provinsi Papua Barat meningkat sebesar 0,85 poin dari tahun 2023. Hal ini menunjukan adanya progress peningkatan yang cukup besar pada pencapaian IPM di Provinsi Papua Barat pada satu tahun terakhir, terutama oleh naiknya rata-rata pengeluaranperkapita yang disesuaikan. Ketercapaian target IPM memperlihatkan kinerja pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sudah lebih baik di Provinsi Papua Barat.

3.4 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberi perhatian dan mengutamakan pembiayaan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan strategis secara tepat sasaran.

Keuangan daerah meliputi penerimaan dan pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang pada tahun anggaran 2025 diperkirakan akan mengalami defisit. Defisit yang disebabkan proyeksi pendapatan lebih kecil dibandingkan proyeksi belanja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan penting dalam proses pencapaian sasaran pembangunan. Apabila salah dalam melakukan penganggaran, maka kinerja pemerintah tidak tepat guna dan tepat saran. Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Selain daripada itu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pula APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

3.4.1 Pelaksanaan APBD Papua Barat

3.4.2 Pendapatan Daerah

Target pendapatan APBD tahun 2025 untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebesar 6,34 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,69 persen (yoy), serta penurunan target pada pos Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Di sisi lain, alokasi pendapatan masih terbantu oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun berjalan dan penyelesaian kurang bayar DBH dari tahun sebelumnya, serta besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang banyak dialokasikan untuk membiayai gaji ASN daerah dan operasional pemerintahan. Peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Semester I 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 42,54 persen atau senilai Rp1.476.470.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan APBD menunjukkan penurunan sebesar 21,38 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh belum tersalurkannya secara penuh pendapatan transfer tahap I tahun 2025 yang merupakan sumber utama penerimaan daerah. Selain itu, pergantian kepala daerah dan sejumlah pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah selama Triwulan I 2025 juga turut memengaruhi rendahnya pencapaian target pendapatan tersebut.

Tabel III.3 Pagu dan Realisasi APBD s.d. Semester I Prov. Papua Barat Tahun 2024/2025 (Milyar Rp).

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024			TAHUN ANGGARAN 2025			Growth (%)	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	4.951,91	4.492,23	90,72	3.470,27	1.476,27	42,54	-29.92	-67.14
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	532,32	405,01	76,09	334,90	150,03	44,79	-37.09	-62.96
Pajak Daerah	394,31	272,22	69,04	229,33	102,86	44,85	-41.84	-62.21
Retribusi Daerah	5,65	1,69	29,96	11,04	0,72	6,48	95.40	-57.40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31,45	37,15	118,13	37,15	42,00	113,05	18.12	13.06
Lain-lain PAD yang Sah	100,90	93,95	93,11	57,39	4,45	7,75	-43.12	-95.26
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	532,31	405,01	76,09	334,90	150,03	44,79	-37.09	-62.96
PENDAPATAN TRANSFER	3.574,03	3.242,12	79,68	3.000,45	1.326,16	44,19	-16.05	-59.10
Dana Perimbangan	3.574,03	3.242,12	79,68	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak	336,34	213,15	63,37	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.562,47	2.376,27	92,73	529,64	208,59	39,38	-79.33	-91.22
Dana Alokasi Umum (DAU)	577,40	574,75	99,54	477,49	262,58	54,99	-17.30	-54.31
Dana Alokasi Khusus (DAK)	97,82	77,94	79,68	11,95	1,71	14,31	-87.78	-97.81
JUMLAH PENDAPATAN	3.574,03	3.242,12	79,68	1.019,08	472,88	46,40	-71.49	-85.41

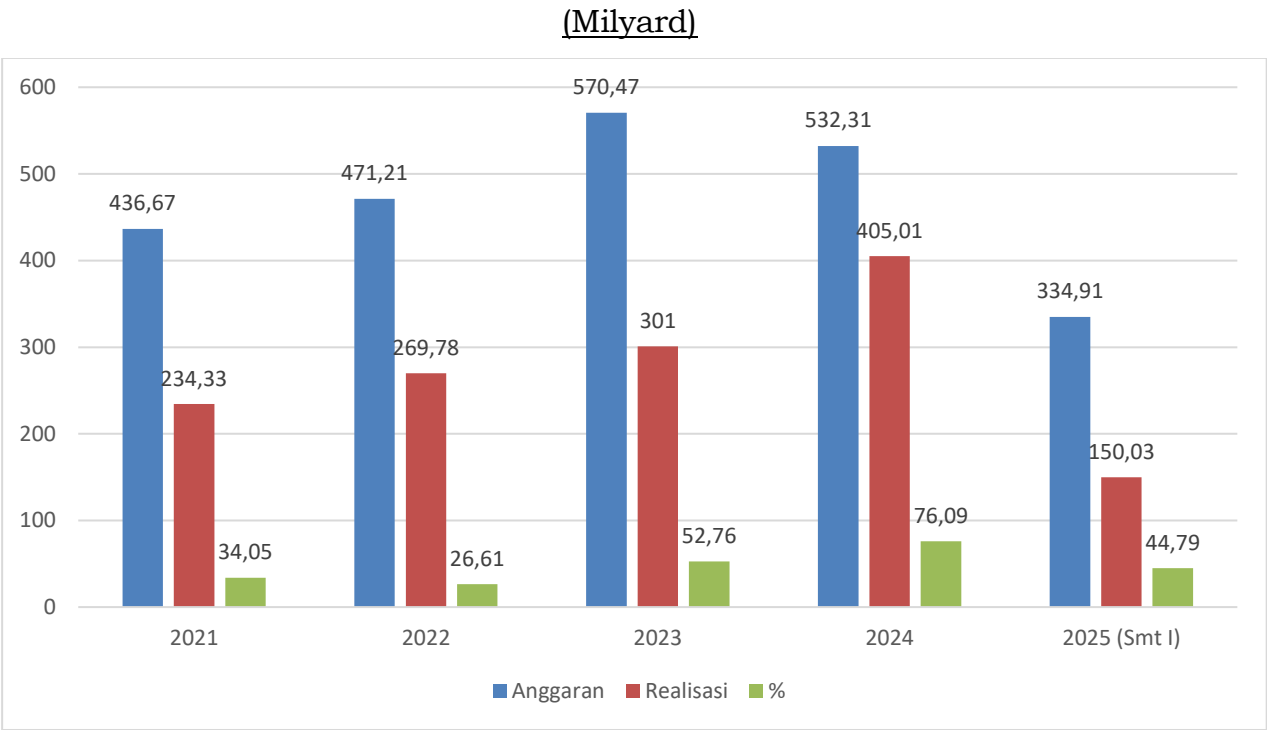
URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024			TAHUN ANGGARAN 2025			Growth (%)	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
TRANSFER DANA PERIMBANGAN								
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya								
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	843,89	843,89	100,00	1.981,37	853,25	43,06	134.79	1.11
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	843,89	843,89	100,00	1.981,37	853,25	43,06	134.79	1.11
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	4.417,92	4.086,01	92,49	3.000,45	1.326,16	44,19	-32.08	-67.54
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH								
Pendapatan Hibah	1,67	1,19	71,79	0,94	0,28	0,20	-43.71	-76.47
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	133,99	0,00	0,00	-	-
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,67	1,19	71,79	134.92	276,39	0,20	807.804,19	23.125,05
JUMLAH PENDAPATAN	4.951,91	4.492,23	90,72	3.470,27	1.476,47	42,54	-29.92	-67.13
BELANJA DAERAH	5.325,21	4.725,94	62,61	3.570,53	732,98	20,52	-32.95	-84.49
BELANJA OPERASI	2.634,96	2.276,28	86,39	2.057,06	629,63	30,60	-21.93	-72.34
Belanja Pegawai	762,55	505,46	66,29	794,08	300,29	37,81	4.13	-40.59
Belanja Barang dan Jasa	1.108,06	1.040,28	93,88	993,73	247,16	24,87	-10.32	-76.24
Belanja Hibah	758,98	726,23	95,69	263,77	79,94	30,30	-65.25	-88.99
Belanja Bantuan Sosial	5,38	4,19	77,96	5,49	2,23	40,63	2.04	-46.78
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.634,96	2.276,28	86,39	2.057,06	629,63	30,60	-21.93	-72.34
BELANJA MODAL	815,46	722,52	88,60	451,15	68,07	15,08	-44.68	-90.58
Belanja Modal Tanah	12,51	10,89	87,05	9,40	8,00	85,10	-24.86	-26.54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,15	60,37	100,37	47,61	13,64	28,65	-20.85	-77.41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,77	135,07	80,99	52,51	5,35	10,19	-68.51	-96.04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	575,91	516,06	89,61	339,64	41,08	12,09	-41.03	-92.04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	0,12	0,12	100,00	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL	815,46	722,52	88,60	451,15	68,07	15,08	-44.68	-90.58
BELANJA TIDAK TERDUGA	39,88	6,90	17,30	30,00	14,69	48,97	-24.77	112.90
Belanja Tidak Terduga	39,88	6,90	17,30	30,00	14,69	48,97	-24.77	112.90
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	39,88	6,90	17,30	30,00	14,69	48,97	-24.77	112.90
BELANJA TRANSFER	1.834,90	1.720,28	93,75	1.032,32	20,58	1,99	-43.74	-98.80
BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	290,32	192,29	66,23	126,81	12,35	9,73	-56.32	-93.58
Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	290,32	192,29	66,23	126,81	12,35	9,73	-56.32	-93.58
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	290,32	192,29	66,23	126,81	12,35	9,73	-56.32	-93.58

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024			TAHUN ANGGARAN 2025			Growth (%)	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN								
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	4,25	4,25	100,00	-	-
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	1.544,58	1.572,99	98,93	901,26	3,98	0,44	-41.65	-99.75
Jumlah Belanja Transfer Bantuan Keuangan	1.544,58	1.572,99	98,93	1.032,32	20,58	1,99	-33.17	-98.69
JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.834,90	1.720,28	93,75	1.032,32	20,58	1,99	-43.74	-98.80
JUMLAH BELANJA	5.325,21	4.725,94	62,61	3.570,53	732,98	20,52	-32.95	-84.49
SURPLUS/DEFISIT	-373,30	-233,71	62,61	-100,25	743,50	-741,61	-73.14	-418.13
PEMBIAYAAN DAERAH				100,00	0,00	0,00	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				100,00	0,00	0,00	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	378,30	365,20	96,54	100,00	0,00	0,00	-73.57	-100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	378,30	365,20	96,54	100,00	0,00	0,00	-73.57	-100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							-	-
Penyertaan Modal Daerah	5,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	373,30	365,20	97,83	100,00	0,00	0,00	-73,21	-100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	131,49	0,00	-0,25	743,50	292657,57	-	465.44

3.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Target dan realisasi PAD semester I dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

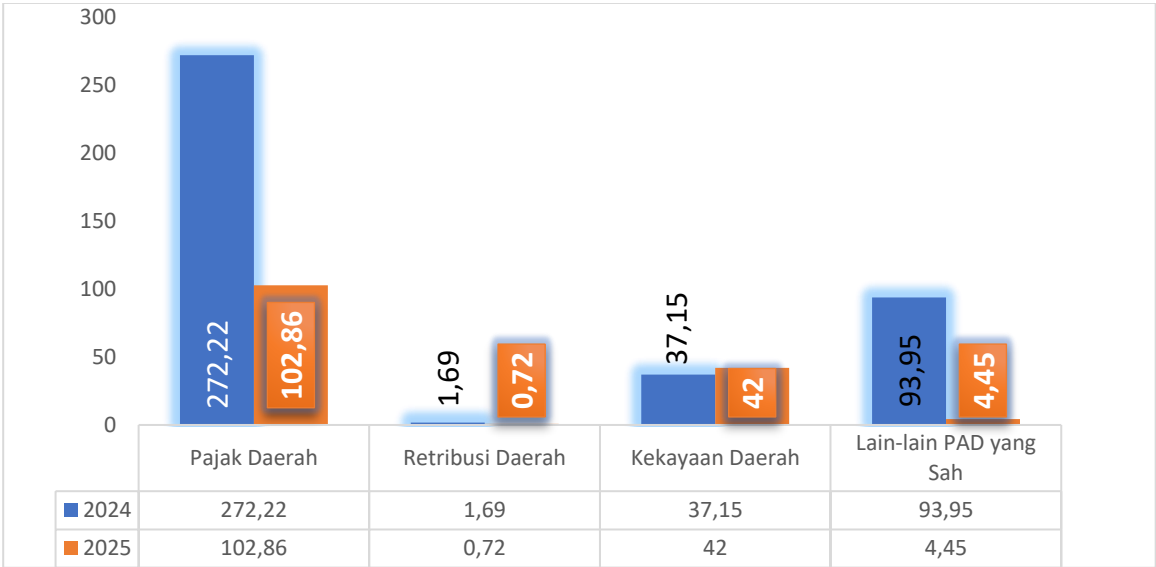
Gambar III.7 Target dan Realisasi PAD APBD Papua Barat Tahun 2021– 2025



Target PAD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat tahun 2025 ditetapkan meningkat sebesar 1,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target ini dipengaruhi oleh situasi perekonomian regional yang masih dibayangi ketidakpastian akibat dinamika ekonomi global, yang diperkirakan dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli. Dalam struktur APBD, PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, meskipun terjadi peningkatan target, besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa PAD belum sepenuhnya menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah di Papua Barat terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya, meskipun capaian PAD masih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Hingga akhir Maret 2025, realisasi PAD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat tercatat mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 36,06 persen (yoy). Tingkat capaian PAD hanya mencapai 1,68 persen dari target yang telah ditetapkan, lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya penerimaan dari komponen Pajak Daerah, khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber utama PAD.

Gambar III.8 Realisasi per jenis PAD 2024 dan Semester I APBD Tahun 2025

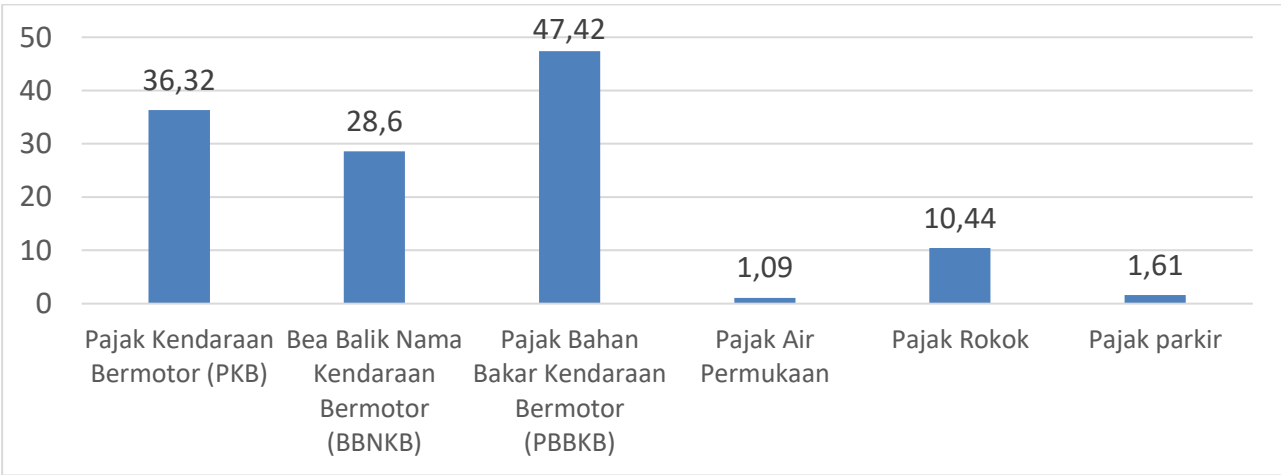
Regional Papua Barat (Milyard)



3.4.2.1.1 Pajak Daerah

Hingga Semester I 2025, penerimaan pajak daerah pemerintah Provinsi Papua Barat mampu terealisasi sebesar Rp102.860.000.000,00 (seratus dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Kontribusi terbesar penerimaan tersebut secara akumulatif berasal dari penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (Rp47.420.000.000,00) dan pajak kendaraan bermotor (Rp36.320.000.000,00). Realisasi pajak daerah per komponen dapat dilihat pada diagram berikut :

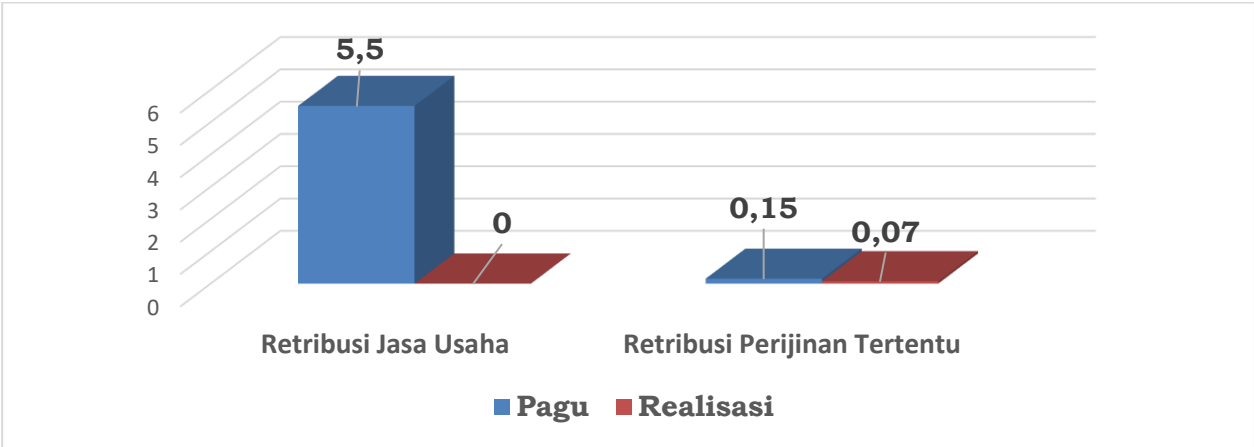
Gambar III.9 Realisasi per jenis Pajak Daerah APBD Papua Barat Tahun 2024 (Milyard)



3.4.2.1.2 Retribusi Daerah

Hingga berakhirnya Semester I 2025, pendapatan yang berasal dari retribusi daerah pada pemerintah Provinsi Papua Barat secara total mencapai Rp720.000.000,00 (6,48%). Realiasasi retribusi daerah per komponen dapat dilihat pada diagram berikut :

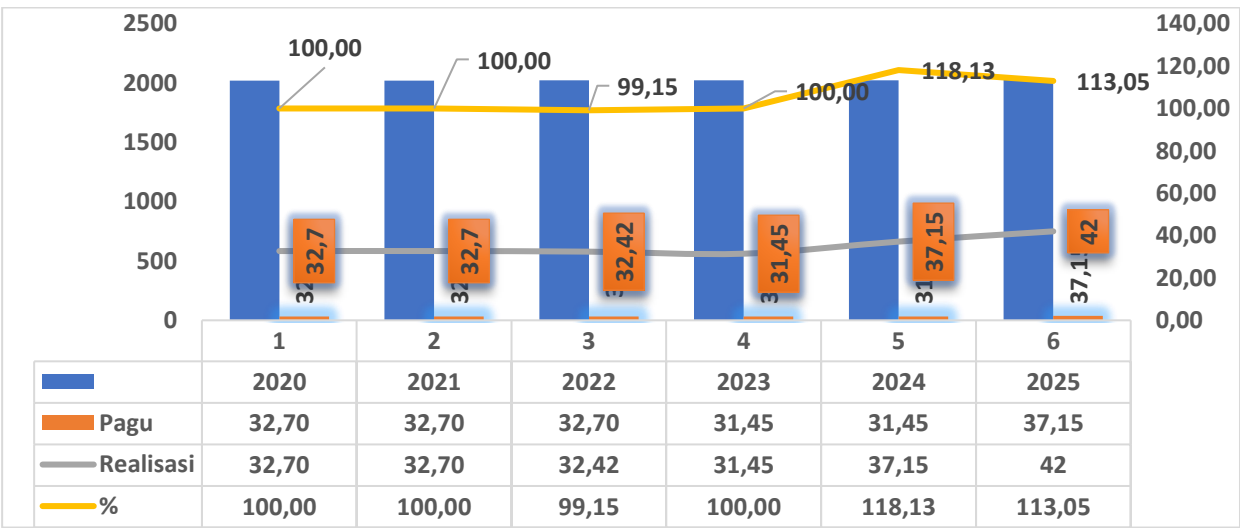
Gambar III.10 Realisasi per jenis Retribusi Daerah APBD Papua Barat Tahun 2024 (Milyard)



3.4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pemerintah Provinsi Papua Barat hingga akhir periode Semester I 2025 sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), melampaui pagu anggaran sebesar Rp37.150.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) (113.05%). Realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut :

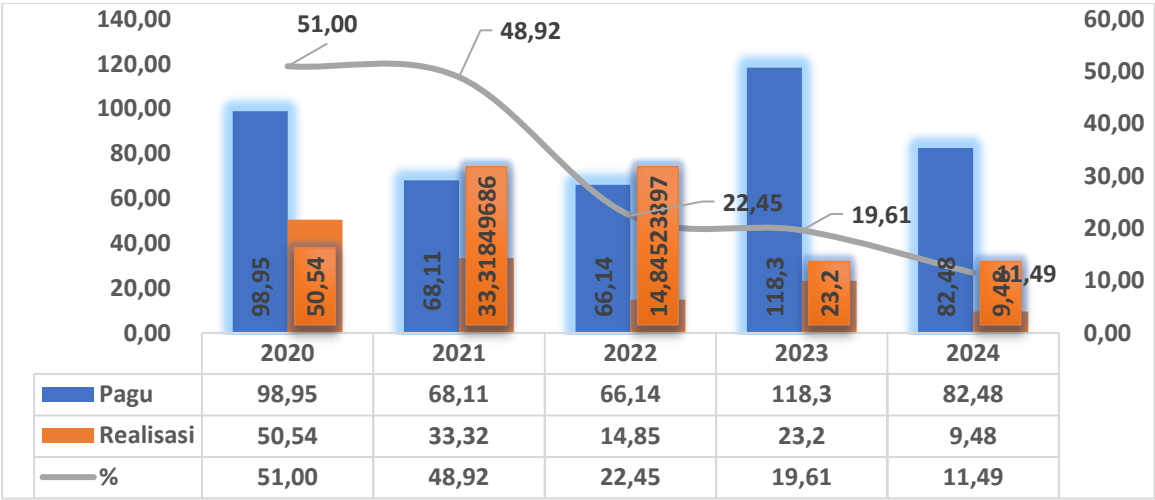
Gambar III.11 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Papua Barat Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard)



3.4.2.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan data realisasi APBD sampai dengan Semester I 2025, penerimaan lain-lain PAD yang sah pemerintah Provinsi Papua Barat tercatat sebesar Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau baru sebesar 7,75% dari total pagu yang direncanakan sebesar Rp57.390.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Realisasi Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.12 Realisasi lain-lain PAD yang sah Semester I APBD Papua Barat
Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard)



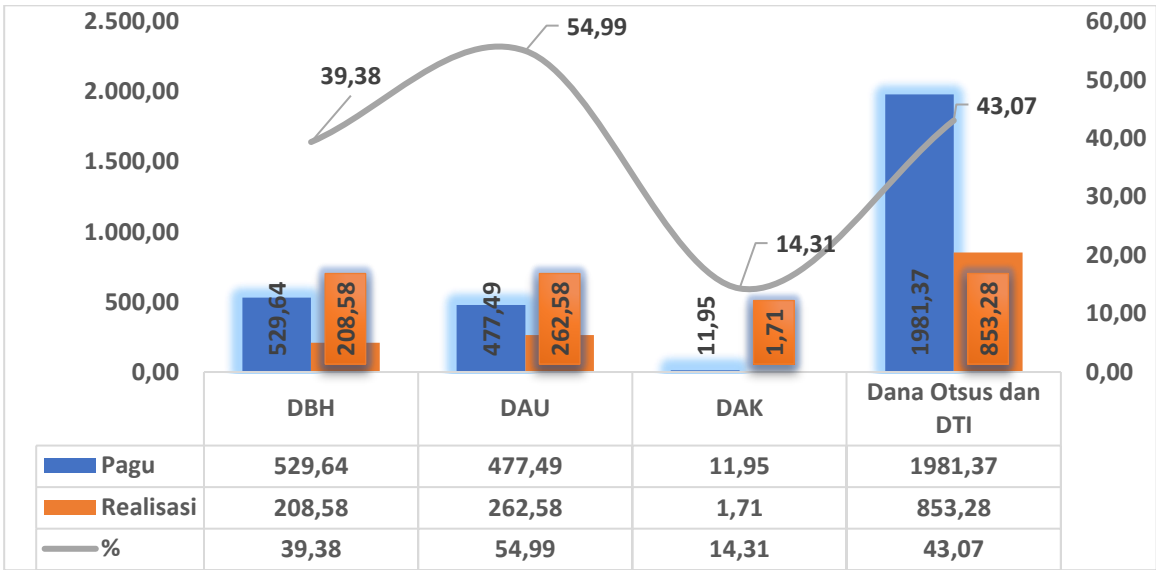
3.4.2.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dari keseluruhan target pendapatan transfer pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah di Papua Barat tahun 2025, porsi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan total mencapai Rp1.969.420.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan pusat masih sangat tinggi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh kenaikan harga komoditas dan tekanan inflasi. Oleh karena itu, diperlukan dorongan yang lebih kuat dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif dan mengoptimalkan potensi PAD. Sampai dengan akhir Semester I tahun 2025, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar 44,19 persen dari total pagu, atau mengalami penurunan sebesar 21,41 persen secara tahunan (yoy). Komponen dengan tingkat realisasi tertinggi berasal dari DAU, Dana Otsus dan DBH, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan tingkat serapan terendah di antara jenis dana perimbangan. Rendahnya serapan ini disebabkan oleh belum optimalnya respons pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk proses penyaluran dana tersebut secara tepat waktu. Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah (nonpemerintah pusat) menunjukkan peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini umumnya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah lain, dan sangat dipengaruhi oleh volume serta harga ekspor minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, penerimaan dari bantuan keuangan antar daerah cenderung lebih besar dibandingkan dana bagi hasil. Perbedaan antara realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) dan pendapatan transfer pemerintah pusat

juga dipengaruhi oleh penggunaan sistem aplikasi yang berbeda, yaitu SIPD milik Kemendagri dan SIKD milik DJPK, yang hingga saat ini belum saling terintegrasi sehingga menyebabkan keterlambatan penyajian data keuangan secara akurat.

Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.13 Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer APBD Semester I APBD Papua Barat Tahun 2025 (Milyard)

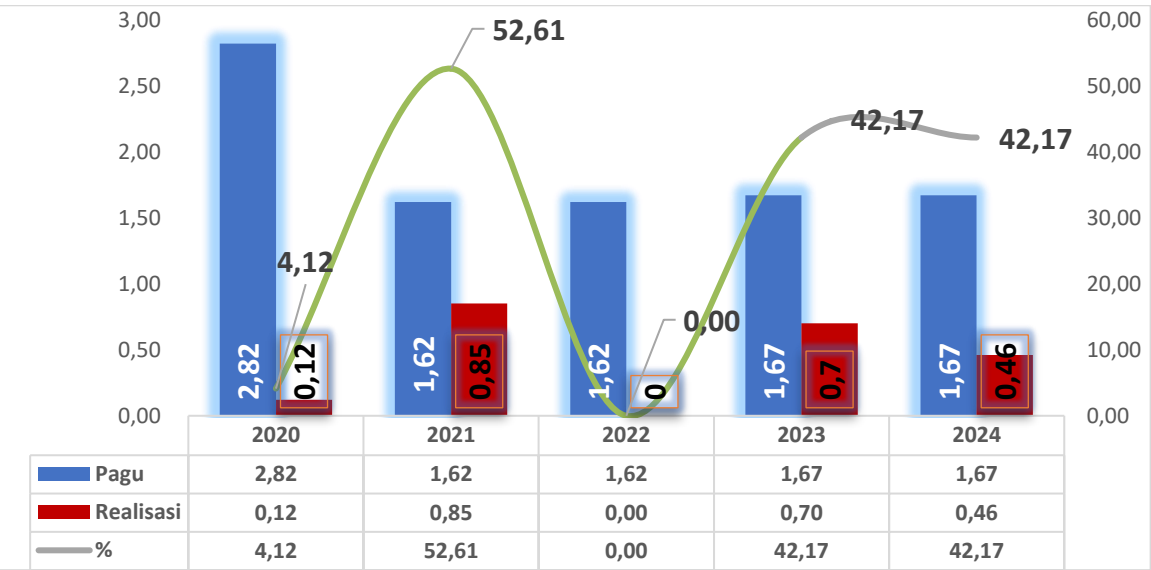


Hingga berakhirnya Semester I 2025 tingkat realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat mencapai 46.40 persen dari total pagu. Secara keseluruhan pendapatan transfer, tingkat realisasi tertinggi adalah Dana Transfer Umum DAU dan Dana Otsus Provinsi Papua Barat dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, serta Dana Bagi Hasil. Sementara, tingkat realisasi pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK), menjadi komponen dengan tingkat serapan yang sangat rendah. Sementara pada komponen Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil alokasi yang tumbuh negatif 9,30 persen (yoy) disebabkan oleh adanya PNBP gas bumi yang cukup besar di Kab. Teluk Bintuni sehingga Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi tambahan DBH migas dalam rangka Otsus sebesar 40 persen serta realisasi atas penyelesaian kurang bayar. Alokasi yang besar pada komponen DBH serta penyaluran tahap I dana otonomi khusus tanpa syarat seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk segera dilakukan belanja. Otsus jilid yang mengalami perubahan tatakelola membuat pemerintah membutuhkan adaptasi dalam proses salurnya. Diharapkan penyelesaian syarat salur dapat dipenuhi agar proses salur dapat dilakukan tepat waktu.

3.4.2.1.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan data realisasi APBD sampai dengan Semester I 2025, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pemerintah Provinsi Papua Barat tercatat masih sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau mengalami penurunan 34,76 persen (yoy). Diproyeksikan pada semesteran berikutnya komponen pendapatan tersebut yang berasal dari pendapatan hibah akan sesuai target yang ditetapkan. Realiasasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada diagram berikut :

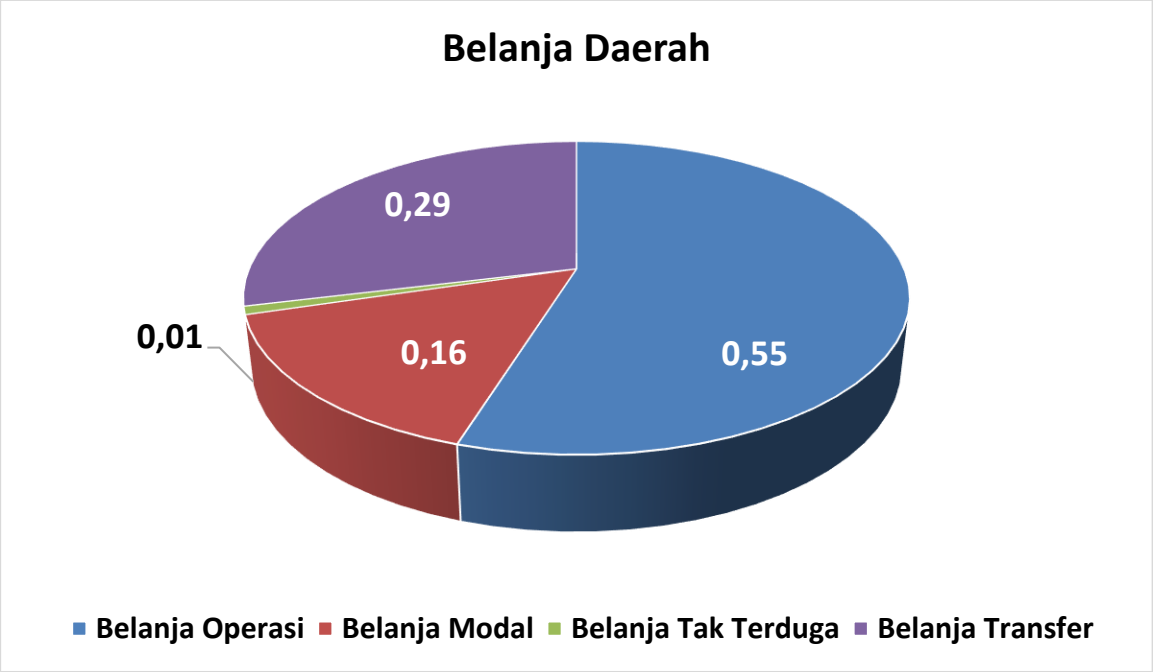
Gambar III.14 Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Papua Barat Tahun 2020 s.d 2024 (Milyard)



3.4.3 Belanja Daerah

Alokasi belanja APBD di Papua Barat tahun 2025 ditetapkan turun 29,53 persen (yoy) atau mencapai Rp3.570.280.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Adanya penurunan terjadi pada semua jenis belanja. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap alokasi belanja sebagaimana besaran serapan tahun sebelumnya yang tidak optimal (<50 persen). Alokasi belanja yang rendah juga akan meningkatkan SILPA sebagai salah satu upaya dalam menghadapi ketidakpastian. Berdasarkan jenisnya, belanja daerah dengan porsi terbesar adalah belanja operasi dengan kontribusi 48,01 persen sedangkan belanja transfer mencapai 34,61 persen atau lebih tinggi dari belanja modal dan belanja tak terduga. Proporsi menurut jenis Belanja Daerah dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.15 Proporsi menurut jenis Belanja Daerah APBD Semester I APBD Papua Barat Tahun 2025 (Milyard)

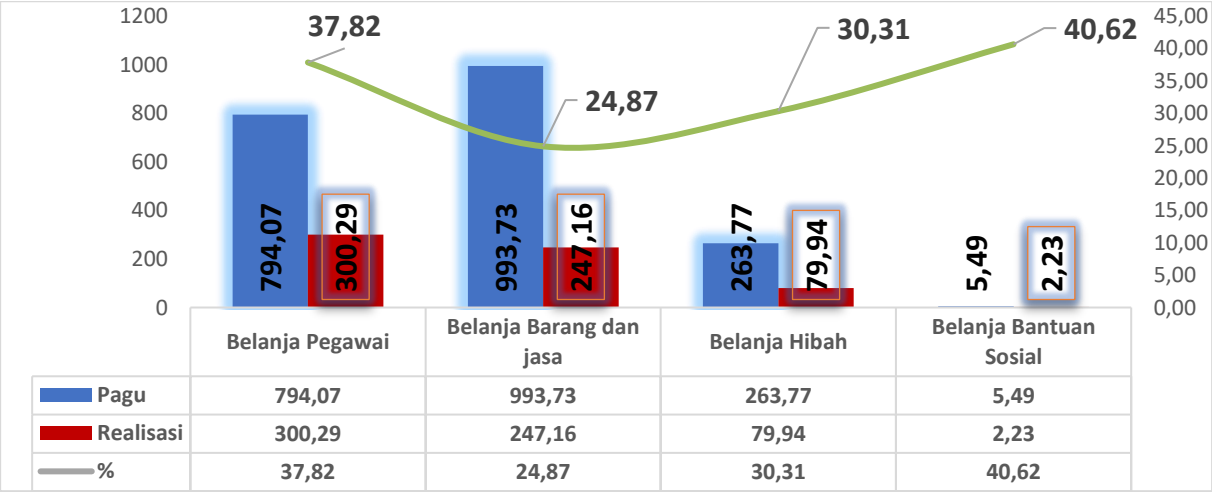


3.4.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan data realisasi APBD hingga akhir periode Semester I 2025 tingkat realisasi belanja Operasi APBD tercatat mencapai 30,60 persen (Rp629.630.000.000,00) dari alokasi (Rp2.057.060.000.000,00). Masih rendahnya realisasi belanja tersebut disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Pertumbuhan negatif terjadi pada besaran realisasi di sebagian besar belanja. Penyebab rendahnya realisasi diawali dengan terlambatnya penetapan APBD (paling cepat bulan Maret), dan keterlambatan penetapan juknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, hingga terlambatnya penetapan pejabat struktural, pejabat perbendaharaan, hingga pengelola keuangan. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Operasi APBD s.d semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.16 Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Operasi APBD Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard)

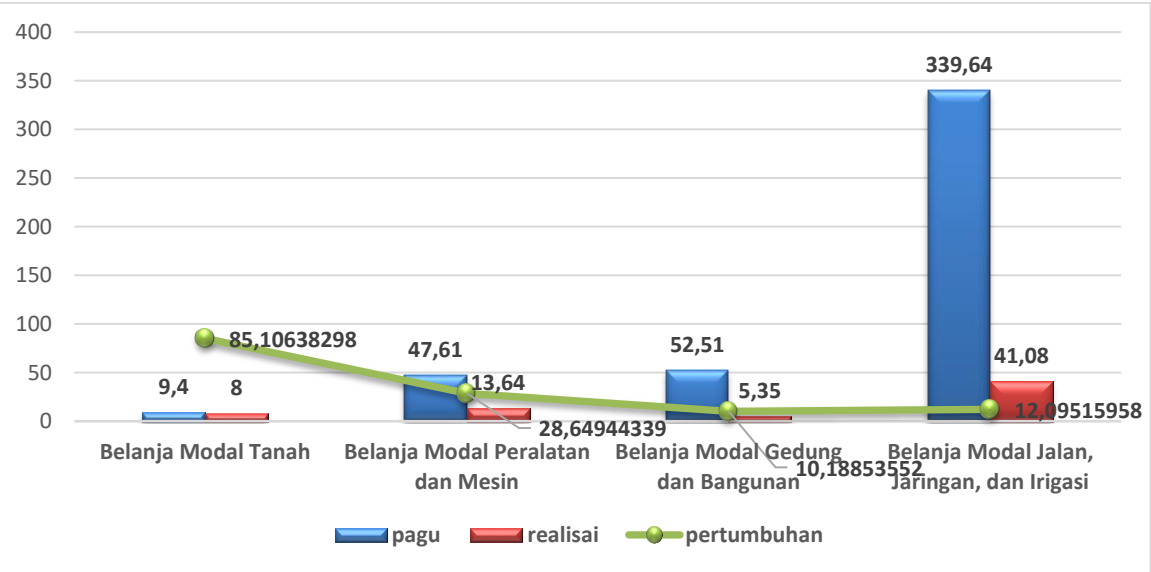


3.4.3.2 Belanja Modal

Perkembangan data realisasi Belanja Modal APBD sampai dengan semester I tahun 2025 tercatat mencapai 15.08 persen (Rp68.070.000.000,00) dari alokasi (Rp451.150.000.000,00) atau mengalami penurunan 53,67 persen (yoy), dan masih termasuk rendah pertumbuhan belanja tersebut dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan negatif terjadi pada semua besaran realisasi belanja modal. Penyebab rendahnya realisasi sangat dipengaruhi oleh terlambatnya pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, dan keterlambatan penetapan juknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, hingga terlambatnya penetapan pejabat struktural, pejabat perbendaharaan, hingga pengelola keuangan. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja modal APBD s.d semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut :

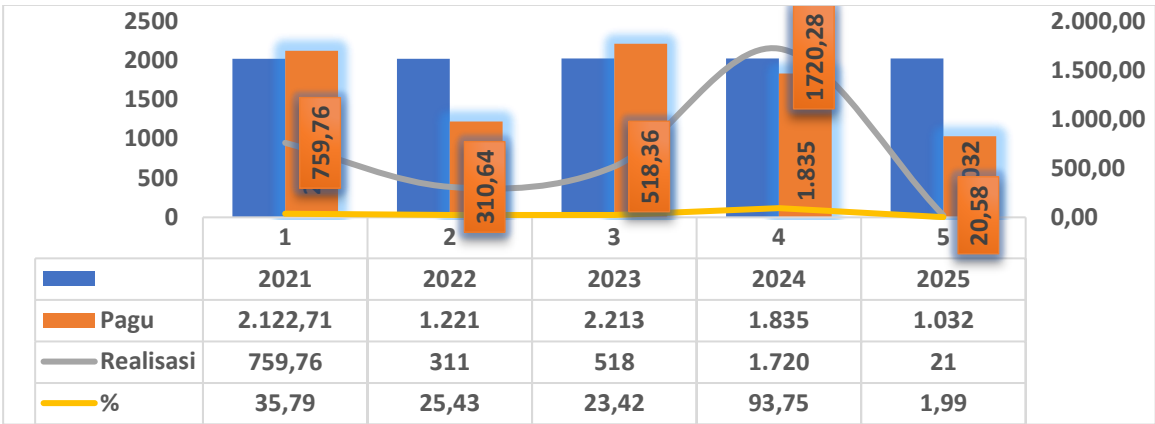
Gambar III.17 Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Modal APBD Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard)



3.4.3.3 Belanja Transfer

Berdasarkan data realisasi APBD sampai dengan Semester I 2025, Belanja Tranfer pemerintah Provinsi Papua Barat tercatat sebesar Rp20.580.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) atau mengalami Penurunan 65,31persen (yoy). Turunnya realisasi jenis Belanja Tranfer tersebut, disebabkan oleh Belanja Bantuan Keuangan, yang jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Tranfer per tahun dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar III.18 Pagu Realisasi dan Pertumbuhan belanja Transfer APBD Papua Barat s.d Semester I Tahun 2025 (Milyard)



3.4.4 Realisasi Anggaran yang Berasal dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur menurut SKPD

Sampai dengan berakhirnya semester I 2025, realisasi anggaran yang berasal dari dari dana Otsus secara rata-rata baru mencapai 22 persen. Rendahnya penyerapan anggaran ini terutama disebabkan oleh keterlambatan dalam perbaikan/pemenuhan kelengkapan usulan-usulan kegiatan yang menggunakan dana Otsus. Dari tiga sumber dana Otsus, realisasi tertinggi adalah pada alokasi dana yang bersifat umum (1% DAU) yaitu sebesar 43 persen. Sementara itu, realisasi dua sumber dana Otsus lainnya masih sangat rendah, alokasi dana yang telah ditentukan penggunaannya (1,25% DAU) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) masing-masing sebesar 17 persen dan 14 persen.

Dalam periode pelaksanaan perubahan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggenjot realisasi anggaran yang berasal dari Dana Otsus, mengingat belanja-belanja pada sektor ini banyak bersentuhan langsung dengan urusan wajib pelayanan dasar dan pemberdayaan orang asli Papua. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini tentunya juga tetap memperhatikan asas kepatuhan terhadap penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Tabel III.4 Daftar Alokasi Dan Realisasi Dana Otsus Dan DTI Sampai Dengan Semester I Di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun
Anggaran 2025 (RpJuta)

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGUNAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA 5 =3-4	% 6=4/3	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA 9=7-8	% 10=8/7	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA 13=11- 12	% 14=12/11
1	2	3	4	5 =3-4	6=4/3	7	8	9=7-8	10=8/7	11	12	13=11- 12	14=12/11
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,250	-	5,250	-	-	-	-	-	246,185	43,421	202,763	0.18
2	Dinas Sosial	1,230	283	947	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	766	500	267	0.65	12,827	672	12,155	5.24	-	-	-	-
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,378	80	1,298	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	4,069	413	3,656	0.10	712	-	712	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	9,918	256	9,662	0.03
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,974	-	1,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1,606	-	1,606	-	1,938	-	1,938	-	152	-	152	-
9	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-	-	-	10,151	2,501	7,650	24.64	-	-	-	-
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,495	454	1,040	0.30	3,800	-	3,800	-	-	-	-	-
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	124	-	124	-	315	106	209	33.65	-	-	-	-
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	604	-	604	-	9,066	-	9,066	-	-	-	-	-
13	Biro Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	89,777	39,812	49,965	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus (SETDA)	848	-	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Badan Kepegawaian Daerah	1,768	269	1,498	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,427	10,724	703	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
17	Sekretariat MRPProvinsi Papua Barat	26,354	11,839	14,515	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	584	86	499	0.15	5,983	210	5,774	3.51	-	-	-	-
19	Dinas Kehutanan	-	-	-	-	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-
20	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	49,655	10,343	39,312	20.83	-	-	-	-
21	BLUD RSUD	-	-	-	-	2,500	1,397	1,103	55.88	-	-	-	-
22	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	69,832	15,690	54,143	22.47	-	-	-	-
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	1,476	-	1,476	-	-	-	-	-
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	4,920	1,364	3,556	27.73	-	-	-	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	13,957	-	13,957	-	-	-	-	-
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	42,884	4,736	38,148	0.11
27	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	44,969	470	44,499	0.01
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	5,312	238	5,075	0.04
	J u m l a h	149,255	64,460	84,795	0.43	188,332	32,282	156,050	0.17	349,420	49,121	300,299	0.14

3.4.5 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 angka belanja operasi masih sementara dan harus dilakukan koordinasi lebih lanjut. Secara lebih jelasnya gambaran anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.5 Estimasi Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	334.905.726.654,00	334.905.726.654,00	0,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	229.327.435.774,00	229.327.435.774,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.664.337.400,00	11.039.337.400,00	375.000.000,00	3,52
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.451.453.512,00	31.451.453.512,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.760.976.836,00	57.385.976.836,00	-375.000.000,00	-0,65
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.134.436.117.000,00	3.000.445.647.598,90	-133.990.469.401,10	-4.27%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.134.436.117.000,00	3.000.445.647.598,90	-133.990.469.401,10	-4.27%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936.209.000,00	134.923.678.406,00	133.987.469.406,00	14311.70%
4.3.01	Pendapatan Hibah	936.209.000,00	936.209.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.470.278.052.654,00	3.470.275.052.658,90	-2.999.995,10	3,78
5	BELANJA DAERAH			0,00	0,00
5,1	BELANJA OPERASI	1.958.119.131.251,31	2.056.803.921.194,41	98.684.789.943,10	5.04%
5.1.01	Belanja Pegawai	868.489.779.617,17	794.077.163.898,18	-74.412.615.718,99	-8.57%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.062.159.917,00	993.471.663.889,56	150.409.503.972,56	17.84%
5.1.05	Belanja Hibah	242.694.691.717,14	263.767.593.406,67	21.072.901.689,53	8.68%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.872.500.000,00	5.487.500.000,00	1.615.000.000,00	41.70%
5,2	BELANJA MODAL	553.970.355.043,69	451.152.565.105,49	-102.817.789.938,20	-18.56%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	9.400.000.000,00	8.400.000.000,00	840.00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.188.452.899,21	47.607.256.998,97	9.418.804.099,76	24.66%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.361.468.432,48	52.507.606.145,02	146.137.712,54	0.28%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	460.420.433.712,00	339.637.701.961,50	-120.782.731.750,50	-26.23%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0.00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0.00%
5,4	BELANJA TRANSFER	1.028.188.566.359,00	1.032.318.566.359,00	4.130.000.000,00	0.40%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	126.808.361.055,00	126.808.361.055,00	0,00	0.00%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	901.380.205.304,00	905.510.205.304,00	4.130.000.000,00	0.46%
	Jumlah Belanja	3.570.278.052.654,00	3.570.275.052.658,90	-2.999.995,10	0.00%
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000.000,00	-100.000.000.000,00	0,00	0.00%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00	0,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah untuk saat ini lebih didominasi oleh penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, sehingga ke depan secara bertahap diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kaitan ini, pengelolaan APBD Provinsi pun harus terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Selain dari itu pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat atau daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Papua Barat, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah

diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Apabila dilihat dari tabel 3.5, perubahan pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 88,63 persen dari total perubahan pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat hanya berkisar diangka 11,33 persen dan sisanya berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai sebesar 0,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwat tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat terhadap pemerintah pusat relatif tinggi.

3.4.6.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat bersumber dari ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Pada APBD Murni Tahun 2025, Pendapatan Provinsi Papua Barat dianggarkan sebesar Rp3.570.278.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sedangkan pada perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.570.275.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pendapatan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp334.900.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah) pada APBD Murni Tahun 2024 diproyeksikan tetap nilainya pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp334.900.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.134.460.000.000,00 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada APBD

Murni Tahun 2025 menjadi Rp3.000.450.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Perubahan RKPD Tahun 2025.;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) pada APBD Murni Tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp134.920.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Untuk mendukung program pemerintah pusat dan prioritas daerah Provinsi Papua Barat, ketersediaan fiskal yang cukup menjadi prasyarat utama. Dengan ruang fiskal yang cukup lebar, pemerintah daerah lebih leluasa dalam menggunakan alokasi anggarannya untuk kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan regional dan kesejahteraan masyarakatnya tanpa diganggu kewajiban yang bersifat wajib seperti untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang mengikat. Kemandirian pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan tergantung dari besarnya ruang fiskal yang tersedia untuk kegiatan pembangunan tersebut.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2025, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Papua Barat diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2025 mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester II tahun 2025;
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.4.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3.4.6.1.2 Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena Pendapatan Transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025. Pendapatan transfer terdiri :

- a. Transfer pemerintah pusat, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah terdiri dari :

(1). Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1. Dana Transfer Umum :
 - a. Dana Bagi Hasil; dan
 - b. Dana Alokasi Umum, dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten
2. Dana Transfer Khusus : DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang terdiri dari :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Nonfisik.

(2). Dana Otonomi Khusus

- b. Transfer Antar Daerah, antara lain :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
- 2) Bantuan Keuangan

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 sebesar Rp3.134.436.117.000,00 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.000.445.647.598,90 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh sen) atau menurun sebesar Rp133.990.469.401,10 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah sepuluh sen)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Provinsi Papua Barat hanya bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp936.209.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dan mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp134.923.678.406,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp133.987.469.406,00 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah).

3.4.6.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, penanggulangan kemiskinan serta penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan focus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing Kabupaten.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp3.570.278.052.654, (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah),

sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp3.570.529.102.735,59 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen). Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 mengalami DEFISIT belanja sebesar (Rp100.254.050.076,69) yang disebabkan karena proyeksi pendapatan Rp3.470.275.052.658,90 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh sen) lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja 3.570.529.102.735,59 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 terkait Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan hal tersebut, dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Belanja Pegawai lainnya berupa penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor

70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Hal lainnya adalah Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta belanja pegawai terkait Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Nonfisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

1. Jumlah belanja pegawai daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp868.489.779.617,17 (delapan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah tujuh belas sen) sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp794.077.163.898,18 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan belas sen) atau turun sebesar Rp74.412.615.719,99 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua belas

juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen).

2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada PD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Jumlah belanja barang dan jasa berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp843.062.159.917,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp993.725.713.966,25 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen) atau naik sebesar Rp150.663.554.049,25 (seratus lima puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen).

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan, Belanja Daerah, Serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Jumlah belanja Hibah dan Bantuan Sosial daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) masing-masing sebesar Rp242.694.691.717,14 (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus

sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat belas sen) dan Rp3.872.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tibu rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan masing-masing sebesar Rp263.767.593.406,67 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah enam puluh tujuh sen) dan Rp5.487.500.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Kebijakan belanja modal diarahkan antara lain :

- 1) Untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
- 2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - d) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan

Kebijakan penganggaran belanja modal memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah belanja modal daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp553.970.355.043,69 (lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp451.152.565.105,49 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima rupiah empat puluh sembilan sen) atau turun sebesar Rp102.817.789.938,20 (seratus dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen). Belanja modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- o Belanja modal tanah:

Jumlah belanja modal tanah daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) atau bertambah sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).

- o Belanja modal peralatan dan mesin:

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp38.188.452.899,21 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen) sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp47.607.256.998,97 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau naik sebesar Rp9.418.804.100,00 (sembilan miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah).

- o Belanja modal gedung dan bangunan:

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp52.361.468.432,48 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh delapan sen), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp52.507.606.145,02 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh lima rupiah dua sen) atau naik sebesar Rp146.137.712,54 (seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).

- o Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp460.420.433.712,00 (empat ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp339.637.701.961,50 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sen) atau turun sebesar Rp120.782.731.750,50 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah lima puluh sen).

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Jumlah belanja tidak terduga pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan tidak berubah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada Perangkat Daerah selaku SKPKD. Belanja transfer Pemerintah Provinsi Papua Barat dirinci atas jenis :
(a) Belanja Bagi Hasil, Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi tidak dapat dianggarkan dalam APBD, sebab dana bagi hasil bersumber dari penerimaan pusat, dari objek tertentu yang ditentukan undang-undang, sehingga retribusi daerah bukan termasuk dalam objek dana bagi hasil.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Jumlah belanja Bagi Hasil daerah berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp126.808.361.055,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh lima rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan tetap sebesar 126.808.361.055,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh lima rupiah).

(b) Belanja Bantuan Keuangan, Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten yang bersumber dari dana otonomi khusus. Pengalokasian dana otonomi khusus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten yang tidak tersedia alokasi dananya, dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan variabel antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk asli Papua, luas wilayah, jumlah distrik, jumlah desa dan kelurahan, indeks kesulitan geografis, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, indeks desa membangun dan indeks kapasitas fiskal daerah.

Bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus direalisasikan pembayarannya kepada yang berhak yaitu pemerintah kabupaten/kota didasarkan dengan Peraturan Gubernur yang diterbitkan setiap tahun.

Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan pada jenis belanja hibah, obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan APBD Tahun 2025 (Murni) sebesar Rp1.313.394.434,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap direncanakan tetap sebesar Rp1.313.394.434,00 (satu miliar tiga ratus tiga

belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting. Tematik pembangunan tahun 2025.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja operasi

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggung-jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.4.6.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi selisih antara pendapatan daerah. Sesuai permendagri Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman obligasi. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.4.6.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2025

sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan tetap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

4.1 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2025 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Papua Barat Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat periode 2025

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RRMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RRMD
				2025	2030
1.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124,78	121,97	108,13
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,75	82,89	84,39
3.	Tingkat Kemiskinan	%	21,66	19,62	15,77
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,69	68,82	71,62
5.	Indeks Modal Manusia	Indeks	NA	0,47	0,51
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,13	3,96	3,81
7.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	0	46,84	52,53
8.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	0	81,5	84
9.	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks	0	0	0
10.	Rasio Gini	Rasio	0,389	0,38	35
11.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	20,8	5,19	600
12.	HLRBALHB per kapita	Rp	131,64	141,56	29308
13.	HLRBALHB non tambang per kapita	Rp	98,22	99	10896
14.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,5541	0,5552	624
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0	62,54	6849
16.	Persentase Penduduk Miskin Orang Asli Papua (OPM)	%	0	0	0
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,18	13,33
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,95	8,4
19.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,2	58,34	62,85
20.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	82,26	82,76	58,83
21.	Rasio Elektrifikasi	%	83,00	83,83	88,11
22.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,25	72,42	73,44

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RRMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RRMD
				2025	2030
23.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,4	84,96	85,96
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLL)	Indeks	100	100	100
25.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)	%	40,41	41,63	56,63
26.	Tingkat Maturnas SHP	Level	3	3	3
27.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	0	0	70,15
28.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0	0,540	0,48
29.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89,92	90	90
30.	Rata-rata laju deforestasi pertahun	%	0	30	21
31.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3,03	3,80	4,2
32.	Indeks Demokrasi	Indeks	0	66,74	70,62
33.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	0	62	75
34.	Cakupan Wilayah yang dapat diakses panning dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	35	37,1	49,65
35.	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan	%	80,00	80,00	83
36.	Cakupan Potensi dan Pemberian Ijin dalam pemanfaatan Energi	%	0	50	75
37.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86,28	86,94	87,4
38.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	%	0	1,08	23,1
39.	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang temutakhirkan	%	0	0	100
40.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
41.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RRMD	Target Kinerja 2025	Kondisi Akhir RRMD 2030
42.	Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
43.	Cakupan pemetaan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	0
44.	Persentase Ketersediaan Pangan	%	0	33,67	39
45.	NIP Sektor Pertanian	Indeks	99,88	99,18	114,95
46.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,61	102,87	109,18
47.	Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial	Rp	0	4 Milyar	9 Milyar
48.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap FLRB	%	4,71	5,50	5,62
49.	Kontribusi sektor Industri terhadap FLRB	%	38,93	39,00	39,22
50.	Proporsi Koperasi dan UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	0	1,00	3
51.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap FLRB	%	25,38	25,39	25,46
52.	Kontribusi sektor MIGAS terhadap FLRB	%	24,77	24,78	24,84
53.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap FLRB	%	1,46	1,47	1,5
54.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145,76	145,76	140,01
55.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100
56.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	%	100	100	100
57.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0	0,5	1
58.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	%	14,29	28,57	85,71
59.	Prevalensi Stunting (%)	%	24,6	24,6	12,6
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		65,86	66	82
61.	Indeks Daya Saing Daerah (ILSD)	Indeks	2,87	3,02	3,77

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RRMD	Target Kinerja 2025	Kondisi Akhir RRMD 2030
62.	Presentasi kebijakan berbasis bukti	Indeks	0	100	100
63.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73,41	78	100
64.	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	0	74,94	78,76
65.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,01	65,94	75,59
66.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,26	82,76	85,26
67.	Skor Kemampuan Literasi SLB	Skor	0	78,18	86,18
68.	Skor Kemampuan Literasi SMHB	Skor	65,33	65,83	68,33
69.	Skor Kemampuan Literasi SMA LB	Skor	71,17	71,67	74,17
70.	Skor Kemampuan Numerasi SLB	Skor	0	47,98	50,98
71.	Skor Kemampuan Numerasi SMHB	Skor	49,08	50,68	51,93
72.	Skor Kemampuan Numerasi SMA LB	Skor	47,16	47,66	50,16
73.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	0,56	0,7
74.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumimas	%	65,55	65,55	69,72
75.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton	0	93,389	100476
76.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	%	45,74	48,027	50,48
77.	Cakupan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	47,32	22,32
78.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	21,91	21,30	18,49
79.	Indeks SHBE (terkait keamanan)	%	60,24	65,2	85,2
80.	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,48	0,50	0,69
81.	Indeks Pembangunan Statistik	point	1,3	1,8	4,3
82.	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	%	538,7	10	12

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RRMD	Target Kinerja 2025	Kondisi Akhir RRMD 2030
83.	Meningkatkan nilai FMA&FMDN Realisasi investasi FMA-FMDN	Rp	13,036Milyar	1,001Milyar	1,190Milyar
84.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	71,01	100
85.	Kontribusi Stok Carbon	Rp	0	0	10Milyar
86.	Luas hutan sosial kemasyarakatan (HKM) yang dikelola oleh masyarakat	%	0	40,00	80
87.	Luas hutan desa (HD) yang dikelola oleh kampung	%	0	40,00	60
88.	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	100	100	100
89.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (IPAK)	%	70,63	71,78	77,53
90.	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	%	27	28	2800
91.	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WLP	WIP	WIP
92.	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah	%	5	5,00b	5,03
93.	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)	%	5	5,00b	5,03
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	NA	BAIK	BAIK
95.	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	%	2,24	2,25	240
96.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48,52	48,57	4881
97.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C	C	A
98.	Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B	B	A

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2025 merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat 2025 yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2025 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka: “PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT, KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD, DIDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA”

Berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Papua Barat tahun rencana, maka prioritas Pembangunan Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Revitalisasi Kawasan Andalan Pangan Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru;
3. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Yang Mendukung Transformasi Ekonomi;
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Mendukung Peningkatan Jangkauan Pelayanan Publik.

Dengan pendekatan THIS (tematik, holistic, integrative dan spasial), maka kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam Agenda Pembangunan Wilayah dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan Kabupaten yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Selanjutnya berikut akan dijabarkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasioal beserta Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2025. Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional 2025	Prioritas Daerah 2025			
	Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				√
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		√	√	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	√		√	
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	√			
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		√		

Prioritas Nasional 2025	Prioritas Daerah 2025			
	Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	√	√	√	
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				√
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				√

Tujuan RPJMD 2025	Prioritas Daerah 2025			
	Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial	√			
Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik dan global		√		
Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah		√		
Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah yang inklusif			√	
Meningkatkan kerukunan umat beragama, keamanan dan stabilitas wilayah				√
Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik				√
Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP	√			√

4.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025 dan berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel N3 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Flagship RIPPp Dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial											
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	T1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat & Berketahanan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.69		68.82		71.06		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	N.A		0.47		0.5		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	68.47		69.45		70.81		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat	Indeks	N.A		0.5		0.9		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.77		1.8	18.806.916.337	2.2	35.710.480.909	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persentase	100		100	6.454.419.808	100	12.378.116.041	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase	100		100	3.709.513.684	100	4.594.059.835	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase	100		100	2.392.557.375	100	4.292.010.270	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu	176		158.23	816.166.000	111.53	1.194.948.641	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKBy) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	9		8.5	640.838.000	6.5	1.194.948.641	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase	100		100	75,328,000	100	289.380.045	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persentase	96.3		98.6		99		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	107.26		100	8,757,540,000	100	22.452.284.955	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persentase	36.25		56.53	3.994.495.578	80.08	7.179.340.976	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di kampung	Layanan	4		4	500.000.000	7	732.050.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase	69.1		70.48	381.911.808	85	559.157.078	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	0		1	2.113.945.224	3	2.539.062.531	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/Kota mencapai target STBM	Persentase	0		14.29		71.43		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase	88		90	351.967.115	90	1.779.793.308	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase	72		85		85		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Positive Rate HIV	Persentase	2.3		2.21		1.96		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Prevalensi HIV	Persentase	2.3		2.21	284.378.000	1.96	1.555.295.640	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	89		90	N.A	95	1.176.407.336	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun	Persentase	7.6		7.6		7.6		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Obesitas > 18 Tahun		22.1		22.1		22.1		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase faskes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	Persentase	N.A.		65	4,013,176,173	85	5.875.691.235	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok	Kab/Kota	N.A.		1	N.A	6	610.732.336	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persentase	10.33		14.46	N.A	55.56	229.475.571	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persentase	N.A.		20		80		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase	N.A.		20	N.A	80	2.577.802.785	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	Persentase	N.A.		10	N.A	80	1.484.328.685	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persentase	24		25		45		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Kabupaten Kota dengan Eliminasi Kusta	Kabupaten	0		1		5		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persentase	N.A		10		50		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persentase	100		100	213.829.189	100	443.396.206	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase	N.A.		100		100	725.760.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	N.A.		25.06	2.554.075.356	80	4.338.371.729	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	28.57		28.57		57.14		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	16		20	5.000.000.000	36	7.320.500.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-OAP	Persentase	N.A		14	6.350.400.000	25.056	11.365.401.600	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kab/Kota	3		3	800.000.000	6	1.836.780.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	97.83		100		100	658.845.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna	Persentase	91.35		96.29		97.53		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe RSUD Provinsi	Tipe	C		C	9.439.443.540	B	15.796.396.953	Kesehatan	BLUD RSUD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Nakes dan Non Nakes Bersertifikat keahlian pada RSUD Provinsi	Persentase	N.A.		50	298.248.000	85	6.928.795.360	Kesehatan	BLUD RSUD

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	Persentase	14.29		28.57		71.43			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	13.09		10.09	252.458.500	2.73	1.654.512.026	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting)%)	Persentase	24.6		22.6		14.6			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persentase	100		100	3.000.000.000	100	6.220.800.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase	100		100	0	100	325.000.000		DPPPA Dalduk KB
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase Keluarga Miskin Beresiko Stunting yang mendapatkan bantuan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kampung	Persentase	76.72		76.87	2.000.000.000	77.47	2.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarak dan Kampung

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu aktif	Persentase	96.45		96.6	5.000.000.000	97.2	5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarak dan Kampung
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase	N.A.		34.06	40.761.000.000	37.5	49.545.000.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	N.A.		30	1.050.000.000	39	2.545.600.000		PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persentase	N.A.		0.42	25.789.000.000	0.8	31.347.000.000		PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persentase	N.A.		95.5		96.1	5.788.100.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	Lokasi	N.A.		7	162.100.000.000	7	162.100.000.000		PUPR

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Persentase	52.32	1.600.000.000	47.32	1.000.000.000	27.32	1.092.727.000	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persentase	87.77	5.199.352.585	98.76	Rp3.650.000.000	100	Rp3.988.453.550	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PPH Konsumsi Pangan	Persentase							Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	Tahun	7.86		7.95		8.31			
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	Tahun	13.17		13.18		13.22		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SDLB	Skor	0		78.18		84.58		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SMPLB	Skor	65.33		65.83		67.83		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SMALB	Skor	71.17		71.67		73.67		pendidikan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	Rasio	90		90	276.593.307.538	100	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:Literasi dan Numerasi	Persentase	94		100	276.593.307.538	100	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	Persentase	27.52		30.05	276.593.307.538	40.17	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	33.41		35.01	1.500.000.000	41.39	2.196.150.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase Kabupaten yang Menyediaan Pendidikan Akademi Komunitas	Persentase	N.A.		14.29	500.000.000	71.43	3.456.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	Skor	0		47.98		50.38			
			Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	Skor	49.08		50.68		52.68		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi SMALB	Skor	47.16		47.66		49.66		pendidikan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio	19.77		38.83	5.840.000.000	38.83	5.840.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio	19.77		38.83	5.840.000.000	38.83	5.840.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru SLB yang tersertifikasi	Persentase	0		20	750.000.000	40	911.629.687	pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase	8.73		10	215.000.000	65	235.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan pendidikan khusus yang tersusun	Silabus	80		90	600.000.000	100	600.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	65.86		66		80			
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Persentase	0		100	1.500.000.000	100	2.500.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Cakupan Perpustakaan yang diakreditasi sesuai SNP	Persentase	0		100	500.000.000	100	900.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Persentase	59.29		67	-	80	-	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Persentase	0		100	1.100.000.000	100	1.900.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat)	Persentase	0		100	1.500.000.000	100	2.500.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	57.2		58.34		61.92			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persentase	NA		67	1.500.000.000	80	2.500.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persentase	100		100	2.250.000.000	100	9.000.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persentase	100		100	500.000.000	100	950.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	100		100	700.000.000	100	1.450.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Presentasi	N.A		0.56		0.7			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	74.46		75.00	5.000.000.000	100	5.384.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	-		100		100	1.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	92.22		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	99.91		100	300.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	88.32		100	300.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	98.77		100	300.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	99.64		100	3.144.000.000	100	3.650.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase	N.A		100	1.500.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan Pendataan data Fakir Miskin	Persentase	N.A		100	300.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam,sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	99.69		100	1.500.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase	N.A		100	1.500.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase	N.A		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase	N.A		100	200.000.000	100	600.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Persentase	N.A		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persentase	100		100	400.000.000	100	600.000.000	Sosial	Dinas Sosial
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	NA		74.94		77.98			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date di kabupaten di Provinsi Papua Barat	Persentase	100		100	326.000.000	100	400.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82.26		82.76		84.76			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 perempuan)	Persentase	10		10	1.308.800.000	10	1.600.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55.89		56.38		58.34			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	Persentase	100		100	1.464.538.859	100	1.600.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.558		0.557		0.553			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase	100		100	936.500.000	100	1.300.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.01		65.94		73.66			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesenjaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase	80		80		80	385.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase	80		80		80	585.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persentase	100		100	1.200.000.000	100	1.650.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persentase	100		100		100	455.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	Persentase	10		10	1.205.000.000	10	1.500.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	Persentase	100		100		100	680.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	70		70		70	370.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persentase	100		100		100	350.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 2	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif											
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat kemiskinan (%)	Persen	21.66		19.62		16.54			
	S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB)%)	Persen	2.24		2.25		2.37			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	76.5	17.291.069.045	80.50	10.522.000.000	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen	75	5.430.141.000	78	1.328.000.000	90	2.452.870.522		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha di bidang pertanian yang memiliki ijin	Persen	85	1.267.315.400	86	219.606.600	90	279.384.068		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	1.100.000.000	78.00	1.050.000.000	88.00	565.000.068		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Pertanian	Persen	75	1.125.000.000	77.50	1.200.000.000	85.00	655.636.200		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persen	100	Rp1.275.000.000	100	1.150.000.000	100	1.294.335.132	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen	100	Rp2.335.000.000	100	2.500.000.000	100	2.813.772.025		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen	100	Rp643.654.004	100	450.000.000	100	506.478.965		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Peternakan	Persen	100	Rp335.000.000	100	650.000.000	100	731.580.727		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Persen	100	0	100	50.000.000	100	56.275.441		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen	100	Rp25.000.000	100	50.000.000	100	56.275.441		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB)%	Persen	3.03		3.80		4.00			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	75	Rp1.369.999.750	75	329.995.178	83	1.497.035.990	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	95		95		98			Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	78	Rp699.791.706	80	2.069.847.758	91	1.291.596.947	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	846.612		846.612		846.612			Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.233	3.489.598.371	1.250	2.583.569.253	1.530	1.845.261.238	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	95.80		101.7		104.2			Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	64.000	7.611.126.850	65.000	4.517.109.668	95.000	4.185.640.962	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	kg/kapita/ tahun	67.28	2.171.748.145	35.97	1.249.995.897	48.77	1.376.836.020	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Rasio Gini	Rasio	0.389		0.380		0.356			
	S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata dan budaya lokal	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB)%)	Persen	0.48		0.50		0.68			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen		Rp1.598.729.872.00	20%	Rp1.450.000.000.00	90%	1.201.999.700.00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan	persentase		Rp399.167.933.00	20%	0.00	90%	573.652.167.11	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan sumber daya OAP yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	persentase		Rp790.925.120.00	20%	700.000.000.00	90%	546.363.500.00	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	orang			50		50		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	persentase	20%	Rp1.479.972.310.00	20%	850.000.000.00	40%	546.363.500.00	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			jumlah wisatawan domestik	orang			200.000		600.000			
			jumlah wisatawan mancanegara	Orang			1000		1400		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			rata rata lama tinggal wisatawan	hari			2		3		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah Event	event			2		6		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata dan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48.52		48.57		48.76			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya guna pelestarian	persentase		Rp310.499.221.00	20%	413.745.671.00	90%	298.328.237.17	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum yang dikelola secara baik	persentase		Rp177.417.375.00	20%	186.254.413.00	90%	173.493.869.91	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan guna pelestarian	persentase		Rp299.887.628.00	20%	1.049.999.761.00	90%	391.432.215.26	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	persentase		Rp1.194.426.592.00	20%	1.249.999.852.00	90%	1.114.581.378.28	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan sejarah yang didokumentasi, dilindung, dan dimanfaatkan	Persen			20%		90%		Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	20.8		5.19		5.84			
	S7	Terwujudnya percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA&PMDN	Meningkatkan nilai PMA&PMDN Realisasi investasi (PMA -PMDN) (RpTriliun)	RpTriliun	13.036		1.001		1.16			
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	persentase	75.25	749,948,384	76.25	499.999.680	80.33	577.655.049	Penanaman Modal	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	persentase	75.25	906,523,395	75.48	599.963.056	76.39	599.963.056	Penanaman Modal	DPMPTSP
	S7	Terwujudnya percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA&PMDN	Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)	Persen	538.7		10.00		11.00			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	persentase	9.99	649,994,875	10.02	499.999.680	10.14	499.999.680	Penanaman Modal	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan	persentase	50.00	750,008,156	50.15	699.982.100	50.75	699.982.100.0	Penanaman Modal	DPMPTSP

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	persentase	83.00	-	83.25	150.000.000	84.25	173.643.750	Penanaman Modal	DPMPTSP
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB per kapita (RpJuta)	RpJuta	131.64		141.56		257.6			
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB)%	Persen	38.93		39.00		39.20			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	persentase	55.00	450,000,000.00	55.17	1,450,000,000	55.83	1,500,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	persentase	2	699,945,999.00	3	4,000,000,000	7	4,000,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
			Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	persen	2	150,000,000.00	3	1,000,000,000	7	1,000,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemantauan ijin usaha industri	persen	50.00		60.00	1,000,000,000	80.00	1,000,000,000	perindustrian	Dinas Perindag

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB)%	Persen	4.71		5.50		5.60			
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non Migas	Juta US\$	4.50	1.200.000.000	4.55	1.200.000.000	5.00	983.454.300	Perdagangan	Dinas Perindag
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	persen	15.00	310,000,000	18.00	310.000.000	30.00	348.907.731	Perdagangan	Dinas Perindag
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase inflasi tahunan	persen	2.53	1,440,000,000	2.5	1.440.000.000	2.30	1.715.581.390	Perdagangan	Dinas Perindag
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	persen	10.14		6.00		5.75		Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	persen	100	1,250,000,000.00	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	Perdagangan	Dinas Perindag
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Proporsi Koperasi dan UMKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	N.A		1.00		3.00			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	persen			20.00	500,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	persen			50.00	600,000,000	100.00	800,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	persen			55.00	400,000,000	100.00	600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	persentase			50.00	1,000,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	persentase			50.00	600,000,000	100.00	800,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	persentase			60.00	500,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	persentase			60.00	300,000,000	100.00	450,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	persentase			50.00	500,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	persentase			20.00	500,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM yang di bina	persentase			50.00	1,000,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	persentase			20.00	1,000,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	persentase			20.00	1,000,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang				20.00	3,000,000,000	100.00	3,450,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	Persen	25.38		25.39		25.44			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	50	500.000.000	52.50	700.000.000	63.81	764.908.900	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen	15		20		75			DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor MIGAS terhadap PDRB (%)	Persen	24.77		24.78		24.83			
		PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Persen	60.00	0	60.00	1.500.000.000	80.00	1.639.090.500	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Cakupan Potensi dan Pemberian Ijin dalam pemanfaatan Energi	Persen	N.A		50.00		70.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	50	500.000.000	55	1.400.000.000	75	1.529.817.800	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	50	500.000.000	52.50	700.000.000	63.81	764.908.900	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB non tambang per kapita (RpJuta)	RpJuta	98.22		99.00		106.97			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Menyumbang PAD	Kontribusi Stok Carbon	Miliar Rupiah	0		0		8.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha			1.474.263	Rp41.405.289.133.20	1.695.868	34.815.010.841	Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
			Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen			21.68		9.56			
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persen			26.44		35.96			
	S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Menyumbang PAD	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB)%	Persen	1.46		1.47		1.50			
			Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen			39.68		50.63			
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3/Tahun			837.486		884.436			
			Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha			23.76		32.28			
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen			89.11		98.1			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen			Ada		Ada			
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang dikelola	Persen	100		100	790.000.000	100	830.000.000	Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
			Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen			52.9		65			
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.13		3.96		3.84			
	S10	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70.63		71.78		76.38			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase	12.02		12.26	550.000.000	13.27	550.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persentase	NA		50	7.050.000.000	59.33	7.050.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persentase	60.53		62.53	1.000.000.000	70.53	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persentase	4.51		4.60	1.000.000.000	4.98	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase	n.a		0.00	150.000.000	14.00	150.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persentase	0.68		0.69	1.000.000.000	0.75	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Persentase	0.23		0.23	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase	17.00		17.34	200.000.000	18.77	200.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.5541		0.5652		0.6118			
	S11	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat dan Kampung	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	persen	27.00		28.00		28.00			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentasi Peningkatan Satus desa maju / mandiri	Persentase	4.17		4.2	1.800.000.000	4.6	1.800.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok	95.56		96	1.100.000.000	100	1.500.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader desa yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persentase	59.53		60	350.000.000	62	350.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Mandiri	Persentase	1.04		1.1	500.000.000	1.5	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Persentase desa maju	Persentase	1.04		1.25	500.000.000	2.25	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Persentase desa berkembang	Persentase	25.42		25	2.400.000.000	29	2.400.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	17.52		18	1.000.000.000	22	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat		ada/tidak ada		ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persentase	89.59		1	500.000.000	1	500.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persentase	20		40	1.900.000.000	60	1.900.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persentase	20		40	1.500.000.000	60	1.500.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi potensinya	Persentase	20		20	300.000.000	20	300.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Misi 3	Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan											
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	T3	Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks			46.84		51.93			
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen			33.67		37.90			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	76.5	17.291.069.045	80.50	10.522.000.000	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton			36.963.78		40.010.78			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton/Ha			44.78		46.6			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton			18.095		20.366			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton/Ha			41.12		42.79			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	Ton			24.204.52		24.360.61			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	Ton/Ha			51.51		52.12			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen	75	5.430.141.000	78	1.328.000.000	90	2.452.870.522	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persen	100	1.275.000.000	100	1.150.000.000	100	1.294.335.132	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen	100	2.335.000.000	100	2.500.000.000	100	2.813.772.025	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Cakupan penanganan daerah Rentan Rawan pangan	Persen			47.32		27.32			
		PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Persentase	52.32	1.600.000.000	47.32	1.000.000.000	27.32	1.800.814.096	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persentase	87.77	5.199.352.585	98.76	Rp5.200.000.000	100	Rp3.988.453.550	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PPH Konsumsi Pangan	Persentase	77.9		79.9		88.0			
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	21.91		21.30		19.02			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase	98.75	Rp3.149.999.660	88.25	Rp1.850.000.000	92.18	Rp2.431.012.500	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Indeks Keamanan Pangan	Indeks	21.89							
	S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	NTP Sektor Pertanian	Persen	98.88		99.18		111.60			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persentase	76.5	17.291.069.045	80.50	10.522.000.000	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton			36.963.78		40.010.78			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton/Ha	37.18		44.78		46.60			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton			18.095		20.366			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton/Ha			41.12		42.79			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	Ton			24.204.52		24.360.61			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	Ton/Ha			51.51		52.12			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase	75	5.430.141.000	78	1.328.000.000	90	2.452.870.522	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persentase	100	Rp1.275.000.000	100	1.150.000.000	100	1.294.335.132	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persentase	100	Rp2.335.000.000	100	2.500.000.000	100	2.813.772.025	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101.61		102.87		108.10			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.233	3.489.598.371	1.250	2.583.569.253	1.530	1.845.261.238	Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	95.80		101.7		104.2		Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	64.000	7.611.126.850	65.000	4.517.109.668	95.000	4.185.640.962	Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial	Miliar Rupiah			4.00		8.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha			1.474.263	Rp41.405.289.133.20	1.695.868	34.815.010.841	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase			21.68		9.56		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persentase			26.44		35.96		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persentase			39.68		50.63		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3/Tahun			837.486		884.436		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha			23.76		32.28		Kehutanan	Dinas Kehutanan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persentase			89.11		98.10		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen			1		7		Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Rata-rata laju deforestasi per tahun	Persen			30.00		22.00			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah masyarakat dan penyuluh serta polisi hutan (Polhut) yang mendapatkan pemberberdayaan kehutanan	Orang	200		200	3.563.846.803	250	4.011.140.974	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Luas hutan sosial kemasyarakatan (HKM) yang dikelola oleh masyarakat	Persen			40.00		72.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	Persentase	0	0	0	0	100	327.818.100	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Luas hutan desa (HD) yang dikelola oleh kampung	Persen			40.00		56.00			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	Presentase Pengelolaan Hutan Adat	Persentase	0	0	0	0	100	327.818.100	Kehutanan	Dinas Kehutanan
Misi 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas											
Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124.78		121.97		110.87			
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	40.41		41.63		53.63			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan	Persen				334.523.000.000	41.74	406.615.000.000		PUPR
	T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83.75		82.89		83.53			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi, serta Kualitas Penataan Ruang Daerah									
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli	Persen			32.2	5.000.000.000	43.52	6.077.531.250		PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Rasio			32.2	19.131.000.000	47.5	23.253.850.069		PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan irigasi Multi Komoditas	Persentase			39.65		41.74	103.194.600.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase			27.27	6.278.000.000	27.27	6.278.000.000		PUPR
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase			58.43	11.668.000.000	58.63	14.183.000.000		PUPR

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Lokasi			100	5.000.000.000	100	5.000.000.000		PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase			100	7.700.000.000	100	7.700.000.000		PUPR
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	100		100		100			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi		100		100	8.000.000.000	100	9.724.050.000		PUPR
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Cakupan Wilayah yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	Persentase	35		37.1		46.84			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	63		66.15	6.000.000.000	78	36.000.000.000		DISHUB
			V/C Ratio di Jalan Provinsi		47.25		49.61	6.000.000.000	60.3	36.000.000.000		DISHUB

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen	36.75		38.59	6.000.000.000	46.9	36.000.000.000		DISHUB
			Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen	42.86		44.57	6.000.000.000	77.19	36.000.000.000		DISHUB
			Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	25		26.25	6.000.000.000	31.91	36.000.000.000		
			Tersedianya Terminal Type B	Unit	ada/tidak ada		ada/tidak ada	6.000.000.000	ada/tidak ada	36.000.000.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Lokasi			ada/tidak ada	-	ada/tidak ada	17.800.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen			0	-	80	9.000.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	ton	106.508.510		116.094.276	-	146.489.063	2.000.000.000.00		DISHUB
			Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	515.714		562.128	-	793.489	2.000.000.000.00		DISHUB

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen	65.4		71.29	-	83.26	28.000.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	18.530.000		20.197.700	-	25.485.685	1.800.000.000.00		DISHUB
			Jumlah arus penumpang angkutan udara	Orang	2.103.093		2.292.372		2.892.540	1.800.000.000.00		DISHUB
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	ton			93.389		99.002			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola di TPA	Persen			58	-	65	800.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Persen	45.74		48.027		49.98			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Persentase	100		100	300.000.000	100	1.600.000.000		KOMINFO

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persentase	100		100	500.000.000	100	650.000.000		KOMINFO
	S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan		80		80.00		82.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan porsi EBT dalam bauran energi	persen	80	500.000.000	80.00	500.000.000	82.00	21.854.540.000		ESDM
	S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi		83		83.83		87.23			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	persen	83	18.000.000.000	83.83	42.000.000.000	87.23	24.049.895.948		ESDM
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63.25		72.42		73.22			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Indeks	63.25		72.42	400.000.000	73.22	500.000.000	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86.28		86.94		87.14			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	persen			0	500.000.000.00	100	550.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100		100		100			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	persen			0	700.000.000.00	60	750.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94.4		84.96		85.76			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	persen			0	1.000.000.000.00	70	1.170.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUMADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	persen			0	350.000.000.00	60	550.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pelatihan yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di satu Provinsi	persen			0	500.000.000.00	50	590.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen			0	350.000.000.00	45	420.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	persen			0	500.000.000.00	80	550.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen	Ada		Ada/Tidak ada	500.000.000.00	Ada	2.000.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Persen			1.08		18.7			
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang dikelola	Persen			81.38	477.642.074	100.00	537.590.362	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen			52.9		65.00		Kehutanan	Dinas Kehutanan

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
Misi 5	Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah											
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	T5	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81		81.5		83.5			
	S18	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	65.55		65.55		68.73			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100		100	500.000.000	100	2.000.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase	100		100	1.200.000.000	100	3.200.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100		100	1.023.657.000	100	2.000.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100		100	500.000.000	100	1.400.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
	S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145.76		145.76		141.93			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100		100	1.365.300.000	100	2.500.000.000	Ketentrman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100		100	123.470.000	100	2.200.000.000	Ketentrman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Terselenggaranya program Penanggulangan Bencana	Persentase	100		100	9.310.000.000	100	11.315.784.375	Ketentrman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	BPBD
	S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	Indeks Demokrasi	Indeks	N.A.		65.74		69.72			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100		100	36.225.000.000	100	55.000.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100		100	100.000.000	100	300.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	100		100	1.350.000.000	100	2.000.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase	100		100	-	100	400.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
			Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persentase	100		100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	100		100	3.563.394.438	100	5.500.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
	S20	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100		100		100			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase			60	550.000.000.00	100	590.000.000	Urusan Pertanahan	DLHP
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										
	S20	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	100		100		100			
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	persentatse			60	14.000.000.000.00	100	19.000.000.000.00	Urusan Pertanahan	DLHP

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang di tetapkan	persentatse			60	600.000.000.00	100	640.000.000.00	Urusan Pertanahan	DLHP
Misi 6	Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance											
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	T6	Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B		B		BB			
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	NA		BAIK		BAIK			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persentase	80.11		83.11	700.000.000	95.11	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pasangan berakte nikah	Persentase	42.15		44	700.000.000	56	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase	39.79		40	700.000.000	52	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase	100		100	700.000.000	100	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persentase	83.38		86.38	1.700.000.000	95.38	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	2.61		4.61	1.700.000.000	12.61	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	40.12		44.12	1.700.000.000	60.12	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	18.18		27.27	2.400.000.000	90.91	2.400.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100		100	352.000.000	100	300.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89.92		90		90			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100		100	4.849.999.000	100	7.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Hukum

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	N.A		62	246.700.230.565	70	320.453.245.300	Sekretariat Daerah	Biro Hukum
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persentase	100		100	210.355.600.898	100	350.565.400.856	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persentase	100		100	195.250.210.555	100	256.756.400.345	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
			Persentase Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persentase	100		100	165.590.565.433	100	230.565.400.656	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100		100	1.450.000.000	100	1.750.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100		100	150.747.646.889	100	218.885.319.019	Sekretariat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100		100	5.750.000.000	100	9.909.999.746	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	40		60		100		Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	N.A		60	5.000.000.000	100	6.000.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100		100	4.000.000.000	100	6.000.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B		B	600.000.000	BB	1.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	A		A	1.500.000.000	A	2.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
			Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persentase	69.26		70	1.500.000.000	70	2.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Efektivitas Koordinasi, Komunikasi, dan Dukungan Layanan Pemerintahan Pusat dan Daerah	Persentase	100		100	3.429.650.872	100	5.021.351.842	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penghubung

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Persentase	100		100	4.602.915.264.00	100	7.802.915.264.00	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Administrasi Pimpinan
			Cakupan Pelayanan Umum Sekretariat Daerah	Persentase	100		100		100	51.125.119.977	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Umum
			Cakupan Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan	Persentase	100		100		100		Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Umum
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase				13.456.920.960		13.728.084.654	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase				25.257.077.819		25.766.020.581	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase				10.643.926.484		10.858.406.931	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRD, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD	Persentase			0	2.973.291.760	100	3.058.206.125	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MEJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	Persentase Alat Kelengkapan MRP yang Memiliki Rencana Kerja Tahunan	Persentase	100		100	4.468.456.896	100	6.542.267.739	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
			Persentase Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	Persentase	100		100	1.359.496.700	100	1.990.439.117	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
			Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persentase	100		100	29.684.890.182	100	43.461.647.715	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C		C		A			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip sesuai NSKP	Persentase	N.A		100	500.000.000	100	950.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Digitalisasi Arsip dalam SIKN	Persentase	N.A		100	500.000.000	100	700.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Cakupan Pembinaan Kearsipan di Provinsi	Persentase	N.A		100	400.000.000	100	750.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Nillai Pengawasan Kearsipan Daerah	kategori	C		CC	500.000.000	A	900.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Presentase Lembaga Kearsipan yang diakreditasi	Persentase	N.A		100	300.000.000	100	650.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Presentase Arsiparis yang disertifikasi	Persentase	N.A		100	500.000.000	100	850.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persentase	N.A		100	1.000.000.000	100	1.400.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	N.A		40	1.500.000.000	80	2.300.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N.A.		71.01		100			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persentase	90-100		90-100	1.571.102.514	90-100	2.450.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase	90-100		90-100	800.000.000	90-100	2.900.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kompetensi ASN	Persentase	90-100		90-100	5.415.960.900	90-100	5.380.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kualitas Data ASN dan Penataan SDM Aparatur	Persentase	90-100		90-100	1.559.113.563	90-100	4.750.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase	100		100	1.626.000.000	100	1.760.034.692		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	2.87		3.02		3.62			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	presentase	100		100	13.000.000.000	100	19.732.075.000		Balitbangda
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B		B		A			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	presentase	100		100	6.500.000.000	100	9.516.650.000		Balitbangda
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase	NA		100		100			
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	presentase	100		100	1.750.000.000	100	2.562.175.000		Balitbangda
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Skala	1.3		1.8		3.8			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Tersedia dan di Perbaharui secara berkala dalam Portal SDI Papua Barat	Skala	1.3	200.000.000.00	1.8	200.000.000	3.8	1.200.000.000	Urusan Statistik	KOMINFO
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Persen	60.24		65.2		85.2			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100		100	300.000.000	100	700.000.000		KOMINFO
					100		100	2.750.000.000	100	4.026.275.000		Balitbangda

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73.41		78		98			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100		100	1.934.066.375	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		100	1.934.066.375	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100		100	1.934.066.375	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100		100	2.255.148.373	100	2.441.045.125	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasaan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100		100	800.000.000	100	865.945.728	Perencanaan	Bappeda

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Cakupan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Persen	100		100	1.934.066.375	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Tingkat maturitas SPIP	Level	3.068		3		3			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1	Persen	66.45		68	15.792.560.160	72	17.432.031.481	Pengawasan	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		3	4.196.640.000	3	4.632.305.329	Pengawasan	Inspektorat
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3		3	1.069.200.000	3	1.180.196.743	Pengawasan	Inspektorat
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	opini	WDP		WTP		WTP			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Waktu penetapan APDB	Tepat waktu/tidak tepat waktu			Tepat Waktu	15.585.135.749	Tepat Waktu	22.818.197.250	Keuangan	BPKAD
			Waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu/tidak tepat waktu			Tepat Waktu		Tepat Waktu			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Ya/Tidak			Ya	4.200.000.550	Ya	6.149.220.805	Keuangan	BPKAD
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah	persen	5		5.005		5.025			

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase	5%	47,982,687,973	5%	37,315,053,293	25%	54,632,969,526	Keuangan	BAPENDA
			Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persentase	5%	2,738,965,428	5%	2,987,128,632	25%	4,373,455,029	Keuangan	BAPENDA
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)	persen	5		5.005		5.025			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Rasio	0.05	953,940,660	0.05	658,632,295	0.09	964,303,543	Keuangan	BAPENDA
Misi 7	Optimalisasi Otsus Untuk Menyejahterakan OAP di Papua Barat											
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	T7	Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks								
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun								
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Kartu Papua Cerdas OAP	Persentase				700.000.000		5.000.000.000		Dinas Pendidikan
	S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Harapan Lama Sekolah (HLS) Orang Asli Papua	Tahun								

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Penduduk OAP usia sekolah yang menerima Pelayanan Program Kartu Papua Cerdas	Orang	-							
	S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	Tahun								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kartu Papua Sehat OAP	Persentase				500.000.000			Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	Orang	-						Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Persentase Penduduk Miskin Orang Asli Papua (OAP)	Persentase								
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM OAP Bantuan Sosial Afirmasi bagi Lansia dan Kelompok Rentan (Gender dan Disabilitas)	Persentase			30	-	100	3.000.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase			300	3.144.000.000	500	3.650.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase			300	1.500.000.000	500	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase			-	300.000.000	7	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
	S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang termutakhirkan	Persentase	N.A		0		100			
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Data Penduduk Terpilah (OAP dan Non OAP) pada aplikasi SIAK	Persentase	N.A.		100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	Persentase	1		2	2.400.000.000	10	2.400.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Cakupan Data Kondisi Sosial Ekonomi OAP		40		60	300.000.000	100	1.500.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Prioritas	Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2025		2029			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp		
	S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	Cakupan pemetaan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat		NA							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat OAP		na		10	7.900.000.000	100	8.364.651.875		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Tabel IV.4 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah 2025

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
	PU	Akselerasi akses dan mutu Kesehatan					
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	65 80 Persen Persen	24.215.608.363,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang serta Alat Kesehatan RSUD Provinsi Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	80 Persen	9.351.250.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	492.675.913,60	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 3	Percepatan Penurunan Stunting					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	100,00 100,00 2 : 1000 0606575 Persen Rasio TT : 1000 Pen Persen Persen Persen	50.438.761.325,04	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			26.385.806.939,38	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.972.941.917,80	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 6	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM Nakes dan Non Nakes yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Persen	179.124.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			298.248.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	12 Orang	2.053.010.015,50	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 7	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lanjut serta percepatan penurunan stunting					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	100,00 100,00 2 : 100 0606575 Persen Persen Rasio TT : 1000 Pen Persen Persen Persen	50.438.761.325,04	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			26.385.806.939,38	Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	440.838.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 8	Peningkatan jangkauan jaminan kesehatan nasional (JKN)					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Nakes dan Non Nakes RSUD Provinsi Papua Barat Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang serta Alat Kesehatan RSUD Provinsi	65 80 Persen Persen	33.228.197.540,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			23.500.000.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	8.757.540.000,38	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 9	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, kusta, frambusia, filariasis, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain)					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Nakes dan Non Nakes RSUD Provinsi Papua Barat Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang serta Alat Kesehatan RSUD Provinsi	65 80 Persen Persen	33.228.197.540,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			23.500.000.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	279.254.147,20	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	PU	Akselerasi Akses dan mutu Pelayanan Pendidikan					
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 10	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik					
		Program Pengelolaan Pendidikan	 Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Persentase SLB terakreditasi minimal B Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB Indeks Inkusisivitas SDLB Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Inkusisivitas SMALB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Inkusisivitas SMPLB	100 47,48 56,78 5 66,97 67,43 73,00 78,00 80 82,09 83,61 87,78 88,22 88,66 91,64 92,22 93,29 98,50 % % % Murid % % % % % Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks	160.988.172.304,47	Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Khusus			15.297.955.927,01	Pendidikan	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	70 Orang	1.039.600.000,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2025		Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 19	Pemajuan dan pelestarian bahasa, (pendidikan) budaya, dan sastra					
		Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	49.70 Indeks	814.563.000,00	perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		100.000.000,00	perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	25 Perpustakaan	568.340.000,00	perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	PU	Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Komoditas unggulan					
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 21	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan					
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	29. Produktivitas Pala 27. Produktivitas Kopi 28. Produktivitas Kakao 21. Produktivitas Nanas 30. Produktivitas Pinang 25. Produktivitas Manggis 24. Produktivitas Salak 22. Produktivitas Rambutan 16. Produktivitas alpukat 10. Produktivitas Wortel 26. Produktivitas Kelapa 31. Produktivitas Sagu 2. Produktivitas Kacang Tanah 4. Produktivitas Ubi Kayu 5. Produktivitas Ubi Jalar 17. Produktivitas Durian 19. Produktivitas Nangka 18. Produktivitas Mangga 3. Produktivitas Jagung 23. Produktivitas Jeruk Siam 12. Produktivitas Bayam 14. Produktivitas Melon 13. Produktivitas Kacang Panjang 20. Produktivitas Pisang 8. Produktivitas Sawi 7. Produktivitas Tomat 15. Produktivitas Semangka 9. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Cabai Rawit 11. Produktivitas Kangkung 1. Produktivitas Padi Cakupan pengembangan wilayah	0,09 0,10 0,11 0,14 0,16 0,52 0,53 0,68 0,96 1,02 1,16 1,18 1,27 13,20 13,66 1,55 1,69 1,75 2,08 2,66 2,70 2,74 2,76 3,06 3,09 3,53 3,71 3,84 4,21 4,27 4,57 80,50 Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Kuintal/Ha Ton/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Kuintal/Ha Ton/Ha Kuintal/Ha	10.839.172.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	P U/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	R p		
			komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Kuintal/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Persen			
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			1.400.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	1.241.970.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 22	Optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih/bibit					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Daging Ayam pedaging Daging Babi Daging Sapi Daging Ayam petelur Telur Ayam kampung Telur Ayam petelur Daging Itik/itik manila Daging Kambing Daging Ayam kampung Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak Telur Itik/itik manila	1,077.91 1,847.88 2,040.73 324.38 3,357.38 4,397.29 61.58 63.00 713.78 90 961.28 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton persen Ton	2.021.563.120,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			9.122.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengelolaan penerbitan sertifikat benih	Jumlah Sertifikat Benih	125 Sertifikat	298.384.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 23	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan					
		Progam Penyuluhan Pertanian			1.599.450.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian			600.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	1.054.815.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 24	Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi Usaha Persentase Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah , akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi Usaha	5059 persen persen	752.899.774,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang keanggotaannya lintas kab./ kota dalam 1 (satu) Provinsi	13 Unit	1.131.319.834,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 Unit Usaha	206.379.404,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 27	Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan modal dan kemudahan berusaha					
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi Usaha Persentase Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah , akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi Usaha	50 59 persen persen	752.899.774,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang keanggotaannya lintas kab./ kota dalam 1 (satu) Provinsi	13 Unit	1.131.319.834,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 Unit Usaha	148.481.270,00	Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 28	Penguatan kelembagaan kelompok dan korporasi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan					

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang diberdayakan	77,50 Persen	1.599.450.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian			600.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	544.635.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	PU	Pengembangan Pariwisata					
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 33	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	20 persen	0,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif			0,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	0,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 34	Peningkatan dan peningkatan dan pengembangan budaya lokal sebagai objek pariwisata					
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan guna Perlindungan, Pegembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	71,25 persen	260.609.489,20	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penetapan cagar budaya peringkat provinsi			76.212.598,00	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	0,00	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	KPU 35	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif					
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	13.50 40.00 Persen Persen	5.914.783.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Komptensi	100 Persen	500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	91 Orang	5.414.783.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PU	Optimalisasi Investasi sehingga meningkatkan nilai PMA dan PMD					
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	KPU 39	Fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha					
		Program Pelayanan Penanaman Modal			1.576.328.100,00	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			699.982.100,00	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	320 Pelaku Usaha	1.476.352.100,00	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	KPU 42	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)				Tenaga Kerja	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	13.50 40.00 Persen Persen	5.914.783.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Komptensi	100 Persen	500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	91 Orang	5.414.783.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	KPU 43	Pembinaan dan pendampingan utamanya kepada pelaku usaha lokal				Koperasi dan UMKM	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Persentase Pertumbuhan UMKM	40 65 persen persen	703.639.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui penataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	18 Unit	1.000.000.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	KPU 44	Dukungan regulasi, stabilitas keamanan, dan insentif bagi pelaku usaha				Koperasi dan UMKM	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan UsahaPersentase Pertumbuhan UMKM	4065 persenpersen	703.639.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui penataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	18 Unit	1.000.000.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PU	Pengembangan Pangan Lokal					
Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	KPU 45	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk memenuhi pangan lokal				Pertanian	

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		0,09	10.839.172.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				0,10			
				0,11			
				0,14			
				0,16			
			29. Produktivitas Pala	0,52			
			27. Produktivitas Kopi	0,53			
			28. Produktivitas Kakao	0,68			
			21. Produktivitas Nanas	0,96			
			30. Produktivitas	1,02			
			Pinang	1,16			
			25. Produktivitas	1,18			
			Manggis	1,27			
			24. Produktivitas Salak	13,20			
			22. Produktivitas	13,66			
			Rambutan	1,55			
			16. Produktivitas	1,69			
			alpukat	1,75			
			10. Produktivitas Wortel	2,08			
			26. Produktivitas	2,66			
			Kelapa	2,70			
			31. Produktivitas Sagu	2,74			
			2. Produktivitas Kacang	2,76			
			Tanah	3,06			
			4. Produktivitas Ubi	3,09			
			Kayu	3,53			
			5. Produktivitas Ubi	3,71			
			Jalar	3,84			
			17. Produktivitas Durian	4,21			
			19. Produktivitas	4,27			
			Nangka	4,57			
			18. Produktivitas	80,50 Ton/Ha			
			Mangga	Ton/Ha			
			3. Produktivitas Jagung	Ton/Ha			
			23. Produktivitas Jeruk	Kuintal/Ha			
			Siam	Ton/Ha			
			12. Produktivitas	Kuintal/Ha			
			Bayam	Kuintal/Ha			
			14. Produktivitas Melon	Kuintal/Ha			
			13. Produktivitas	Kuintal/Ha			
			Kacang Panjang	Ton/Ha			
			20. Produktivitas	Ton/Ha			
			Pisang	Ton/Ha			
			8. Produktivitas Sawi	Ton/Ha			
			7. Produktivitas Tomat	Ton/Ha			
			15. Produktivitas	Ton/Ha			
			Semangka	Kuintal/Ha			
			9. Produktivitas	Kuintal/Ha			
			Bawang Merah	Kuiantal/Ha			
			6. Produktivitas Cabai	Ton/Ha			
			Rawit	Kuintal/Ha			
			11. Produktivitas	Ton/Ha			
			Kangkung	Ton/Ha			
			1. Produktivitas Padi	Ton/Ha			
			Cakupan	Kuintal/Ha			
			pengembangan wilayah	Ton/Ha			
			komoditas tanaman	Ton/Ha			
			pangan hortikultura dan	Ton/Ha			
			perkebunan	Ton/Ha			
				Ton/Ha			
				Ton/Ha			
				Ton/Ha			
				Ton/Ha			
				Ton/Ha			
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				
			Ton/Ha				

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan areal wilayah gagal panen yang tertangani "Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian"	77 90 Persen Persen	907.662.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi			1.050.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	704.485.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	PU	Optimalisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)					
Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	KPU 53	Membangun konektivitas antar dan intra wilayah di Papua Barat					
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	38,11 Persen	284.285.077.296,00	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100 Persen	334.523.247.794,00	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	36 KM	44.775.368.900,00	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	KPU 54	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (bid. Ekonomi)					
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan			150.575.040,00	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			101.643.040,00	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	42.283.040,00	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	KPU 55	Tingkat elektrifikasi					
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan			43.233.136.655,40	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan PenjualanTenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			202.156.000,00	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	1 Dokumen	120.864.000,00	ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	PU	Harmonisasi Sosial					
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	KPU 58	Peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan, dan masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan dialog					
		Program Sekretariat DPRD Papua Papua		100 Persen	0,00	Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			0,00	Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat
		Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRDdengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat
	PU	Peningkatan resiliensi Bencana dan perubahan iklim					
Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	KPU 70	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan					
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	30 94.50 Persen Persen	5.250.000.000,00	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			1.000.000.000,00	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas	Kode	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Bidang Urusan	Perangkat Daerah
				2025			
				T	Rp		
		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	32,29 Persen	6.376.323.753,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	14 Unit	2.400.000.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	3.466.620.000,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.4 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintahan daerah (P-RKPD) tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan;
2. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antara rekening;
3. Penambahan/pengurangan tolok ukur kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan);
4. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
5. Tambahan karena kebutuhan mendesak keterkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
6. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
7. Dan lain sebagainya.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBAGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada penyusunan perubahan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Provinsi Papua Barat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 Provinsi Papua Barat.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.1/640/SJ, adalah pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 telah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Selain itu untuk perubahan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan yang diharapkan mampu merealisasikan target sasaran prioritas pembangunan yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Selanjutnya bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 nanti, merupakan Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kinerja secara professional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat pentingnya peran dan keberadaan P-RKPD ini maka peran serta seluruh potensi stakeholder Provinsi Papua Barat mutlak diperlukan, sehingga diharapkan dapat lebih mendorong upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENDIDIKAN							182.003.445.726,00	137.436.833.081,47	192.985.833.081,47							184.620.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							182.003.445.726,00	137.436.833.081,47	192.985.833.081,47							184.620.000.000,00	
	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						182.003.445.726,00	137.436.833.081,47	192.985.833.081,47							184.620.000.000,00	
1	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	37.900.000.000,00	30.953.563.647,00	30.813.770.647,00							37.800.000.000,00	
	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	650.000.000,00	365.046.840,00	365.046.840,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0002														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.046.840,00	100.046.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	26.300.000.000,00	27.753.957.647,00	27.753.957.647,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		26.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	25.100.000.000,00	26.929.677.647,00	26.929.677.647,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			25.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	686.280.000,00	686.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	34.860.000,00	34.860.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	30.765.000,00	30.765.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	300.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada													
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				100 Orang	100 Orang	800.000.000,00	377.370.000,00	243.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	348.700.000,00	290.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	5.000.000.000,00	1.864.800.000,00	1.864.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																	
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	500.000.000,00	727.332.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.04		Pengelolaan Akademi Komunitas	-	-			-	-	1.000.000.000,00	5.341.974.268,00	5.341.974.268,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas																	
						Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	1.000.000.000,00	5.341.974.268,00	5.341.974.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.05		Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	-	-			-	-	35.000.000.000,00	27.695.897.915,00	27.695.897.915,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	OAP	35.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya																	
						Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya				10 Biaya	10 Biaya	35.000.000.000,00	27.695.897.915,00	25.510.518.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		35.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.06		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	-	-			-	-	7.000.000.000,00	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi																	
						Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan				700 Orang	700 Orang	7.000.000.000,00	2.975.000.000,00	25.476.854.905,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.07		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	-	-			-	-	80.000.000.000,00	53.672.441.324,46	53.672.441.324,46			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	85.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan																	
						Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	80.000.000.000,00	53.672.441.324,46	88.242.730.618,96	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		85.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
3	1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meningkat kompetensinya				1 1 Dokumen orang	1 1 Dokumen orang	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.183.890.130,00						1.150.000.000,00		
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-			-	-	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																	
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	327.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																	
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	1.000.000.000,00	855.946.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
						DINAS KESEHATAN						67.710.478.046,00	135.950.227.036,58	185.834.814.536,58						325.825.915.735,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							67.710.478.046,00	135.950.227.036,58	185.834.814.536,58						325.825.915.735,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							67.710.478.046,00	135.950.227.036,58	185.834.814.536,58						325.825.915.735,00		
4	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00 Persen	100,00 Persen	22.683.653.570,00	70.383.362.551,20	70.380.401.001,39						91.344.368.195,00		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	216.080.993,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	-	-	89.101.406,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.080.993,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penvusunan Dokumen RKA- SKPD																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	76.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			49.101.406,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	-	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	16.719.996.971,00	66.034.667.000,20	66.034.667.000,20			-	-	-		69.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	14.793.793.043,00	65.999.667.000,00	65.999.667.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			67.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	1.881.203.928,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	35.000.000,20	35.000.000,20	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	75.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		80.080.993,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			40.080.993,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	235.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	-	-		897.551.724,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			122.551.724,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	1.998.692.885,00	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00			-	-	-		2.090.440.125,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			214.302.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	173.000.000,00	75.000.000,00	72.038.450,19	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.390.380.000,00	1.693.176.173,00	1.693.176.173,00	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.393.154.854,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	3.167.618.395,00	10.374.016.279,00	10.374.016.279,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			21.911.870.531,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	1 Paket	2.218.148.000,00	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			3.652.377.435,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	-	19.595.135.599,00	26.385.806.939,38	26.385.806.939,38			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-			49.585.938.312,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1000 Orang	1100 Orang	2.300.000.000,00	2.827.630.928,00	2.827.630.928,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	1.580.838.250,00	1.396.500.000,00	1.396.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.616.374.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	713.550.000,00	440.838.000,00	440.838.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			713.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	157.041.000,00	154.593.982,40	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.200.000.000,00	8.757.540.000,38	8.757.540.000,38	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			9.652.273.092,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	870.217.375,00	870.217.375,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	659.157.612,00	659.157.612,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	3.252.508.000,00	3.252.073.320,40	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.599.436.014,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			285.161.149,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			237.399.120,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	75.328.000,00	232.940.741,00	232.940.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	162.843.000,00	160.261.709,25	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			5.512.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	277.047.000,00	277.047.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			310.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	816.241.084,00	802.950.898,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			890.809.636,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				44518 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			608.407.535,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-	-	200.000.000,00	313.469.806,00	313.469.806,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		558.237.871,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	313.469.806,00	313.469.806,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			558.237.871,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-	-	875.000.000,00	1.440.520.739,00	1.440.520.739,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.042.506.774,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
							Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	0 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			347.502.258,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				10 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		11.025.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	850.000.000,00	2.554.075.356,00	2.554.075.356,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	3.108.407.535,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				10 Orang	30 Orang	500.000.000,00	2.054.075.356,00	2.053.010.015,50	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	489.335.364,40	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		608.407.535,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	5.834.273.995,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua																
						Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua				25 Orang	23 Orang	5.834.273.995,00	5.000.000.000,00	4.992.414.958,80	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-		-	-	4.536.000.000,00	6.350.400.000,00	6.350.400.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	100.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat JaminanKesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN																
						Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat				10000 Orang	14000 Orang	4.536.000.000,00	6.350.400.000,00	56.350.400.000,00	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		100.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
7	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha			100 Persen	100 Persen	225.538.621,00	350.000.000,00	347.203.243,20							734.808.340,00	
	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-		-	-	150.538.621,00	213.829.189,00	213.829.189,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	489.712.510,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				3 Sarana	3 Sarana	150.538.621,00	213.829.189,00	213.829.189,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			489.712.510,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-		-	-	75.000.000,00	136.170.811,00	136.170.811,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		245.095.830,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																					
						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				1 Sarana	1 Sarana	75.000.000,00	136.170.811,00	133.374.054,20	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			245.095.830,00	DINAS KESEHATAN					
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Presentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)			6 90 Kabupaten Persen	6 90 Kabupaten Persen	1.069.656.900,00	800.000.000,00	783.288.628,25							1.750.190.364,00						
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	222.328.900,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																					
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	222.328.900,00	300.000.000,00	293.430.556,90	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	147.328.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		723.163.328,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																					
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	0 Dokumen	75.328.000,00	0,00	0,00	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			477.627.034,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	0 Dokumen	72.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			245.536.294,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	700.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		677.027.036,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																					
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	500.000.000,00	489.858.071,35	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			677.027.036,00	DINAS KESEHATAN					
						BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT																		3.578.733.887.144,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			3.578.733.887.144,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				3.578.733.887.144,00	
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	51.696.501.582,00	29.613.308.460,00	29.443.928.460,00							3.516.233.887.144,00						
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	90.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		93.332.679,00	DINAS KESEHATAN					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		31.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		31.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		31.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	41.991.192.111,00	248.520.000,00	248.520.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	98.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	17.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	24.961.192.111,00	248.520.000,00	248.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	30.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	31.110.893,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		31.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	752.307.045,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	710.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	635.591.117,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		555.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	116.715.928,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		155.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	4.784.389.177,00	803.013.020,00	803.013.020,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.039.373.332.679,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	71.400.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		81.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	445.085.912,00	304.954.912,00	304.954.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		555.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.252.422.286,00	59.298.108,00	59.298.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	185.552.315,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		255.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	174.550.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		225.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	254.866.500,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		261.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.512.164,00	338.760.000,00	169.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		531.110.893,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.266.119.124,00	2.671.615.440,00	2.671.615.440,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	3.505.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	2.261.119.124,00	2.671.615.440,00	2.671.615.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.782.494.125,00	890.160.000,00	890.160.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.640.231.110.893,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		85.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					166 Unit	908 Unit	1.490.800.000,00	815.160.000,00	815.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.555.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0 Unit	216.694.125,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		231.110.893,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	1 Unit Kerja	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Nakes dan Non Nakes RSUD Provinsi Papua Barat			65 Persen	65 80 Persen Persen	24.215.608.363,00	32.939.693.540,00	33.228.197.540,00							59.000.000.000,00		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang serta Alat Kesehatan RSUD Provinsi																	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang serta Alat Kesehatan RSUD Provinsi	-	-	-	80 Persen	21.215.608.363,00	9.351.250.000,00	9.351.250.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Papua Barat	31.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
						Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																	
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	23 Unit	16.215.608.363,00	2.351.250.000,00	2.351.250.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.322.734.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00			-	-	-	-	23.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	1 Dokumen	0,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	-			23.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	3.000.000.000,00	88.443.540,00	88.443.540,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																	
						Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	88.443.540,00	54.213.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM Nakes dan Non Nakes yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			100 Persen	100 Persen	2.000.000.000,00	298.248.000,00	179.124.000,00							3.500.000.000,00		
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	298.248.000,00	298.248.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				200 Orang	12 Orang	2.000.000.000,00	298.248.000,00	179.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						673.295.294.891,00	538.671.797.396,50	462.183.945.664,50							906.640.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	1									673.295.294.891,00	538.671.797.396,50	462.183.945.664,50							906.640.000.000,00					
1	03									646.995.294.891,00	528.671.797.396,50	450.509.327.664,50							866.493.000.000,00					
12	1	03	01					100 Persen	100 Persen	646.995.294.891,00	528.671.797.396,50	450.509.327.664,50							866.493.000.000,00					
										36.539.000.000,00	29.577.139.602,00	29.196.492.602,00							36.239.000.000,00					
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	770.000.000,00	655.267.000,00	655.267.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Aparatur		770.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	305.267.000,00	305.267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			120.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	26.090.000.000,00	23.413.906.733,00	23.413.906.733,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Aparatur		25.390.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			120 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	22.717.306.733,00	22.717.306.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			25.000.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	790.000.000,00	446.600.000,00	446.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			90.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	309.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		309.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	309.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			309.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.700.000.000,00	244.019.950,00	244.019.950,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Aparatur		1.700.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin																			
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua- Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut																			
					Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket	3 Paket	300.000.000,00	99.750.000,00	99.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																			
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	49.968.000,00	49.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 Orang	50 Orang	600.000.000,00	44.287.950,00	44.287.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			600.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	50.014.000,00	254.951.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implemetansi Peraturan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	490.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.460.000.000,00	1.599.613.443,00	1.599.613.443,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Aparatur		1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	553.316.435,00	553.316.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	1.036.297.008,00	1.036.297.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.220.000.000,00	644.992.476,00	644.992.476,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Aparatur		1.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	320.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																	
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	364.992.476,00	364.992.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio panjang saluran irigasi dalam kondisi baik kewenangan provinsi			23,02	23,02	95.500.000.000,00	50.272.142.000,00	39.182.485.559,00								114.716.000.000,00	
						Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				23.02 Persen	23.02 Persen												
						Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				23.02 Persen	23.02 Persen												
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	51.500.000.000,00	42.366.790.000,00	42.366.790.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik		73.135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2.43 KM	2.43 KM	15.000.000.000,00	12.410.120.000,00	5.343.534.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			30.023.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																31.907.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				1.45 KM	1.45 KM	25.000.000.000,00	20.369.830.000,00	22.751.154.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat					31.907.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku																			
							Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Titik	1 Titik	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																			
							Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				7 Titik	7 Titik	5.000.000.000,00	8.986.840.000,00	9.564.208.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DTI-Papua-Air Bersih	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Daerah					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				3 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				5 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-		44.000.000.000,00	7.905.352.000,00	7.905.352.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik			41.581.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2,42 KM	0 KM	6.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			6.655.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	30.000.000.000,00	7.905.352.000,00	1.523.587.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			20.609.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																9.317.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				72,6 KM	0 KM	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat						
	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat						
18	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan				2.28 Persen	2.28 Persen	45.100.000.000,00	40.760.868.000,50	40.710.446.707,50				58.000.000.000,00					
	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-		-	-	45.100.000.000,00	40.760.868.000,50	40.760.868.000,50			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik					
	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat						
	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000,00	2.678.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT] Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				35 Orang	0 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				25000 Liter/Detik	2 Liter/Detik	27.700.000.000,00	37.832.068.000,50	40.710.446.707,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur DTI-Papua-Air Bersih DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				500 Liter/Detik	0 Liter/Detik	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			15.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.500.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	05	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-			100 Persen	100 Persen	6.400.000.000,00	25.789.200.000,00	25.789.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik		14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				500 M³/Hari	500 M³/Hari	3.200.000.000,00	23.232.000.000,00	29.218.023.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DTI-Papua-Air Bersih DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	2.557.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
						Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	0 Lembaga	700.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	08	1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	-	3.400.000.000,00	14.122.000.000,00	14.122.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat / Publik		6.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				20 Orang	0 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				10 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang				50 Lisensi	50 Lisensi	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1300 KM	1300 KM	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
26	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi				33.33 Persen	33.33 Persen	5.200.000.000,00	2.000.000.000,00	1.581.808.000,00							6.750.000.000,00		
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	-	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Masyarakat / Publik		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																		
							Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
							Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				1 Orang	1 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	361.928.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									
	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								
	1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																									
						Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								
	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																									
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	1.000.000.000,00	775.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								
	1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																									
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang Dididentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				5 Lembaga	0 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	-	700.000.000,00	0,00	0,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Masyarakat / Publik			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				5 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-		-	-	1.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Masyarakat / Publik			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				35 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	300.000.000,00	500.000.000,00	444.733.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				5 Bangunan Konstruksi	0 Bangunan Konstruksi	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																	
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				5 Lembaga	0 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota																	
							Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota				1 Berita Acara	0 Berita Acara	750.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-				1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat / Publik			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha																	
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	0 Layanan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-		-	-	1.500.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat / Publik		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruane																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	12	1.04	0009		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				7 Berita Acara	0 Berita Acara	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
28	1	04	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak-huni Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani				20.25 69.98 75.82 75 93.31 Persen Persen Persen Persen	20.25 69.98 75.82 75 93.31 Persen Persen Persen Persen	26.300.000.000,00 9.800.000.000,00	10.000.000.000,00 2.250.000.000,00	11.674.618.000,00 2.117.050.000,00							40.147.000.000,00 11.150.000.000,00	
	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	-	300.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	320.000.000,00	187.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	02	1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	-	9.500.000.000,00	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat / Publik		10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.03	0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	0 Unit Rumah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.03	0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	4.000.000.000,00	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.03	0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				11 Unit Rumah	0 Unit Rumah	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.03	0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				4 Unit Rumah	0 Unit Rumah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	04	05	1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	-	2.500.000.000,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat / Publik		10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																	
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				7 Lokasi	2 Lokasi	500.000.000,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																	
						Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan				3 Lokasi	3 Lokasi	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Air Bersih DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	05	1.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 Lokasi	0 Lokasi	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			31.301.863.034,00	35.808.904.313,12	34.953.856.813,12							50.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.301.863.034,00	35.808.904.313,12	34.953.856.813,12							50.000.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.301.863.034,00	35.808.904.313,12	34.953.856.813,12							50.000.000,00	
31	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	25.101.863.034,00	30.525.700.685,12	30.018.525.185,12						0,00	
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	950.000.000,00	363.409.836,12	363.409.836,12			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	181.360.000,00	151.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	132.049.836,12	109.635.836,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.501.258.283,00	24.769.835.418,00	24.769.835.418,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan	18.921.258.283,00	24.569.835.418,00	24.351.551.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	15 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barane Milik Daerah pada SKPD													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.500.000.000,00	603.518.920,00	603.518.920,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	2 Paket	300.000.000,00	114.874.760,00	114.874.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	200.000.000,00	156.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	150.000.000,00	100.308.800,00	70.383.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	15 Orang	300.000.000,00	188.335.360,00	103.908.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	750.604.751,00	468.984.675,00	468.984.675,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	200.000.000,00	66.895.500,00	66.895.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	104.160.000,00	104.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.604.751,00	297.929.175,00	228.349.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	150.000.000,00	337.648.940,00	337.648.940,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Urusan Pemerintah Daerah																
	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	4 Unit	0,00	187.659.780,00	187.659.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	150.000.000,00	149.989.160,00	149.989.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	-	2.150.000.000,00	3.677.604.996,00	3.677.604.996,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Pemerintahan Daerah																
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	141.998.700,00	141.998.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	3.535.606.296,00	3.526.326.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-			50.000.000,00	304.697.900,00	304.697.900,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	22 Unit	50.000.000,00	304.697.900,00	304.697.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 Persen	100 Persen	4.650.000.000,00	2.683.203.628,00	2.286.759.628,00					50.000.000,00		
	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			2.900.000.000,00	2.046.037.628,00	2.046.037.628,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Orang	50 Orang	300.000.000,00	400.000.000,00	298.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi																
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	160.506.689,00	101.027.689,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
							Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	113.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				1 laporan	1 laporan	250.000.000,00	557.211.628,00	581.262.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia																
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	589.493.311,00	446.873.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	138.826.000,00	138.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	-	500.000.000,00	137.166.000,00	137.166.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Daerah					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	02	1.02	0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah			7 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			1 laporan	1 laporan	0,00	137.166.000,00	107.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	-	-	-	700.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda			5 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS			1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah			1 laporan	0 laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	4.05		Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	-	-	-	-	-	550.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	4.05	0001	Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi			1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	4.05	0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi			1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	4.05	0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	4.05	0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			100 Persen	100 Persen	1.550.000.000,00	2.600.000.000,00	2.648.572.000,00							0,00	
	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	-	-	-	1.050.000.000,00	1.365.300.000,00	1.365.300.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			20 Keluarga	0 Keluarga	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal			1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal			1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
								12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	
								12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
								12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	16.005.000,00	16.005.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																	
								12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	54.582.000,00	54.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	450.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	510.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
					Urusan Pemerintah Daerah																	
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
								5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Wosi	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	2.087.737.508,00	1.931.814.380,00	1.931.814.380,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	2.107.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
					Pemerintahan Daerah																	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
								12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
								12 Laporan	12 Laporan	99.999.780,00	122.000.000,00	122.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
								12 Laporan	12 Laporan	1.982.737.728,00	1.809.814.380,00	1.809.814.380,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	450.000.000,00	179.349.018,07	179.349.018,07			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	147.160.000,00	147.160.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	32.189.018,07	32.189.018,07	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
35	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Terselenggaranya Program Penanggulangan Bencana		100 Persen	100 Persen	5.600.000.000,00	1.091.600.000,00	938.524.500,00					6.020.000.000,00					
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																	
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	-	2.625.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	2.855.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																	
								2 Kawasan	2 Kawasan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																	
								1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi						1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						50 Keluarga	50 Keluarga	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						50 Orang	50 Orang	275.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	-	625.000.000,00	351.600.000,00	351.600.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	675.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						1 Laporan	3 Laporan	275.000.000,00	351.600.000,00	286.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	-	2.050.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	2.140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	240.000.000,00	209.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.050.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	200.000.000,00	142.839.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		775.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS SOSIAL								31.912.292.621,00	29.807.702.638,60	29.004.118.638,60						32.095.000.000,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								31.912.292.621,00	29.807.702.638,60	29.004.118.638,60						32.095.000.000,00	
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								31.912.292.621,00	29.807.702.638,60	29.004.118.638,60						32.095.000.000,00	
36	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100 Persen	100 Persen	25.845.000.000,00	21.891.575.859,04	21.427.865.120,04						26.395.000.000,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	720.000.000,00	394.418.961,04	394.418.961,04			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	720.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	135.895.670,00	135.895.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		170.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	98.599.257,00	78.599.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	79.895.072,00	79.895.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	80.028.962,04	80.028.962,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	19.600.000.000,00	18.531.540.010,00	18.531.540.010,00						-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		20.150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	19.000.000.000,00	18.233.171.948,00	18.233.171.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			19.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	194.520.000,00	194.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	51.924.031,00	51.924.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	51.924.031,00	51.924.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00						-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.500.000.000,00	667.610.900,00	667.610.900,00						-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					5 Paket	5 Paket	250.000.000,00	167.400.900,00	167.400.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanan											Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	749.999.705,00	749.999.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
37	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas			80 Persen	80 Persen	1.150.292.621,00	767.221.997,55	747.675.997,55						900.000.000,00		
	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-		-	-	400.000.000,00	767.221.997,55	767.221.997,55			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	417.221.997,55	397.675.997,55	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-				100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
						Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-		-	-	250.292.621,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi																
						Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi				100 Keluarga	100 Keluarga	50.292.621,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.02	0006	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.																
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.02	0007	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.																
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	-	-		-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT																
						Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.05		Pembinaan dan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	4.05	0001	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Standar				10 Layanan	10 Layanan	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
38	1	06	04					100 Persen	100 Persen	4.002.000.000,00	2.198.904.796,31	2.135.598.796,31							4.000.000.000,00				
	1	06	04	1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti	-	-	-	-	1.100.000.000,00	950.025.423,00	950.025.423,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	04	1.01	Penyediaan Permakanan																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	300.000.000,00	297.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Penyediaan Sandang																		
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Penyediaan Alat Bantu																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	500.024.465,00	498.804.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	150.000.958,00	148.575.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti	-	-	-	-	1.000.000.000,00	1.048.879.373,31	1.048.879.373,31			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	04	1.02	Pengasuhan																		
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Penyediaan Makanan																		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	1.048.879.373,31	992.778.373,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Penyediaan Sandang																		
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
					Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	1.02	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-			-	-	750.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		750.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan																
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	200.000.000,00	198.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Menerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-			-	-	500.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.04	0001	Penvediaan Permakanan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang																	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																	
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																	
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal																	
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarant di dalam Panti																	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL				
1	06	04	1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanaan																	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		150.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang																	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																	
				Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																	
				Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	4.06	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laporan didaerah Kabupaten/Kota.	-	-	-	-	252.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	4.06	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laporan didaerah Kabupaten/Kota.																
								100 Lembaga	100 Lembaga	52.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	4.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL															
								100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	4.07	Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	-	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	4.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah															
								100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
39	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80 Persen	80 Persen	265.000.000,00	2.950.000.000,00	2.845.043.000,00								250.000.000,00		
	1	06	05	1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI															
								25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal															
								25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-	-	-	165.000.000,00	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga															
								25 Keluarga	25 Keluarga	65.000.000,00	1.800.000.000,00	1.712.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
								100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat															
								100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	1.150.000.000,00	1.132.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
40	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	1.999.999.985,70	1.847.935.724,70								400.000.000,00		
	1	06	06	1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-	-	-	350.000.000,00	1.525.284.012,70	1.525.284.012,70			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan															
								100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang															
								100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Temoat Penamounaan Penguuesi															

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana									
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			153.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
45	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)				2.32 Persen	2.32 Persen	865.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							1.071.000.000,00				
	2	07	04	1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pencari Kerja dan Tenaga Kerja		408.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		408.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	30 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			510.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pencari Kerja dan Tenaga Kerja		510.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																		306.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			153.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-			100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran		153.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		153.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.122.000.000,00				
46	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Angka sengketa perusahaan pekerja per tahun Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek				100.00 1,88 50 Persen Per 1000 kasus Persen	100.00 1,88 50 Persen Per 1000 kasus Persen	1.100.000.000,00	7.000.000.000,00	6.479.281.000,00							1.122.000.000,00				
	2	07	05	1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan		255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	05	1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-			100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan		255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				15 Perkara	15 Perkara	250.000.000,00	100.000.000,00	61.075.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	07	05	1.03				100 Persen	100 Persen	600.000.000,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan		612.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																306.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																			
47								5000 Orang	30000 Orang	300.000.000,00	6.500.000.000,00	6.151.913.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			306.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	80.00 Persen	80.00 Persen	700.000.000,00	500.000.000,00	322.466.000,00						714.000.000,00							
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	100 Persen	100 Persen	700.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja dan Perusahaan		714.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		510.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
								355 Perusahaan	355 Perusahaan	500.000.000,00	300.000.000,00	209.680.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat									
	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
								4 Kasus	2 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	50.228.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat									
	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
								40 Perusahaan	40 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	62.558.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.450.000.000,00	1.300.000.000,00	1.237.502.000,00									2.492.000.000,00				
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				2.450.000.000,00	1.300.000.000,00	1.237.502.000,00									2.492.000.000,00				
48	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada ada/tidak ada	ada ada/tidak ada	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00						459.000.000,00							
	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Terlaksananya Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Warga Transmigrasi		459.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		153.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
								5 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat									
	3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																			

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	365.000.000,00	381.720.000,00	381.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.000.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	621.000.000,00	26.036.325,00	26.036.325,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	133.000.000,00	26.036.325,00	26.036.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan Orang	1 Laporan Orang	277.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				36 Orang	36 Orang	211.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.473.800.000,00	713.554.220,00	713.554.220,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan Paket	1 Laporan Paket	330.000.000,00	28.535.560,00	28.535.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	300.000.000,00	101.194.660,00	101.194.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					NON URUSAN							19.276.974.585,00	17.145.085.834,00	16.520.208.834,00								
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.276.974.585,00	16.945.085.834,00	16.320.208.834,00								
52	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	11.990.235.726,00	11.724.104.104,00	11.492.968.104,00							73.500.000,00	
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.473.800.000,00	713.554.220,00	713.554.220,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.276.974.585,00	17.145.085.834,00	16.520.208.834,00								
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							18.276.974.585,00	16.945.085.834,00	16.320.208.834,00								
53	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	11.990.235.726,00	11.724.104.104,00	11.492.968.104,00							73.500.000,00	
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.473.800.000,00	713.554.220,00	713.554.220,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	37.800.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	154.560.000,00	154.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	429.264.000,00	198.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	-	1.709.835.726,00	880.113.000,00	880.113.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.07	0001	Urusan Pemerintah Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	553.445.200,00	553.445.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Laporan Unit	1 Laporan Unit	207.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	302.835.726,00	26.667.800,00	26.667.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	-	1.220.000.000,00	1.185.116.674,00	1.185.116.674,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.08	0001	Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	20.000.000,00	11.216.950,00	11.216.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	150.000.000,00	159.030.000,00	159.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	1.050.000.000,00	1.014.869.724,00	1.014.869.724,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	421.000.000,00	191.388.050,00	191.388.050,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	221.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	1.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	106.388.050,00	106.388.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	-	1.464.538.859,00	162.030.384,00	121.330.384,00							0,00	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	-	1.200.000.000,00	50.048.000,00	50.048.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	1.01	0006		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	50.048.000,00	50.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	1.01	0007		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua (BLOCK GRANT)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-	-			-	-	264.538.859,00	111.982.384,00	111.982.384,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	1.02	0003		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			1 Laporan Orang	1 Laporan Orang	264.538.859,00	111.982.384,00	71.282.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
55	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	-	1.308.800.000,00	662.745.250,00	662.745.250,00							0,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	08	03	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-					181.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	181.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-					98.500.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						1 Layanan	1 Layanan	98.500.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-					1.028.800.000,00	245.455.250,00	245.455.250,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik						250 Orang	250 Orang	650.000.000,00	157.055.250,00	157.055.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	378.800.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
56	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-						936.500.000,00	2.809.389.061,00	2.588.901.061,00							0,00		
	2	08	04	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-					691.000.000,00	2.668.782.147,00	2.668.782.147,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia						1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	241.000.000,00	129.083.489,00	79.825.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	2.539.698.658,00	2.397.918.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-					245.500.000,00	140.606.914,00	140.606.914,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	1.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																	
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						1 Laporan Lembaga	1 Laporan Lembaga	245.500.000,00	140.606.914,00	111.156.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
57	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-						326.900.000,00	118.326.825,00	99.724.825,00							0,00		
	2	08	05	1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-					326.900.000,00	118.326.825,00	118.326.825,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																	
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia						1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	326.900.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																	
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	118.326.825,00	99.724.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-						1.200.000.000,00	968.474.000,00	993.912.000,00							0,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026												
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	08	06	1.01			-	-	900.000.000,00	568.657.000,00	568.657.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																				
							umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KIA tingkat Provinsi yang berfungsi	-				1 Laporan perangkat daerah	1 Laporan perangkat daerah	900.000.000,00	568.657.000,00	395.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	06	1.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	399.817.000,00	399.817.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																				
							Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				1 Laporan Orang	1 Laporan Orang	300.000.000,00	399.817.000,00	598.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
59	2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	1.050.000.000,00	500.016.210,00	360.627.210,00							0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	1.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	500.016.210,00	500.016.210,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	254.416.922,00	182.794.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	1.01	0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi																				
							Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu Kewenangan Provinsi	-				1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000,00	245.599.288,00	177.832.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	1.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	550.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-				0 Orang	0 Orang	550.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																0,00			
60	2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	600.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							0,00			
	2	14	02	1.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain																				
							Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	-				36 Daerah	36 Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	1.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	1.02	0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	-				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
61	2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00							0,00			
	2	14	04	1.01			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																				
							Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	-				5 Kelompok	5 Kelompok	400.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
							DINAS KETAHANAN PANGKAN																	22.949.814.158,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		22.949.814.158,00	
	2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGKAN																		22.949.814.158,00	
62	2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	14.218.467.417,00	13.415.304.697,00	12.748.210.697,00								15.579.814.158,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	804.881.948,00	804.881.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	120.353.274,00	121.663.032,00	121.663.032,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		131.843.716,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	20.353.274,00	21.663.032,00	21.663.032,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andlan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		21.843.716,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
63	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	4.650.000.000,00	3.650.000.000,00	4.206.502.003,60					-		3.630.000.000,00		
	2	09	03	1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		770.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	250.000.000,00	712.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	250.000.000,00	233.098.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi																		
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	250.000.000,00	156.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	-	-	-	10 Ton	10 Ton	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.260.134.035,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
						Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	400.000.000,00	392.063.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
						Jumlah Promosi Pengankearagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	768.312.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	800.000.000,00	588.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	95.672.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
64	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000,00	1.000.000.000,00	865.612.339,00					-		1.485.000.000,00		
	2	09	04	1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	200.000.000,00	178.115.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	09	04	1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-					-	-	1.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	800.000.000,00	687.497.000,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
65	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-					-	-	2.050.000.000,00	1.850.000.000,00	1.641.724.657,40								2.255.000.000,00	
	2	09	05	1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	1.850.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		2.035.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
						Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					25 Sertifikat	40 Sertifikat	300.000.000,00	315.000.000,00	279.474.080,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	315.000.000,00	270.659.109,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan					2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	185.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	500.000.000,00	433.937.274,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			825.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
						Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	320.000.000,00	292.617.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	4.02	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	-	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	4.02	0001	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota																		
						Jumlah Dokumen Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota Yang Dilaksanakan					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	179.940.566,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							39.162.760.039,00	23.602.708.188,00	31.976.978.108,00							53.269.965.755,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							39.162.760.039,00	23.602.708.188,00	31.976.978.108,00							53.269.965.755,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							13.890.233.081,25	0,00	8.500.000.000,00							15.658.965.755,00		
66	2	10	03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu					100 persen	100 persen	593.965.761,25	0,00	0,00							593.965.755,00		
	2	10	03	1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Penetapan Lokasi pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-				100 persen	100 persen	593.965.761,25	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat		593.965.755,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
						Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					3 Dokumen	3 Dokumen	593.965.761,25	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			593.965.755,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
67	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-					-	-	0,00	0,00	0,00							0,00		
	2	10	04	1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2	10	04	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
68	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan				100 persen	100 persen	12.656.927.320,00	0,00	8.500.000.000,00				15.000.000.000,00					
	2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi	-			100 persen	100 persen	12.656.927.320,00	0,00	0,00	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat dan Pemerintah	15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	10	05	1.01	0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
							Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				3 Laporan	2 Laporan	12.656.927.320,00	0,00	8.500.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
69	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase survei dan Pemetaan Tanah Adat yang dikerjakan				100 persen	100 persen	639.340.000,00	0,00	0,00				65.000.000,00					
	2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemetaan/Batas Tanah Ulayat yang dikerjakan lintas kab/kota dalam satu daerah Provinsi	-			100 persen	100 persen	639.340.000,00	0,00	0,00	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Masyarakat , Pemerintah	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	639.340.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							25.272.526.957,75	23.602.708.188,00	23.476.978.108,00					37.611.000.000,00				
70	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	14.325.526.957,75	12.584.535.308,00	12.308.805.308,00					15.721.000.000,00				
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	726.306.167,00	133.334.335,00	133.334.335,00	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah, ASN	795.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	167.587.815,00	122.798.917,00	100.868.917,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	58.718.352,00	10.535.418,00	6.735.418,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	8.532.997.102,75	9.349.944.189,00	9.349.944.189,00	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah , ASN	8.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	8.115.237.102,75	9.082.824.189,00	9.082.824.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		8.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	417.760.000,00	267.120.000,00	218.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	190.338.000,00	0,00	0,00	-	-	Pemerintah, ASN	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	40.338.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	1.391.673.300,00	867.136.524,00	867.136.524,00	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah	1.486.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN				
	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	236.991.000,00	96.665.667,00	96.665.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	83.602.300,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	294.500.000,00	200.470.857,00	256.710.857,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			334.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	701.580.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			725.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	100 persen	1.000.000.000,00	0,00	0,00						-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah dan pihak terkait		1.410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	100 persen	1.443.000.000,00	1.284.120.260,00	1.284.120.260,00						-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah, ASN		1.728.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			205.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	443.000.000,00	398.720.260,00	398.720.260,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			53.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	845.400.000,00	845.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.020.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	100 persen	1.041.212.388,00	950.000.000,00	950.000.000,00						-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Pemerintah, ASN		1.127.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	671.212.388,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
71	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Provinsi		ada ada/tidak ada	ada ada/tidak ada	2.600.000.000,00	0,00	500.000.000,00										2.620.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	02	1.01										-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemerintah		1.810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemerintah		1.810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemerintah		810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
72	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								-				2.830.000.000,00	
														-					
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat, Pemerintah		2.330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.01	0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK								-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi								-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			920.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			920.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Masyarakat, Pemerintah		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
73	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								-				0,00	
														-				0,00	
	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
														-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
74	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								-				420.000.000,00	
														-					
	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Perusahaan,Pemerintah		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	08	1.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																
					Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	5 Lembaga	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
78	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			70.30 persen	70.30 persen	350.000.000,00	0,00	0,00						360.000.000,00		
	2	11	09	1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-		100 persen	100 persen	350.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	350.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
79	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota			75.71 persen	75.71 persen	1.100.000.000,00	0,00	0,00						1.120.000.000,00		
	2	11	10	1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH	-		100 persen	100 persen	1.100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	10	1.01	0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah																
					Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	700.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				3 Pengaduan	3 Pengaduan	400.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
80	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di wilayah Provinsi			ada ada/tidak ada	ada ada/tidak ada	500.000.000,00	10.268.172.880,00	9.918.172.800,00						11.020.000.000,00		
	2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi	-		100 persen	100 persen	500.000.000,00	10.268.172.880,00	10.268.172.880,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemerintah Masyarakat	11.020.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	11	1.01	0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																
					Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				65 Ton	65 Ton	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi																
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	-		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional																
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				-	30 Unit	0,00	10.268.172.880,00	9.918.172.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		10.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						13.022.341.755,00	13.091.821.462,00	13.074.506.462,00							15.245.344.681,30	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.022.341.755,00	13.091.821.462,00	13.074.506.462,00							15.245.344.681,30	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						13.022.341.755,00	13.091.821.462,00	13.074.506.462,00							15.245.344.681,30	
81	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	10.072.616.939,00	10.841.821.462,00	10.600.241.462,00						12.657.844.681,30		
	2	12	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	-	ASN	86.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.388.258.104,00	8.137.462.627,00	8.137.462.627,00			-	-	ASN		9.392.582.021,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	6.072.616.939,00	7.841.821.462,00	7.841.821.462,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			9.018.094.681,30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	270.641.165,00	270.641.165,00	270.641.165,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			311.237.339,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	ASN		46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	152.129.830,00	68.186.055,00	68.186.055,00			-	-	ASN		78.413.963,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	49.879.830,00	14.542.080,00	14.542.080,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.723.392,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	1 Orang	62.250.000,00	23.643.975,00	23.643.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			27.190.571,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			11.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.401.681.916,00	925.638.835,00	925.638.835,00			-	-	ASN		1.087.484.660,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			34.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.638.835,00	95.638.835,00	95.638.835,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			109.984.660,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	215.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	931.043.081,00	500.000.000,00	258.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			575.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026												
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	12	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	-							ASN		169.585.931,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	01	1.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	56.812.080,00	25.591.027,00	25.591.027,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				29.429.681,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	42.703.500,00	21.875.000,00	21.875.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				25.156.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.364.946.842,00	1.047.866.018,00	1.047.866.018,00			-	-	ASN			1.205.045.920,70	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	369.999.170,00	369.999.170,00	369.999.170,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				425.499.045,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	994.947.672,00	677.866.848,00	677.866.848,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				779.546.875,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	461.084.667,00	515.201.900,00	515.201.900,00			-	-	ASN			592.482.185,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				34.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	21 Unit	311.454.667,00	304.500.000,00	304.500.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-				350.175.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	39 Unit	24.630.000,00	37.733.897,00	37.733.897,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-				43.393.981,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	1.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	142.968.003,00	142.968.003,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-				164.413.203,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
82	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk				95 Persen	95 Persen	1.149.724.816,00	700.000.000,00	1.112.361.575,70								805.000.000,00	
	2	12	02	1.02			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-			100 Persen	100 Persen	849.724.816,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Penduduk Provinsi Papua Barat			460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	1.02	0001		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	749.724.816,00	400.000.000,00	887.959.761,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik				460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	1.02	0004		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	1.03			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-			100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	1.03	0001		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik				115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	1.03	0002		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	4.01			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	4.01	0006		Koordinasi Penvelengaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	124.401.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik				
83	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan Rasio Pasangan Berakte Nikah Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	-		100 70 70 95 Persen Rasio Persen	100 70 70 95 Persen Rasio Persen	700.000.000,00	500.000.000,00	419.572.164,20							575.000.000,00	
	2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-		100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Penduduk Papua Barat dan ASN		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	171.415.804,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-		100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	87.436.859,50	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	4.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-		100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	4.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.719.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
84	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan Data Kependudukan	-		60 Persen	60 Persen	875.000.000,00	850.000.000,00	754.036.829,01							977.500.000,00	
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	593.945.780,00	593.945.780,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Penduduk Papua Barat, Perangkat Daerah, Organisasi dan Perguruan Tinggi		683.037.647,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																
						Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	140.056.000,00	124.527.149,80	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			161.064.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.02	0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi																
						Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	53.889.780,00	49.418.580,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			61.973.247,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		100 Persen	100 Persen	275.000.000,00	156.054.220,00	156.054.220,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN		179.462.353,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Penezawan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Keependudukan																

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	61.752.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		86.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																
					Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				40 Orang	5 Orang	175.000.000,00	81.054.220,00	65.953.818,81	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		93.212.353,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	4.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	ASN	115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	4.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	52.385.073,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
85	2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun			100 Persen	100 Persen	225.000.000,00	200.000.000,00	188.294.431,09						230.000.000,00		
					Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya data profil kependudukan	-		100 Persen	100 Persen	225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	Data Penduduk OAP dan Non OAP	230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																
					Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	88.294.431,09	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG							25.813.865.594,00	26.375.929.249,50	24.410.445.486,00					0,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.813.865.594,00	26.375.929.249,50	24.410.445.486,00					0,00		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							25.813.865.594,00	26.375.929.249,50	24.410.445.486,00					0,00		
86	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	11.872.566.289,00	13.981.906.333,50	13.582.164.570,00						0,00		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	119.079.250,00	86.000.000,00	86.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.080.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.999.250,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	7.373.110.974,00	9.575.929.250,00	9.575.929.250,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	7.373.110.974,00	9.575.929.250,00	9.575.929.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	676.356.000,00	1.759.949.682,00	1.759.949.682,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	304.356.000,00	1.400.163.532,00	1.243.614.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	372.000.000,00	359.786.150,00	359.786.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	952.126.866,00	909.681.916,50	909.681.916,50			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.742.866,00	170.356.389,50	170.356.389,50	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	01	1.06	0006	Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	158.140.000,00	158.140.000,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	662.384.000,00	551.185.527,00	307.992.763,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	27.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	01	1.07	0001	Urusan Pemerintah Daerah																	
	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran	-	-		-	-	379.476.149,00	660.000.000,00	660.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	01	1.08	0002	Pemerintahan Daerah																	
	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	249.488.109,00	259.000.000,00	259.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	129.988.040,00	401.000.000,00	401.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.345.417.050,00	855.345.485,00	855.345.485,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				43 Unit	43 Unit	376.078.040,00	283.465.000,00	283.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.969.339.010,00	571.880.485,00	571.880.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
87	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri				0,63 Persen	0,63 Persen	796.886.208,00	1.952.761.441,00	1.843.967.441,00							0,00	
	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-		-	-	796.886.208,00	1.952.761.441,00	1.952.761.441,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	277.604.522,00	66.241.900,00	39.781.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Tambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				1 Unit	1 Unit	519.281.686,00	1.886.519.541,00	1.804.185.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
88	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal				100 persen	100 persen	450.000.000,00	450.000.000,00	339.357.000,00							0,00	
	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-		-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	339.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
89	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung				100 Persen	100 Persen	1.089.000.000,00	961.185.440,00	698.281.020,50							0,00	
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	1.089.000.000,00	961.185.440,00	961.185.440,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	66.450.200,00	47.930.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	398.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	265.000.000,00	289.101.410,00	179.116.990,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	324.000.000,00	105.633.830,00	72.253.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
90	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kampung mandiri Persentase Posyandu aktif Jumlah pembinaan kelompok PKK	0,63 100 148,66 Persen persen kelompok	0,63 100 148,66 Persen persen kelompok	5.700.000.000,00	4.385.000.000,00	3.937.767.000,00						0,00			
	2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.700.000.000,00	4.385.000.000,00	4.385.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	05	1.01	0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	700.000.000,00	606.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	05	1.01	0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	685.000.000,00	579.379.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	05	1.01	0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	2.751.688.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
91	2	13	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	70 Persen	70 Persen	5.905.413.097,00	4.645.076.035,00	4.008.908.454,50					0,00				
	2	13	07	4.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung	-	-	-	1.224.000.000,00	905.345.705,00	905.345.705,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.02	0001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung	Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	1 Laporan	1 Laporan	439.000.000,00	155.345.705,00	129.407.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.02	0002 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	1 Laporan	1 Laporan	785.000.000,00	750.000.000,00	488.987.048,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	-	-	-	1.682.389.513,00	914.171.240,00	914.171.240,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.03	0001 Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	149.748.000,00	94.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.03	0002 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	40 Orang	40 Orang	258.593.410,00	219.601.705,00	145.465.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.03	0003 Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1.123.796.103,00	544.821.535,00	380.161.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.04	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	-	-	-	1.803.116.751,00	1.092.924.087,00	1.092.924.087,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.04	0002 Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	20 Orang	20 Orang	281.978.951,00	202.700.604,00	144.576.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.04	0004 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi	10 Unit	10 Unit	700.000.000,00	500.000.000,00	494.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	07	4.04	0006 Penvidia Solar Sel baai Masvarakat Kampoune															

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung				7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	152.035.337,00	152.035.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Energi Listrik	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.04	0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung																		
							Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung				100 Unit	100 Unit	521.137.800,00	238.188.146,00	210.064.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.05		Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD	-	-			-	-	500.534.685,00	737.262.855,00	737.262.855,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.05	0001	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.534.685,00	737.262.855,00	486.914.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.06		Pengembangan Ekonomi Kampung	-	-			-	-	500.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.06	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata																		
							Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	800.000.000,00	607.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.08		Pengembangan Data/Informasi	-	-			-	-	195.372.148,00	195.372.148,00	195.372.148,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.08	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputandan Publikasi Data DPMK				1 Dokumen	1 Dokumen	195.372.148,00	195.372.148,00	675.027.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
						DINAS PERHUBUNGAN																	79.617.124.679,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	79.617.124.679,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	79.617.124.679,00	
92	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00 Persen	100.00 Persen	69.259.995.793,00	75.130.002.132,50	74.755.974.189,00							24.057.124.679,00		
	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	319.000.000,00	53.330.000,00	53.330.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		350.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	21.630.000,00	21.630.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.644.567.930,00	11.880.110.899,00	11.880.110.899,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		15.911.024.679,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan	13.894.567.930,00	11.651.870.899,00	11.651.870.898,50	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			15.284.024.679,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	228.240.000,00	228.240.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			605.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	650.000.000,00	208.879.400,00	208.879.400,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	-	715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakai	Jumlah Paket Pakai	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	109.435.400,00	109.435.400,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	54 Orang	150.000.000,00	99.444.000,00	99.444.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.300.000.000,00	1.383.368.872,00	1.383.368.872,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	-	2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	262.386.985,00	262.386.985,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	964.381.887,00	590.353.944,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	950.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	-	1.045.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	987.000.000,00	3.099.281.228,00	3.099.281.228,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	-	1.085.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			7.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			770.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	2.599.281.228,00	2.599.281.228,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			198.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	2.000.000.000,00	6.900.500,00	6.900.500,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	1 Unit	750.000.000,00	6.900.500,00	6.900.500,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			825.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			660.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
93	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang V/C Ratio di Jalan Provinsi				38.59 49.61 Persen Persen	38.59 49.61 Persen Persen	37.300.000.000,00	32.498.131.233,50	32.498.131.233,73							44.330.000.000,00	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-		-	-	-	2.000.000.000,00	20.998.131.233,50	20.998.131.233,50			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	19.819.999.999,50	20.091.879.999,73	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.178.131.234,00	1.178.131.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-		-	-	-	35.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		40.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				5 Unit	5 Unit	35.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.228.120.000,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Kokas, Kokas Kota Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			40.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-		-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1.05	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.020.000,00	32.141.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	40.603.350,00	29.033.350,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	140.494.750,00	112.125.750,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.360.016.650,00	8.302.648.320,00	8.302.648.320,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35/14 Orang/ Bulan	35/14 Orang/ Bulan	6.458.048.982,00	7.976.488.320,00	7.976.488.320,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	891.967.668,00	316.160.000,00	316.160.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.400.000,00	0,00	0,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	98.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	45.230.000,00	172.597.500,00	172.597.500,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	20.230.000,00	172.597.500,00	172.597.500,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.174.900.000,00	1.195.280.500,00	1.195.280.500,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	99.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	340.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100.000.000,00	102.183.925,00	69.501.925,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				12 Media	12 Media	136.875.000,00	110.999.997,00	72.599.997,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
99	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Informasi (SAIK-)			100 90,00 persen persen	100 90,00 persen persen	15.750.134.660,00	11.804.156.000,00	11.581.589.000,00							0,00	
	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-		-	-	15.750.134.660,00	11.804.156.000,00	11.804.156.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																
						Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	6.397.834.660,00	822.984.000,00	741.892.000,00	Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																
						Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan.				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	0 Aplikasi	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																
						Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				15 unit	15 unit	3.578.000.000,00	5.395.304.000,00	5.354.152.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																
						Jumlah Layanan Pemd yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				5 Layanan	5 Layanan	136.875.000,00	136.875.000,00	84.839.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemn SPBE																
						Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemn SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	136.875.000,00	136.875.000,00	88.588.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																
						Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	5.300.550.000,00	5.312.118.000,00	5.312.118.000,00	Kab. Pegunungan Arfak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-Papua-Telekomunikasi	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
100	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			77,23 persen	77,23 persen	218.046.229,00	176.289.320,00	650.661.320,00							0,00	
												218.046.229,00	176.289.320,00	650.661.320,00							0,00	
	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	-		-	-	218.046.229,00	176.289.320,00	176.289.320,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				41 Orang	0 Orang	18.046.229,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																
						Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																
						Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00	100.350.634,00	76.922.634,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
								1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Admistrasi Keuangan Daerah Pada Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	9.191.480.594,00	10.861.644.166,00	10.861.644.166,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
								0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	8.235.480.594,00	10.591.244.166,00	10.591.244.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																				
								1 Dokumen	1 Dokumen	936.000.000,00	260.400.000,00	260.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
								1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	5.000.000,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				
								1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	447.460.000,00	569.919.205,00	569.919.205,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin																				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.395.590.202,00	1.395.590.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	2.650.000.000,00	745.745.115,00	745.745.115,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	500.000.000,00	656.167.420,00	656.167.420,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	89.577.695,00	89.577.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
103	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	210.717.811,00	133.286.811,00							0,00	
	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan izin USP-Koperasi	-		5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	210.717.811,00	210.717.811,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	210.717.811,00	133.286.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab./ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	-		14 Unit	14 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
104	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif			8,18 persen	8,18 persen	600.000.000,00	236.946.495,00	134.346.495,00							0,00	
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	-		17 persen	17 persen	100.000.000,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Koperasi Binaan Provinsi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	100.000.109,00	74.273.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	99.999.644,00	72.793.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	260.948.463,00	174.631.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	231.319.830,00	148.481.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
							Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	99.999.884,00	76.340.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
108	2	17	07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Persentase Pertumbuhan UMKM				40 65 persen persen	40 65 persen persen	2.550.000.000,00	1.000.000.000,00	703.639.000,00							0,00	
	2	17	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui penataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-			18 Unit	18 Unit	2.250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	UMKM Binaan Provinsi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT] Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0002		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	241.026.500,00	165.228.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0003		Pemulihan Usaha-Usaha Kecil					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0004		Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	245.283.700,00	168.180.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0005		Penyusunan Basis Data Usaha Kecil					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0007		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0008		Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0009		Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1.01	0010		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	1.01	0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	4.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang di atur suatu Perdasus Terkait dengan kewajiban kepemilikan Saham yang bersumber dari APBD dalam Rangka Meningkatkan akses pembiayaan UMKM	-	-	-	-	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	UMKM OAP Binaan Provinsi	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	4.03		Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/ Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan	-	-	-	-	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	UMKM Binaan Provinsi	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
109	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	-	-	-	-	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	UMKM Binaan Provinsi	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kwirousahaan		-	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026									
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Wirausaha yang Difasilitasi				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	89.978.625,00	89.978.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	08	1.01	0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	213.644.000,00	160.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	08	4.02		Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-		14 Orang	14 Orang	100.000.000,00	864.395.003,00	864.395.003,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	UMKM Binaan Provinsi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	08	4.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar																				
						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar				0 UMKM	0 UMKM	100.000.000,00	864.395.003,00	825.445.003,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
110	2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Jumlah Penerbitan Badan Hukum Koperasi			5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	435.604.997,00	1.373.511.307,00							0,00					
	2	17	09	4.01		Pemberian pendampingan dan penyaluhan pendirian koperasi.	Jumlah pendampingan dan penyaluhan pendirian koperasi.	-		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	335.605.001,00	335.605.001,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Kelompok Strategis/Masyarakat Binaan Provinsi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyaluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyaluhan untuk mendirikan koperasi			0 Kelompok Pra Koperasi	0 Kelompok Pra Koperasi	100.000.000,00	335.605.001,00	702.771.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	09	4.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Jumlah Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	-		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.999.996,00	99.999.996,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	Kelompok Strategis/Masyarakat Binaan Provinsi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris			0 Koperasi	178 Koperasi	100.000.000,00	99.999.996,00	670.739.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU																	14.205.000.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			14.205.000.000,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			14.205.000.000,00	
111	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	11.092.021.197,00	11.261.129.299,00	10.979.823.778,00							11.455.000.000,00					
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	-	100.000.000,00	198.784.600,00	198.784.600,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	150.224.600,00	133.755.799,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				
	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				
	2	18	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				
	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				
	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	36.400.000,00	32.532.280,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	18	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.085.021.197,00	8.872.151.573,00	8.872.151.573,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		8.175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	7.755.021.197,00	8.561.071.573,00	8.561.071.573,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			7.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	17.800.000,00	17.789.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	25.200.000,00	19.492.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	16.080.000,00	15.416.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	30.000.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	167.000.000,00	113.896.301,00	113.896.301,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	17.604.000,00	17.550.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	17.100.000,00	8.550.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	13.680.000,00	6.840.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	39.992.301,00	39.992.301,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	55.000.000,00	25.520.000,00	20.390.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.362.000.000,00	587.565.095,00	587.565.095,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		1.440.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	
	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	63.587.375,00	63.587.375,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJUNIAN TERPADU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	962.569.052,00	529.787.723,00	529.787.723,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah		712.569.052,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	360.578.285,00	337.370.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	91.085.573,00	91.085.573,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000.000,00	394.560.000,00	394.560.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			6.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	827.000.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			827.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian																		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	4.000.000.000,00	1.324.191.916,00	1.324.191.916,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	13.400.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah		13.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
118	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan			100 Persen	100 Persen	7.400.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00							2.000.000.000,00	
	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	"Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan"	-		100 Persen	100 Persen	6.400.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kreatifitas Pemuda		2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				80 Orang	80 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																			
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	0 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																			
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																			
							Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				185 Persentase	100 Persentase	1.400.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Penelembagaan Kepelelooran Pemuda baei Pemuda Peloor Tinekat Provinsi																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				70 Orang	70 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi					25 Orang	0 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-			100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kreatifitas Pemuda		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda					5 Persentase	5 Persentase	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	"Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang memanfaatkan Cakupan provinsi yang terlaksana Cakupan organisasi keolahragaan yang memperoleh pengembangan kapasitas"				100 Persen	100 Persen	8.200.000.000,00	19.890.217.050,00	19.890.217.050,00							0,00	
	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	"Persentase Atlet yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga"	-			100 Persen	100 Persen	4.200.000.000,00	19.790.217.050,00	19.790.217.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Prestasi Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																	
							Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				100 Orang	100 Orang	2.000.000.000,00	19.790.217.050,00	19.790.217.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																	
							Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				5 Kegiatan	1 Kegiatan	2.200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026												
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	"Persentase Atlet yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Persentase Dokumen Evaluasi dan Monitoring Perkembangan Atlet Persentase SDM Olahraga yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional"	-			100 Persen	100 Persen	4.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Prestasi Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga					150 Orang	100 Orang	2.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					1 Pelatda	1 Pelatda	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
120	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi				100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	0,00	0,00								0,00				
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	-			100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kreatifitas Kepramukaan		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi																					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026											
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	82.876.000,00	82.875.700,00	66.351.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			91.163.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	81.443.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			89.587.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.237.643.412,00	1.352.727.270,00	1.352.727.270,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.384.061.440,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	209.785.699,00	209.785.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	152.133.012,00	61.647.210,00	61.647.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			5.610.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.050.000,00	100.050.000,00	100.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			210.055.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	740.360.400,00	961.244.361,00	576.485.361,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			814.396.440,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	50.000.000,00	112.456.344,00	112.456.344,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	112.456.344,00	112.456.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	-	1.095.908.176,00	680.761.476,00	680.761.476,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.205.498.993,60	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			5.626.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	325.876.600,00	300.876.600,00	300.876.600,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			358.464.260,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	764.916.576,00	374.769.876,00	374.769.876,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			841.408.233,60	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.161.384.077,00	527.100.117,00	527.100.117,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.277.522.484,70	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	44.980.000,00	44.980.000,00	44.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			49.478.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			15	16	17	18			19	20				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	349.103.367,00	332.119.407,00	332.119.407,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			384.013.703,70	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			55.000.781,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.710,00	50.000.710,00	50.000.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik										
	2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
122	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	467.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	DBH SDA Pertambahan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			514.030.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
						Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Presentase Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan				100,00 100 Persen Persen	100,00 100 Persen Persen	1.049.999.761,00	358.215.927,00	321.615.801,00							1.154.999.737,10							
	2	22	02	1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Prosentase Objek pemajuan Kebudayaan Guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	749.999.761,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		824.999.737,10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	02	1.01	0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																						
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	250.000.000,00	110.000.000,00	100.262.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																						
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1000 Orang	1000 Orang	499.999.761,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			549.999.737,10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-		-	-	300.000.000,00	248.215.927,00	248.215.927,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	02	1.02	0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																						
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	300.000.000,00	248.215.927,00	221.353.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
123	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina			90 persen	90 persen	1.249.999.852,00	1.019.999.852,00	951.422.898,24							1.374.999.837,20							
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.249.999.852,00	1.019.999.852,00	1.019.999.852,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		1.374.999.837,20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																						
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				52 Orang	52 Orang	499.999.852,00	499.999.852,00	454.249.118,84	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			549.999.837,20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																						
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	750.000.000,00	520.000.000,00	497.173.779,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			825.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
124	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan			71,25 persen	71,25 persen	413.745.671,00	273.012.598,00	260.609.489,20							455.120.238,10							
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-		-	-	214.706.098,00	76.212.598,00	76.212.598,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		236.176.707,80	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																						
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																						
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	114.706.098,00	76.212.598,00	63.809.489,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			126.176.707,80	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-		-	-	199.039.573,00	196.800.000,00	196.800.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		218.943.530,30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			5 Orang	5 Orang	199.039.573,00	196.800.000,00	196.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		218.943.530,30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
125	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola			100 persen	100 persen	186.254.413,00	158.771.468,00	157.787.656,56						204.879.854,30	
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	-	-		-	-	186.254.413,00	158.771.468,00	158.771.468,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	204.879.854,30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			1 Unit	1 Unit	186.254.413,00	158.771.468,00	157.787.656,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		204.879.854,30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.608.494.488,60	2.624.972.996,10	3.800.400.996,10						5.390.000.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.608.494.488,60	2.624.972.996,10	3.800.400.996,10						5.390.000.000,00	
126	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama menginap tamu asing Rata-rata lama menginap tamu domestik Cakupan Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan			1,65 2,06 77,07 Hari persen	1,65 2,06 77,07 Hari persen	850.000.000,00	300.000.000,00	197.091.000,00						2.275.000.000,00	
	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-		-	-	500.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-		-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara			1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	4.05		Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi	-	-		-	-	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Wilayah Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	197.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
127	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara			20 persen	20 persen	1.450.000.000,00	1.499.972.986,10	1.947.472.986,10						1.595.000.000,00	
	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-		-	-	1.450.000.000,00	1.499.972.986,10	1.499.972.986,10			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	1.595.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.972.986,10	199.972.986,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.250.000.000,00	1.300.000.000,00	1.747.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		1.375.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
128	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/lestari yang di berdayakan.			20 persen	20 persen	608.494.488,60	0,00	0,00						750.000.000,00	
	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-		-	-	608.494.488,60	0,00	0,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-	750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah			1 Lembaga	1 Lembaga	108.494.488,60	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
129	3	26	05					100 20 30 persen industri persen	100 20 30 persen industri persen	700.000.000,00	825.000.010,00	1.655.837.010,00							770.000.000,00						
	3	26	05	1.01				-	-	500.000.000,00	625.000.010,00	625.000.010,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																			
								Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	325.000.010,00	1.267.672.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																			
								Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																			
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	300.000.000,00	218.781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3	26	05	1.02				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																			
								Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	169.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
								DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						11.167.535.874,00	12.548.830.772,50	12.537.073.772,50									
	2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.167.535.874,00	12.548.830.772,50	12.537.073.772,50									
	2	23						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.005.000.000,00	500.000.000,00	878.942.000,00									
130	2	23	02					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				49.70 Indeks	49.70 Indeks	3.205.000.000,00	400.000.000,00	814.563.000,00							4.400.000.000,00		
	2	23	02	1.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-				100 Persen	100 Persen	2.055.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		2.800.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																			
								Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																	
						Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				30 Orang	30 Orang	250.000.000,00	150.000.000,00	96.223.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																	
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi																	
						Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				70 Nilai	70 Nilai	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembaneunan Literasi Masyarakat Tinekat Provinsi																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target			Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	130.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	480.000.000,00	184.576.000,00	184.576.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		700.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.05	0002	Pengadaan Pakai																			
							Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	86 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	24	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	184.576.000,00	129.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.050.000.000,00	981.206.400,00	981.206.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.490.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.400,00	100.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	701.206.000,00	347.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	1.182.272.600,00	1.182.272.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01		1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	100.146.000,00	100.146.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.000.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01		1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	100.000.000,00	100.146.000,00	100.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01		1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01		1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01		1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
134	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja				100 Persen	100 Persen	2.100.000.000,00	500.000.000,00	517.476.000,00							3.100.000.000,00	
	2	24	02		1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	-	1.150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02		1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi																
							Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				40 Instansi	25 Instansi	200.000.000,00	250.000.000,00	266.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02		1.01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																
							Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				50 Unit	50 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02		1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02		1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026									
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah								
1		2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	24	04	1.01			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-	-		-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik	-		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	04	1.01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
											2 SOP	2 SOP	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
137	2	24	05				PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase Arsiparis yang disertifikasi			100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	0,00	0,00							600.000.000,00		
	2	24	05	4.04			Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	-	-		-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik	-		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	05	4.04	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi																		
								Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi				7 Sertifikat	7 Sertifikat	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	05	4.06			Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	-	-		-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik	-		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	05	4.06	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi																		
								Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertifikasi				5 orang	5 orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						39.329.260.665,00	37.639.980.546,00	37.747.080.441,00							44.461.736.732,00		
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.329.260.665,00	37.639.980.546,00	37.747.080.441,00								44.461.736.732,00	
	3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						39.329.260.665,00	37.639.980.546,00	37.747.080.441,00								44.461.736.732,00	
138	3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	30.499.260.665,00	26.889.462.792,00	26.977.627.897,00							32.968.736.732,00		
	3	25	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	235.000.000,00	174.709.955,00	174.709.955,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		608.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	123.395.955,00	123.395.955,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
								Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00	51.314.000,00	36.560.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			93.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	216 Data	0,00	0,00	280.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	27.009.000.000,00	21.389.987.394,00	21.389.987.394,00			-	-	-			28.779.450.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan	27.009.000.000,00	21.389.987.394,00	21.389.982.499,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			28.359.450.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	1 Dokumen	0,00	0,00	419.150.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			420.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	180.000.000,00	216.888.000,00	216.888.000,00			-	-	-			198.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian																		
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	216.888.000,00	141.564.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			198.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	735.000.000,00	2.844.577.188,00	2.844.577.188,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		808.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	2.097.097.188,00	1.847.435.188,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			93.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	747.480.000,00	475.440.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	336.260.665,00	280.454.415,00	280.454.415,00			-	-	-			369.886.732,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.260.665,00	280.454.415,00	280.454.415,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-			204.886.732,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	-	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	400.000.000,00	568.924.210,00	568.924.210,00			-	-	-			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	-	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	568.924.210,00	568.924.210,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.000.000.000,00	544.205.630,00	544.205.630,00			-	-	-			1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	544.205.630,00	544.205.630,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	604.000.000,00	869.716.000,00	869.716.000,00			-	-	-			664.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	104.000.000,00	87.638.000,00	87.638.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			114.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	782.078.000,00	782.078.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
139	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				3.090.496,56 85 Ha %	3.090.496,56 85 Ha %	1.300.000.000,00	2.069.847.758,00	1.477.291.688,00				3.230.000.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	1.000.000.000,00	2.069.847.758,00	2.069.847.758,00			-	-	-			2.900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Jumlah Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				846,612 Ha	846,612 Ha	500.000.000,00	369.999.608,00	316.668.253,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi Kab. Fak Fak, Kokas, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Teluk Etna, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	-	-			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/														
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				-	1 Dokumen	0,00	1.699.848.150,00	1.160.623.435,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-			1.800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru														
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	02	4.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	4.02	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi														

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Kokas, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Teluk Etna, Semua Kel/Desa	-	-	-			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
140	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya Nilai Tukar Nelayan (NTN)				190000 50 98,460715065 Ton Pelaku Usaha Indeks	190000 50 98,460715065 Ton Pelaku Usaha Indeks	2.100.000.000,00	4.517.109.668,00	5.119.461.663,00							2.290.000.000,00	
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	-	1.800.000.000,00	4.276.492.766,00	4.276.492.766,00			-	-	-		1.980.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
							Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	299.994.600,00	171.513.600,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				150 Unit	150 Unit	1.500.000.000,00	3.976.498.166,00	4.826.463.161,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	4.11		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	-			-	-	300.000.000,00	240.616.902,00	240.616.902,00			-	-	-		310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	4.11	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan																	
							Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan				50 Dokumen	50 Dokumen	300.000.000,00	240.616.902,00	121.484.902,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	481.999.387,00	438.849.862,00	Kab. Manokwari, Manokwari Timur, Arowi Kab. Fak Fak, Fak-Fak, Fak Fak Selatan Kab. Teluk Bintuni, Manimeri, Waraitama Kab. Teluk Wondama, Roon, Yende Kab. Kaimana, Sisir Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Ransiki Kab. Pegunungan Arfak, Anggi, Ullong	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	152.857.244,00	107.450.412,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Sanggeng Kab. Fak Fak, Pariwari, Dulanpokpok Kab. Teluk Wondama, Roswar, Yomber Kab. Kaimana, Sisir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			192.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	-	730.000.000,00	1.948.712.622,00	1.948.712.622,00			-	-	-		803.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	787.500.000,00	287.500.000,00	Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	430.000.000,00	1.161.212.622,00	2.101.901.246,00	Kab. Pegunungan Arfak, Anggi, Ullong Kab. Pegunungan Arfak, Minyambauw, Imbenti Kab. Pegunungan Arfak, Hingki, Kwok Dua	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			473.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
142	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				15 1 2 75 80 90 95 Kelompok Dokumen Operasi Kapal % % % %	15 1 2 75 80 90 95 Kelompok Dokumen Operasi Kapal % % % %	1.150.000.000,00	329.995.178,00	287.018.058,00						1.265.000.000,00			
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	-	900.000.000,00	329.995.178,00	329.995.178,00			-	-	-		990.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	400.000.000,00	329.995.178,00	287.018.058,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Barat Kab. Teluk Bintuni, Kuri, Sarbe Kab. Teluk Wondama, Roswar, Yomber Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Ransiki	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	-			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
							Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				40 Kelompok Masyarakat	40 Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Utara, Mubraidiba Kab. Fak Fak, Kokas, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Teluk Etna, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	05	1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	-	250.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi																						
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Wosi Kab. Teluk Bintuni, Bintuni, Masina	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
143	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan Produksi garam Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian Angka konsumsi ikan				10 30 500000 5,97082352125 74,08 Pelaku Usaha % Ton % Kg/Kapita/Tahun	10 30 500000 5,97082352125 74,08 Pelaku Usaha % Ton % Kg/Kapita/Tahun	2.125.000.000,00	1.249.995.897,00	949.979.615,00			-	-	-		2.337.500.000,00	
	3	25	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	-	800.000.000,00	230.224.946,00	230.224.946,00			-	-	-		880.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																						
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Barat Kab. Fak Fak, Fak-Fak, Fak Fak Utara Kab. Teluk Bintuni, Bintuni, Bintuni Barat Kab. Teluk Wondama, Wasior, Wasior I Kab. Kaimana, Kaimana, Kaimana Kota Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Ransiki	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			495.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar																						
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	350.000.000,00	230.224.946,00	133.711.664,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Barat Kab. Fak Fak, Pariwari, Dulangpokpok Kab. Teluk Bintuni, Bintuni, Bintuni Barat Kab. Teluk Wondama, Wasior, Rado Kab. Kaimana, Kaimana, Krooy	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	-	625.000.000,00	1.019.770.951,00	1.019.770.951,00			-	-	-		687.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																						
						Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	680.324.301,00	584.330.301,00	Kab. Manokwari, Manokwari Timur, Pasir Putih Kab. Fak Fak, Pariwari, Dulangpokpok Kab. Teluk Bintuni, Bintuni, Bintuni Barat Kab. Teluk Wondama, Wasior, Wasior I Kab. Kaimana, Kaimana, Kaimana Kota Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Ransiki	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Peneolaahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	750.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			715.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3					NON URUSAN				57.488.871.057,00	50.032.551.142,50	50.635.652.022,50								81.088.306.226,75		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.488.871.057,00	50.032.551.142,50	50.635.652.022,50								81.088.306.226,75		
151	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	11.550.871.057,00	35.712.944.542,50	35.459.279.422,50							44.701.738.966,75			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	3.200.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.530.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				57.488.871.057,00	50.032.551.142,50	50.635.652.022,50								81.088.306.226,75		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				57.488.871.057,00	50.032.551.142,50	50.635.652.022,50								81.088.306.226,75		
152	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	11.550.871.057,00	35.712.944.542,50	35.459.279.422,50							44.701.738.966,75			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	3.200.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.530.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	400.000.000,00	251.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Urusan Pemerintah Daerah																		
3	27	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	1.400.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.447.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Pemerintahan Daerah																		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.210.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			660.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	525.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			577.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.025.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				125 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			825.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				100 Batang	100 Batang	500.000.000,00	200.000.000,00	165.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	1.02	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat	Tanaman Pangan Berbentuk Setek					1000 Setek	1000 Setek	500.000.000,00	200.000.000,00	178.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
154	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIUTJ))			60 78 Persen	60 78 Persen	20.950.000.000,00	1.328.000.000,00	1.610.482.000,00							21.845.000.000,00		
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	20.950.000.000,00	1.328.000.000,00	1.328.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		21.845.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																	
						Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	200.000.000,00	190.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	200.000.000,00	187.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Laboratorium Pertanian																
						Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			2.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.045.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				15 Unit	0 Unit	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			16.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				20 Unit	10 Unit	500.000.000,00	200.000.000,00	173.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				20 Unit	10 Unit	500.000.000,00	528.000.000,00	893.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				20 Unit	10 Unit	500.000.000,00	200.000.000,00	165.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
155	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan areal wilayah gagal panen yang tertangani "Persentase fasilitas penanggulangan bencana pertanian"			77 90 Persen	77 90 Persen	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	907.662.000,00							1.155.000.000,00		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.155.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				150 Ha	100 Ha	1.000.000.000,00	800.000.000,00	704.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			880.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	50 Ha	500.000.000,00	250.000.000,00	203.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	27	01	1.02																
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	309.380.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.380.000,00	24.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	26.818.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3					NON URUSAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
161	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				12.412.357.907,00	13.743.018.652,50	13.743.018.652,50			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	15.117.320.517,75	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
162	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				210.000.000,00	36.243.100,00	36.243.100,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	63 Paket	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3					NON URUSAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
163	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				210.000.000,00	36.243.100,00	36.243.100,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
164	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				210.000.000,00	36.243.100,00	36.243.100,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	0,00	36.243.100,00	36.243.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3					NON URUSAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
165	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				210.000.000,00	36.243.100,00	36.243.100,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
166	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				1.169.749.678,00	654.928.642,00	654.928.642,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	740.368.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	90.754.642,00	90.754.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3					NON URUSAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
167	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				1.169.749.678,00	654.928.642,00	654.928.642,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	740.368.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50					23.356.382.885,75	
168	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50					17.656.382.885,75	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
184	3	27	01				-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50											
	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.125.813.160,00	1.191.601.368,00	1.191.601.368,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.213.645.368,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	971.161.368,00	971.161.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		971.161.368,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3				NON URUSAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
185	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.125.813.160,00	1.191.601.368,00	1.191.601.368,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.213.645.368,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
186	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya				33 Unit	4 Unit	0,00	74.940.000,00	74.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		82.434.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3				NON URUSAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
187	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
188	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
189	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
190	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	25 Unit	0,00	49.650.000,00	49.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		54.615.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3				NON URUSAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
191	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3				NON URUSAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75				
	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3	27	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75				

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
192	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75		
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	10.276.340,00	10.276.340,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			12.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3					NON URUSAN							19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75		
193	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	15.671.132.907,00	16.114.318.652,50	16.363.305.652,50							17.656.382.885,75		
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	249.527.330,00	234.866.340,00	234.866.340,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		259.049.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							19.534.766.911,00	20.964.318.652,50	23.700.107.652,50							23.356.382.885,75		
194	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Daging Ayam pedaging Daging Babi Daging Sapi Daging Ayam petelur Telur Ayam kampung Telur Ayam petelur Daging Itik/itik manila Daging Kambing Daging Ayam kampung Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak Telur Itik/itik manila				1,077.91 1,847.88 2,040.73 324.38 3,357.38 4,397.29 61.58 63.00 713.78 90 961.28 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton persen Ton	1,077.91 1,847.88 2,040.73 324.38 3,357.38 4,397.29 61.58 63.00 713.78 90 961.28 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton persen Ton	1.475.000.000,00	1.150.000.000,00	2.021.563.120,00							1.285.000.000,00		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	-	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	27.573.000,00		Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	-	175.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	31.235.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																		
						Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas					4 Orang	4 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	41.246.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	-	450.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		920.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
						Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi					1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	338.885.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
						Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar					1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	650.000.000,00	1.016.744.120,00		Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			17	18
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	88.854.000,00	50.000.000,00	392.091.000,00	Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	54.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-		-	-	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan																	
						Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				4 Orang	4 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	29.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
197	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan tertanggulangnya pasca bencana alam bidang peternakan			90 persen	90 persen	200.000.000,00	50.000.000,00	37.753.000,00							55.000.000,00		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-		-	-	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	05	1.01	0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																	
						Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	37.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
198	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan jumlah perijinan yang dikeluarkan			90 persen	90 persen	40.000.000,00	50.000.000,00	26.360.000,00							55.000.000,00		
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	26.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-		-	-	15.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																	
						Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
199	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya			70 persen	70 70.00 % Persen	174.780.004,00	650.000.000,00	465.925.880,00							665.000.000,00		
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-		-	6 Kelompok 70 %	60.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		610.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																	
						Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	600.000.000,00	435.585.880,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			610.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-		-	-	114.780.004,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																	
						Jumlah korporasi petani yang didampingi				6 Unit	2 Unit	114.780.004,00	50.000.000,00	30.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
						DINAS KEHUTANAN																	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
200	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00 Persen	100,00 Persen	108.140.000.000,00	53.397.639.595,80	52.147.231.195,80							55.230.000.000,00		
	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	70.000.000,00	49.803.000,00	49.803.000,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	49.803.000,00	38.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								1 Paket	1 Paket	900.000.000,00	499.800.000,00	499.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan															
								1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	149.760.000,00	149.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
								1 Laporan	1 Laporan	2.100.000.000,00	499.839.000,00	499.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan															
								1 Laporan	1 Laporan	10.400.000.000,00	2.071.656.419,00	1.077.018.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			2.200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
								1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	319.200.000,00	319.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5.500.000.000,00	747.658.316,00	747.658.316,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		1.760.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
								1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	499.999.960,00	499.999.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								1 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00	147.658.356,00	147.658.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	6.700.000.000,00	1.298.340.522,00	1.298.340.522,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		1.430.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								60 Unit	50 Unit	3.600.000.000,00	498.715.522,00	498.715.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								30 Unit	20 Unit	1.200.000.000,00	399.742.000,00	399.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			440.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								10 Unit	10 Unit	900.000.000,00	199.883.000,00	199.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								20 Unit	12 Unit	1.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
201	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat Presentase Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan				1.474.263 21,68 23,76 26,44 39,68 837.486 89,11 Ha Persen Ha Persen Persen m3 Persen	1.474.263 21,68 23,76 26,44 39,68 837.486 89,11 Ha Persen Ha Persen Persen m3 Persen	92.329.003.461,00	41.405.289.133,20	40.989.286.158,20						47.333.937.500,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	-	45.029.003.461,00	23.774.042.458,16	23.774.042.458,16			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		24.153.937.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		7 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	699.999.429,00	567.321.429,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		7 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	692.257.914,00	691.670.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara		60 Unit	10 Unit	42.029.003.461,00	23.381.785.115,16	23.426.041.287,16	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			22.613.937.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	8.200.000.000,00	2.647.429.601,63	2.647.429.601,63			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		3.410.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	642.201.666,00	645.081.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	385.147.415,00	368.128.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)		7 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	940.095.816,00	549.093.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Analisis dalam Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	679.984.704,63	463.150.644,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	15.500.000.000,00	4.296.808.446,00	4.296.808.446,00			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		8.170.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	374.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		20 Ha	10 Ha	1.600.000.000,00	888.284.000,00	956.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		500 Ha	500 Ha	4.500.000.000,00	337.993.932,00	337.993.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			990.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		500 Ha	500 Ha	4.000.000.000,00	770.042.032,00	876.152.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			4.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.172.164.000,00	826.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		300 Ha	200 Ha	3.000.000.000,00	754.324.482,00	752.464.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			770.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	7.500.000.000,00	2.979.776.702,41	2.979.776.702,41			-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi	-		2.530.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		2 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000.000,00	999.760.588,00	954.485.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi			1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penceceahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									-	PD. 03. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	272.040.000,00	108.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
207	3	29	04		PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	-				-	-	100.000.000,00	594.668.963,00	335.072.963,00							0,00	
	3	29	04	4.09	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	-	-			-	-	100.000.000,00	594.668.963,00	594.668.963,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	04	4.09	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi																	
						Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	594.668.963,00	335.072.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
208	3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-				-	-	211.881.550,00	302.447.040,00	150.575.040,00							93.097.040,00	
	3	29	05	1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-			-	-	201.881.550,00	101.643.040,00	101.643.040,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	93.097.040,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	05	1.09	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi																	
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi				1 Unit	1 Unit	201.881.550,00	101.643.040,00	42.283.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		93.097.040,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	05	4.13	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	-	-			-	-	10.000.000,00	200.804.000,00	200.804.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	05	4.13	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)																	
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	200.804.000,00	108.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
209	3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-				-	-	15.376.912.232,00	43.360.844.655,40	43.233.136.655,40							157.152.000,00	
	3	29	06	1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	-	25.000.000,00	202.156.000,00	202.156.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																	
						Jumlah dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	202.156.000,00	120.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																	
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				25000000 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	-	15.351.912.232,00	43.158.688.655,40	43.158.688.655,40			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	157.152.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.06	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																	
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	70.576.000,00	70.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		70.576.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.06	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																	
						Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				10 Keluarga	10 Keluarga	10.000.000,00	118.032.000,00	71.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.06	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																	
						Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	86.576.000,00	86.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		86.576.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3	29	06	1.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	300.000.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	35.967.796,00	35.967.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	260.000.000,00	200.406.432,00	200.406.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	51.139.200,00	51.139.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	124.800.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	116.928.000,00	116.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.117.872.000,00	605.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	294.696.105,00	231.937.848,00	231.937.848,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	184.696.105,00	184.671.000,00	184.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	47.266.848,00	47.266.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	300.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	300.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				NON URUSAN																	
												24.784.601.329,00	23.043.243.483,00	23.169.516.483,00						0,00			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
										-	-	2.000.000.000,00	1.299.945.999,00	2.704.249.529,00						0,00			
215	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	18.543.879.655,00	17.543.297.484,00	17.016.799.224,00						0,00			
	3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	450.000.000,00	213.765.450,00	213.765.450,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
												24.784.601.329,00	23.043.243.483,00	23.169.516.483,00						0,00			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
												2.000.000.000,00	1.299.945.999,00	2.704.249.529,00						0,00			
216	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-			-	-	900.000.000,00	699.945.999,00	2.258.253.449,00						0,00			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	109.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas																		
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	106.734.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas					1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	114.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					SEKRETARIAT DAERAH																		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
					SEKRETARIAT DAERAH																		
219	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32							193.126.294.784,00	
	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.016.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	519.500.000,00	326.400.600,00	326.400.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			571.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		90.291.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						500 Orang/ Bulan	500 Orang/ Bulan	88.961.499.792,00	77.785.102.724,00	77.741.743.523,24	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			88.961.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	641.640.000,00	641.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		7.389.864.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						3 Paket	3 Paket	1.000.000.000,00	749.741.518,00	749.741.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						30 Orang	30 Orang	1.000.000.000,00	514.020.000,00	514.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						25 Orang	25 Orang	800.000.000,00	402.680.000,00	492.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						10 Paket	10 Paket	500.000.000,00	202.737.500,00	202.737.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						6 Paket	6 Paket	2.243.231.505,00	850.973.500,00	850.973.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			2.467.554.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barane Cetakan dan Peneandaan																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026											
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
								6 Paket	6 Paket	3.000.000.000,00	747.619.200,00	747.619.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																			
								10 Dokumen	10 Dokumen	755.000.000,00	480.000.000,00	768.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			830.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																			
								12 Laporan	12 Laporan	10.000.000.000,00	11.487.552.000,00	11.487.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.598.991.500,00	6.288.569.711,85	6.288.569.711,85			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
								1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.453.138.331,00	18.727.738.046,00	18.727.738.046,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		20.296.645.460,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
								12 Laporan	12 Laporan	568.768.600,00	527.180.000,00	527.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			625.645.460,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
								12 Laporan	12 Laporan	3.960.000.000,00	3.863.504.200,00	3.863.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			4.356.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
								12 Laporan	12 Laporan	12.650.000.000,00	11.037.371.472,00	11.037.371.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			13.925.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
								20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	338.200.000,00	338.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
								5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
								5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
								5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	501.267.000,00	1.662.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	12.805.815.700,00	12.052.588.709,00	12.052.588.709,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		13.855.815.700,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
								2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.945.815.700,00	1.965.086.839,00	1.965.086.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.945.815.700,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
								3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	452.488.450,00	452.488.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
								2 Orang	2 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	720.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH					
	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	10.000.000.000,00	9.275.013.420,00	19.893.428.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	-	21.443.499.895,00	12.571.668.000,00	12.571.668.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	23.032.849.884,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	19.393.499.895,00	11.221.668.000,00	28.794.219.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		21.332.849.884,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						BIRO UMUM																
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
220	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82						254.907.794.784,00		
	4	01	01									212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32						254.907.794.784,00	193.126.294.784,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	1.016.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	250.892.500,00	303.354.940,00	303.354.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	90.291.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	386.434.610,00	473.851.410,00	473.851.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	100.263.170,00	202.828.150,00	202.828.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	139.776.410,00	154.381.410,00	154.381.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	98.786.410,00	121.705.135,00	121.705.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.522.539.184,00	2.273.561.670,00	2.273.561.670,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	60.211.250,00	146.764.020,00	146.764.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.061.827.200,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	76.118.300,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	70.597.650,00	70.597.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	134.250.000,00	276.200.000,00	276.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	179.115.310,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi																	
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	179.115.310,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	7.389.864.792,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	60 Orang	717.455.440,00	703.545.520,00	703.545.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	238.588.000,00	238.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.000.000.000,00	28.533.336,00	28.533.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	241.542.629,00	279.378.890,00	279.378.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	61.277.800,00	87.321.870,00	87.321.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	241.420.000,00	1.320.135.000,00	1.320.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	4.598.991.500,00	6.288.569.711,85	6.288.569.711,85			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	3.262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	1.026.101.000,00	4.674.143.182,53	4.674.143.182,53	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	182.890.500,00	308.328.456,32	308.328.456,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	21.453.138.331,00	18.727.738.046,00	18.727.738.046,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	20.296.645.460,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	1.08	0001	Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	303.900.000,00	883.395.602,00	883.395.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.670.469.731,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	60 Unit	704.319.328,00	657.880.000,00	657.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	2.743.922.800,00	3.782.236.840,00	3.782.236.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.889.947.760,00	2.583.216.020,28	2.583.216.020,28	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	5.965.131.997,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahntagaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	4.500.000.000,00	3.363.614.569,12	3.363.614.569,12			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	1.676.092.500,00	1.676.092.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	990.037.944,12	990.037.944,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	697.484.125,00	697.484.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00		SEKRETARIAT DAERAH
4					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82						254.907.794.784,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82						254.907.794.784,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82						254.907.794.784,00	
221	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32					193.126.294.784,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		1.016.450.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		75.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		75.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		125.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		90.291.499.792,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	150.000.000,00	147.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		95.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		7.389.864.792,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi															
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	831.240.720,00	848.325.456,00	848.325.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		914.364.792,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	135.850.000,00	135.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		145.500.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja															
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	114.150.000,00	67.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		260.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		60.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		29.473.054.656,00		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Loeistik Kantor															

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstrs OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	57.999.953,00	127.999.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	92.624.000,00	660.000.000,00	644.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	117.440.280,00	100.000.000,00	103.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	-	4.598.991.500,00	6.288.569.711,85	6.288.569.711,85			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	30.000.000,00	33.698.091,30	65.524.341,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	54.500.000,00	99.976.500,00	99.976.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	84.195.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			92.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	1.150.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
						Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	450.000.000,00	337.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	250.000.000,00	189.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	400.000.000,00	337.573.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	-	21.443.499.895,00	12.571.668.000,00	12.571.668.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		23.032.849.884,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	400.000.000,00	346.248.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					BIRO ORGANISASI																	254.907.794.784,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	254.907.794.784,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																	254.907.794.784,00	
222	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32							193.126.294.784,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.016.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.183.463,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		90.291.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	328.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
223	4	01	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kepuasan Masyarakat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				B B kategori Kategori	B B kategori Kategori	2.750.000.000,00	2.852.217.620,00	2.105.159.772,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			8.350.000.000,00	
	4	01	02	1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	-	900.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.01	0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.01	0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	118.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.01	0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	350.000.000,00	187.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	-	1.850.000.000,00	1.652.217.620,00	1.652.217.620,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		5.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	350.000.000,00	251.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	223.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	194.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	137.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	570.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			682.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
226	4	01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat terutama OAP			100 Persen	100 Persen	53.740.107.071,00	92.368.874.182,74	99.207.650.553,50							24.501.500.000,00	
	4	01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-		-	-	49.610.107.071,00	89.368.882.909,74	89.368.882.909,74			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		19.651.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.01 0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100% Unit	100% Unit	1.550.000.000,00	393.115.400,00	355.767.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.01 0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				100% Lembaga	100% Lembaga	48.060.107.071,00	88.975.767.509,74	96.472.866.380,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			17.001.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-		-	-	2.600.000.000,00	1.499.999.282,00	1.499.999.282,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.02 0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				100% Dokumen	100% Dokumen	700.000.000,00	299.999.994,00	193.807.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.02 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	1.200.000.000,00	399.999.896,00	243.708.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.02 0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				100% Dokumen	100% Dokumen	700.000.000,00	299.999.904,00	255.339.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-		-	-	1.530.000.000,00	1.499.991.991,00	1.499.991.991,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				100% Dokumen	100% Dokumen	730.000.000,00	399.994.390,00	369.250.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.03 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				100% Dokumen	100% Dokumen	400.000.000,00	299.999.930,00	277.706.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 04 1.03 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				100% Dokumen	100% Dokumen	400.000.000,00	299.997.747,00	227.160.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			BIRO HUKUM						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
	4	01	SEKRETARIAT DAERAH						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
227	4	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32							193.126.294.784,00	
	4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		90.291.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	400.000.000,00	160.001.200,00	160.001.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	99.999.700,00	99.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	399.999.000,00	285.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
228	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang difasilitasi			100 Persen	100 Persen	11.550.000.000,00	4.340.000.000,00	4.221.934.500,00					9.650.000.000,00						
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	8.250.000.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		6.200.000.000,00					
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum																		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	2.000.000.000,00	600.000.000,00	475.311.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum																		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00	250.000.000,00	194.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				50 Dokumen	50 Dokumen	750.000.000,00	250.000.000,00	182.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum																		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				50 Dokumen	50 Dokumen	2.000.000.000,00	800.000.000,00	583.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	3.300.000.000,00	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		3.450.000.000,00					
	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	2.500.000.000,00	1.240.000.000,00	1.739.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				3 Kasus	3 Kasus	800.000.000,00	300.000.000,00	211.050.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru							
						BIRO PEREKONOMIAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82					254.907.794.784,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82					254.907.794.784,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82					254.907.794.784,00						
229	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32					193.126.294.784,00						
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		7.389.864.792,00					
	4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	519.998.008,00	301.726.980,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		350.000.000,00					
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	20 Orang	255.300.000,00	437.923.400,00	437.923.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik							
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	21.453.138.331,00	18.727.738.046,00	18.727.738.046,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		20.296.645.460,00					
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	136.699.924,00	136.699.924,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		140.000.000,00					
230	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan			100 Persen	100 Persen	2.594.700.000,00	3.905.298.779,00	3.410.626.699,00					3.446.000.000,00						
	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-	-	-	-	700.000.000,00	1.433.299.686,00	1.433.299.686,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		1.060.000.000,00					
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	999.999.740,00	999.999.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik							
	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatf (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatf (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	433.299.946,00	336.523.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		435.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-		-	-	937.200.000,00	1.135.999.511,00	1.135.999.511,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	1.110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	477.200.000,00	556.999.611,00	556.999.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	279.000.000,00	196.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	299.999.900,00	214.474.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-		-	-	957.500.000,00	1.335.999.582,00	1.335.999.582,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	1.276.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	219.999.985,00	219.999.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	167.500.000,00	275.999.931,00	144.786.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	539.999.782,00	539.999.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	299.999.884,00	201.805.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82								
231	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32						193.126.294.784,00		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	1.016.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	7.389.864.792,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut																
						Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	425.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	735.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		735.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			2 Laporan	2 Laporan	1.050.000.000,00	1.750.760.400,00	1.258.117.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	4.598.991.500,00	6.288.569.711,85	6.288.569.711,85			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	3.262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Urusan Pemerintah Daerah																
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-			7 Unit	7 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru				
	4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	-	21.453.138.331,00	18.727.738.046,00	18.727.738.046,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	20.296.645.460,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pemerintahan Daerah																
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
232	4	01	07		PROGRAM KEBIYAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif "Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama"	-		70 85 Persen Persen	70 85 Persen Persen	9.390.000.000,00	3.749.239.600,00	3.159.722.600,00						8.100.000.000,00		
	4	01	07	1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	-	4.090.000.000,00	785.000.000,00	785.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-			5 Laporan	5 Laporan	800.000.000,00	180.000.000,00	132.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-			5 Laporan	5 Laporan	2.400.000.000,00	505.000.000,00	477.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			2 Laporan	2 Laporan	890.000.000,00	100.000.000,00	77.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-		-	-	2.450.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	2.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik															
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-			2 Laporan	2 Laporan	650.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			2 Laporan	2 Laporan	1.100.000.000,00	250.000.000,00	222.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			2 Laporan	2 Laporan	700.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	-	2.850.000.000,00	2.614.239.600,00	2.614.239.600,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	2.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-			55 Orang	55 Orang	800.000.000,00	270.000.000,00	257.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	1.02	Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	-	1.850.000.000,00	1.652.217.620,00	1.652.217.620,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		5.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	102.217.620,00	123.013.572,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
235	4	01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				40 Persen	40 Persen	1.450.000.000,00	1.825.084.001,00	1.331.860.938,00							1.450.000.000,00	
	4	01	08	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	850.000.000,00	700.970.031,00	700.970.031,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	200.969.598,00	105.328.794,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	200.000.433,00	107.195.365,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	300.000.000,00	276.828.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	1.124.113.970,00	1.124.113.970,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	195.908.164,00	104.921.614,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.943.832,00	96.978.916,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	191.262.148,00	103.608.423,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4				BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS							302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							302.116.660.171,00	289.523.746.422,99	321.066.953.155,82							254.907.794.784,00	
236	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	212.722.907.460,00	172.240.032.362,25	200.335.691.215,32							193.126.294.784,00	
	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.326.639.636,00	969.550.040,00	969.550.040,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.016.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.063.673,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	90.792.799.365,00	79.769.499.728,00	79.769.499.728,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		90.291.499.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.038.973,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.522.539.184,00	2.273.561.670,00	2.273.561.670,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.132.434,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.421.496.375,00	5.101.947.484,00	5.101.947.484,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		7.389.864.792,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	127.500.215,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	129.999.347,00	104.388.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	29.046.645.579,00	21.458.518.044,00	21.458.518.044,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		29.473.054.656,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.109.365,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	15.482.226.585,00	8.562.776.360,28	8.562.776.360,28			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		3.057.614.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	80.209.700,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
237	4	01	04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	-	53.740.107.071,00	92.368.874.182,74	99.207.650.553,50								24.501.500.000,00	
	4	01	04	1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	-	2.600.000.000,00	1.499.999.282,00	1.499.999.282,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	249.999.677,00	225.311.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	249.999.811,00	208.974.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	04	1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	-	1.530.000.000,00	1.499.991.991,00	1.499.991.991,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	499.999.924,00	377.755.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
238	4	01	05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	11.550.000.000,00	4.340.000.000,00	4.221.934.500,00								9.650.000.000,00	
	4	01	05	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-			-	-	8.250.000.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		6.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum																	
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	2.800.000.000,00	900.000.000,00	835.813.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
239	4	01	06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	2.594.700.000,00	3.905.298.779,00	3.410.626.699,00							3.446.000.000,00				
	4	01	06	1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-			-	-	700.000.000,00	1.433.299.686,00	1.433.299.686,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.060.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
240	4	01	08		PROGRAM KEBIAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-				-	-	1.450.000.000,00	1.825.084.001,00	1.331.860.938,00							1.450.000.000,00				
	4	01	08	1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	1.124.113.970,00	1.124.113.970,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	536.999.826,00	536.999.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
241	4	01	12		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS				100 Persen	100 Persen	1.806.945.640,00	1.333.000.132,00	1.160.483.132,00							0,00				
	4	01	12	4.01	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	-	-			-	-	1.806.945.640,00	1.333.000.132,00	1.333.000.132,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	12	4.01	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus				7 0	0 0	806.945.640,00	333.000.132,00	312.026.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	12	4.01	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus																			
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	848.457.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	12	4.03	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	12	4.03	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya																			
						Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya				0 Biaya	0 Biaya	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT												106.711.992.746,00						26.250.968.724,00		
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												106.711.992.746,00						26.250.968.724,00		
	4	02			SEKRETARIAT DPRD												106.711.992.746,00						26.250.968.724,00		
242	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	50.578.983.738,00	71.905.683.988,75	71.177.937.988,74							26.250.968.724,00				
	4	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	800.000.000,00	404.153.708,85	404.153.708,85			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			
	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.075.288,85	50.075.288,85	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			
	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	150.625.025,00	150.625.025,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			
	4	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																			
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	151.708.375,00	151.708.375,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			
	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	51.745.020,00	51.745.020,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	22.750.968.724,00	18.492.655.017,01	18.492.655.017,01			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		22.750.968.724,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	18.133.111.750,00	16.664.953.567,00	16.664.953.567,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		18.133.111.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4.217.856.974,00	1.047.276.000,00	1.047.276.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		4.217.856.974,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	580.393.725,01	423.773.725,01	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	200.031.725,00	200.031.725,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	200.000.000,00	644.950.000,00	644.950.000,00			-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	644.950.000,00	644.950.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	400.000.000,00	560.074.120,00	560.074.120,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	400.000.000,00	560.074.120,00	310.984.120,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		400.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.600.000.000,00	1.700.210.788,39	1.700.210.788,39			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	150.630.164,00	150.630.164,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	71.953.344,00	71.953.344,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	705.510.000,02	470.580.000,01	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	490.816.000,00	490.816.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	750.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	281.301.280,37	281.301.280,37	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	300.000.000,00	2.699.029.392,00	2.699.029.392,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	514.014.240,00	514.014.240,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	2.185.015.152,00	2.185.015.152,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	400.000.000,00	737.221.922,00	737.221.922,00			-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	157.600.000,00	157.600.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	428.621.922,00	428.621.922,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	22.528.014.964,00	40.347.369.814,00	40.347.369.814,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	20.499.186.944,00	37.835.121.159,00	37.835.121.159,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				56 Paket	56 Paket	50,00	684.842.655,00	684.842.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				44 Orang	44 Orang	2.028.827.970,00	1.827.406.000,00	1.827.406.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	-	1.600.000.050,00	6.320.019.226,50	6.320.019.226,50			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	50,00	5.327.999.999,99	5.327.999.999,99	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	1.600.000.000,00	992.019.226,51	904.913.226,51	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan												
							12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
243	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPB	100 Persen	100 Persen	54.133.009.008,00	46.824.258.143,00	46.476.664.143,00					0,00		
	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-	1.150.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	362.150.000,00	362.150.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	946.900.000,00	946.900.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	3.003.060.000,00	3.003.060.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.01	0004	Facilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	687.890.000,00	687.890.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	1.750.000.000,00	3.394.397.510,00	3.394.397.510,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	298.414.225,00	298.414.225,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	249.064.225,00	249.064.225,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1.907.312.530,00	1.907.312.530,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	536.568.530,00	536.568.530,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	403.038.000,00	403.038.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	5.287.665.364,00	5.287.665.364,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	904.939.591,00	904.939.591,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur											0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
							1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	904.939.591,00	904.939.591,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas									
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	904.939.591,00	904.939.591,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
								1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	904.939.591,00	904.939.591,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
								1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	206.261.120,00	206.261.120,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1.461.645.880,00	1.461.645.880,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	1.900.029.900,00	2.329.354.000,00	2.329.354.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	443.354.000,00	1.508.760.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
								10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	672.000.000,00	672.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
								7 Orang	7 Orang	29.900,00	672.000.000,00	672.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
								12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	542.000.000,00	542.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	-	42.276.536.837,00	21.762.680.309,00	21.762.680.309,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
								2 Laporan	2 Laporan	2.471.375.000,00	1.499.789.669,00	1.499.789.669,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
								1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses																		
								3 Dokumen	3 Dokumen	38.805.161.837,00	20.262.890.640,00	18.849.890.640,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT				
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)										Lokasi	Sumber Dana
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	73.152.000,00	38.832.870,00	22.383.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	102.512.871,00	60.425.000,00	45.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49.035.100,00	52.055.000,00	36.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12.936.029.533,00	15.041.174.601,00	15.041.174.601,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	12.048.292.148,00	14.466.079.326,00	13.724.872.508,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	173.080.000,00	334.920.000,00	289.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	124.058.741,00	65.473.075,00	65.473.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	162.753.023,00	100.432.000,00	52.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.753.023,00	46.604.000,00	46.423.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	230.092.598,00	27.666.200,00	15.112.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	667.337.337,00	735.767.118,60	735.767.118,60			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	10 Unit	41.419.250,00	7.996.670,00	7.996.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	35.000.000,00	167.656.004,00	193.776.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	80.152.535,00	158.436.250,00	158.216.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	98.153.241,00	70.829.750,00	41.959.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	172.559.872,00	88.892.294,60	88.868.294,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	45.000.000,00	241.956.150,00	84.746.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	124.028.873,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	213.642.712,00	152.579.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
								1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	216.869.712,00	137.255.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
								1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	220.046.616,00	124.992.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
								1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	220.856.465,00	152.668.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
								1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	221.084.212,00	145.597.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
								1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	251.115.712,00	164.079.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
								1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	220.046.616,00	125.014.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
								1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	436.337.630,00	339.721.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
								1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	211.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
								1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	115.860.000,00	115.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
								1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	226.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian															
								1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	368.280.000,00	226.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
								1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	211.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
								1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	115.860.000,00	115.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
								1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	300.000.000,00	236.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinereitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembaneunan Daerah Bidane SDA															

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	155.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	1.750.000.000,00	1.802.199.450,00	1.802.199.450,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.044.000,00	58.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	85.920.000,00	73.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	500.452.000,00	268.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	400.317.324,00	300.838.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.044.000,00	58.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	85.920.000,00	73.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	129.120.000,00	64.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	400.382.126,00	168.955.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						2.178.295.195.269,00	1.285.770.048.928,65	1.212.471.503.068,73						0,00		
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.178.295.195.269,00	1.285.770.048.928,65	1.212.471.503.068,73						0,00		
	5	02				KEUANGAN						2.178.295.195.269,00	1.285.770.048.928,65	1.212.471.503.068,73						0,00		
248	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	293.894.756.954,00	207.916.346.270,09	133.028.939.345,17						0,00		
	5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	753.825.465,00	199.070.480,00	199.070.480,00			-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	525.004.217,00	148.461.160,00	122.011.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	45.900.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	64.295.248,00	50.609.320,00	44.959.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	67.626.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	260.055.185.242,00	177.400.978.581,59	177.400.978.581,59			-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	245.136.788.052,00	164.705.578.581,59	91.879.491.108,97	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	14.106.330.008,00	12.695.400.000,00	12.695.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	62.424.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	749.643.182,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				47 Laporan	47 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.790.893.797,00	3.566.955.850,00	3.566.955.850,00			-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	26.010.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	103.192.397,00	263.363.250,00	263.363.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	57.222.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	104.040.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	3.862.429.400,00	2.298.392.600,00	1.967.582.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	1.638.000.000,00	1.005.200.000,00	577.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	13.652.772.863,00	13.943.092.177,30	13.943.092.177,30			-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.010.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.875.779.788,00	910.878.783,30	910.878.783,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.404.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.525.520.780,00	1.531.639.570,00	1.531.639.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.208.188.295,00	2.028.666.600,00	1.622.933.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	639.600.000,00	442.050.000,00	442.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)									Lokasi	Sumber Dana	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	7.135.200.000,00	3.001.800.000,00	3.407.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	182.070.000,00	6.028.057.224,00	4.757.601.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	4.925.285.793,00	1.544.361.673,00	1.544.361.673,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	1.07	0001	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.416.615.700,00	1.206.861.673,00	1.505.233.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98.838.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	88.434.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	83.232.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	78.030.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.926.046.093,00	337.500.000,00	337.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	156.060.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	78.030.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	-	2.588.962.445,00	1.867.820.000,00	1.867.820.000,00	Semua Kel/Desa		-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	1.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	126.300.000,00	111.500.000,00	111.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.052.562.445,00	495.840.000,00	495.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	260.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000,00	1.260.480.000,00	1.260.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	6.027.831.349,00	9.394.067.508,20	9.394.067.508,20			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				300 Unit	300 Unit	1.726.382.996,00	2.946.710.000,00	2.946.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	260.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	88.434.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	78.030.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	52.020.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		10 Unit	10 Unit	46.818.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1.527.749.053,00	3.681.471.508,20	3.383.099.434,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1.500.118.300,00	2.005.170.000,00	2.005.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	748.179.000,00	760.716.000,00	760.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
249	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD undefined Opini Laporan Keuangan		Tepat Waktu undefined WTP Tepat Waktu/Tidak Te undefined WTP/WDP/D	Tepat Waktu undefined WTP Tepat Waktu/Tidak Te undefined WTP/WDP/D	1.874.790.438.315,00	1.073.653.702.108,56	1.075.711.131.353,56			-	-	0,00	
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	-	10.301.384.342,00	4.999.587.813,56	4.999.587.813,56			-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	2 Dokumen	342.705.092,00	214.996.766,00	176.150.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	2 Dokumen	346.689.433,00	244.688.954,00	193.500.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		47 Dokumen	47 Dokumen	800.722.288,00	230.363.318,00	230.363.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		47 Dokumen	47 Dokumen	381.740.520,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		47 Dokumen	47 Dokumen	392.057.511,00	283.756.392,78	283.756.392,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		47 Dokumen	47 Dokumen	340.413.541,00	274.682.892,78	274.682.892,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	2 Dokumen	1.799.567.510,00	1.350.104.116,00	1.153.216.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	2 Dokumen	2.620.823.398,00	2.400.995.374,00	2.212.687.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1.972.554.549,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	383.701.500,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		100 Orang	100 Orang	920.409.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	5.930.092.655,00	1.849.989.675,00	1.849.989.675,00			-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		7 Laporan	7 Laporan	643.191.743,00	499.999.502,00	493.855.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		7 Laporan	7 Laporan	643.191.743,00	499.999.502,00	493.855.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	1.589.000.187,00	450.000.000,00	367.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				47 Dokumen	47 Dokumen	1.500.000.187,00	900.000.000,00	834.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				15000 Dokumen	15000 Dokumen	4.000.000.187,00	900.000.000,00	1.258.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	1.000.000.187,00	750.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	-	6.400.000.000,00	4.085.559.066,00	4.085.559.066,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00	449.999.788,00	400.901.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD																	
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	1.450.000.000,00	1.199.999.875,00	1.118.956.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																	
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000,00	549.999.720,00	515.554.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	785.560.000,00	785.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				150 Orang	150 Orang	1.350.000.000,00	1.099.999.683,00	728.054.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																	
						Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				3 Lembaga	3 Lembaga	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	-	1.839.537.999.197,00	1.058.068.566.359,00	1.058.068.566.359,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				7 Laporan	7 Laporan	1.639.887.047.728,00	1.028.068.566.359,00	1.032.318.566.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat Pajak Rokok DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	199.650.951.469,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
250	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya management aset				Ya Ya/Tidak	Ya Ya/Tidak	9.610.000.000,00	4.200.000.550,00	3.731.432.370,00							0,00		
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	9.610.000.000,00	4.200.000.550,00	4.200.000.550,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	700.000.550,00	589.358.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000,00	109.230.000,00	58.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	975.380.000,00	151.514.000,00	115.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				47 Laporan	47 Laporan	1.019.850.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.019.850.000,00	613.050.000,00	556.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								1 Laporan	1 Laporan	200.756.399,00	140.173.498,92	101.997.498,92	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	Administrasi Kewegawalan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.519.532.855,00	2.183.637.215,00	2.183.637.215,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
								110 Paket	110 Paket	200.126.000,00	50.635.585,00	50.635.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
								1 Dokumen	1 Dokumen	703.280.000,00	416.341.600,00	280.381.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja														
								1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.294.855,00	1.161.106.755,00	938.254.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai														
								5 Orang	5 Orang	294.172.000,00	500.664.100,00	421.284.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
								20 Orang	20 Orang	44.220.000,00	9.897.375,00	9.897.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
								20 Orang	20 Orang	92.440.000,00	44.991.800,00	44.991.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.667.730.083,00	1.932.417.676,00	1.932.417.676,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
								1 Paket	1 Paket	50.000.280,00	49.750.000,00	49.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								1 Paket	1 Paket	150.000.719,00	139.904.676,00	139.904.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
								1 Paket	1 Paket	400.000.440,00	296.447.000,00	296.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
								1 Dokumen	1 Dokumen	25.050.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
								1 Laporan	1 Laporan	1.042.678.644,00	1.426.316.000,00	736.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	7.171.040.608,00	3.414.400.210,00	3.414.400.210,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
								20 Paket	20 Paket	591.849.743,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								22 Unit	22 Unit	732.338.853,00	200.733.500,00	200.733.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								2 Unit	2 Unit	5.846.852.012,00	3.111.666.710,00	1.862.865.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	2.543.983.262,00	5.227.300.234,00	5.227.300.234,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
								1 Laporan	1 Laporan	14.920.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								1 Laporan	1 Laporan	1.239.063.262,00	840.000.018,00	840.000.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								1 Laporan	1 Laporan	1.290.000.000,00	4.377.300.216,00	4.275.300.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	929.171.527,00	749.610.762,00	749.610.762,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Palak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							1 Laporan	1 Laporan	200.420.752,00	140.288.916,00	106.136.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
254	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	600.000.373,00	645.600.758,00	597.850.758,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
255	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	400.000.432,00	400.020.327,00	353.430.327,00	Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
256	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	300.000.534,00	400.115.860,00	345.395.860,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
257	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	400.001.300,00	401.182.729,00	363.542.652,31	Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
258	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	400.006.655,00	300.000.085,00	268.170.085,00	Kab. Teluk Wondama, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5								53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
	5	02							53.245.651.015,00	43.407.824.963,50	41.351.264.781,50							0,00	
259	5	02	04				-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	4.880.583.298,81							0,00	
	5	02	04	1.01			-	-	5.040.442.646,00	5.434.139.375,50	5.434.139.375,50	-		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008														
							1 Laporan	1 Laporan	300.002.200,00	300.090.985,00	264.570.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									24.569.489.277,00	24.957.902.675,00	27.230.634.475,00							25.984.000.000,00	
	5								24.569.489.277,00	24.957.902.675,00	27.230.634.475,00							25.984.000.000,00	
	5	03							24.569.489.277,00	24.957.902.675,00	27.230.634.475,00							25.984.000.000,00	
260	5	03	01				100 Persen	100 Persen	13.878.786.725,00	15.611.725.698,00	15.259.970.610,00							15.563.000.000,00	
	5	03	01	1.01			-	-	135.885.008,00	134.712.923,00	134.712.923,00	-		PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-			142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0001														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								1 Dokumen	1 Dokumen	499.467.000,00	200.000.000,00	156.156.691,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian															
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-	-	2.972.217.557,00	1.571.102.514,00	1.571.102.514,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN															
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.266,00	200.000.000,00	126.898.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN															
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Laporan	1 Laporan	1.012.705.013,00	369.086.034,00	255.180.034,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	1.659.512.278,00	1.002.016.480,00	1.332.170.066,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	-	4.350.953.632,00	5.415.960.900,00	5.415.960.900,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-		4.546.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN															
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			50 Orang	50 Orang	614.174.270,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			620.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center															
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															
					Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola			1 Dokumen	1 Dokumen	2.905.748.000,00	5.000.000.000,00	7.374.229.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			91.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN															
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN															
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional															
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			100 Orang	100 Orang	302.157.177,00	165.960.900,00	145.629.900,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			305.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			1 Dokumen	1 Dokumen	528.874.185,00	250.000.000,00	191.779.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN															
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN															
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN															
								0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional															
								0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional															
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	-	1.368.221.943,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	1.375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
								0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
								2 Dokumen	2 Dokumen	612.684.615,00	400.000.000,00	283.120.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		615.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
								100 Orang	100 Orang	355.536.488,00	200.000.000,00	126.971.804,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai															
								0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur															
								0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN															
								0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN															
								1 Laporan	1 Laporan	400.000.840,00	200.000.000,00	133.405.593,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai															
								0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN															
								0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH															
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
262	5	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	11.681.330.217,00	14.186.393.431,00	13.602.176.419,00					20.140.000.000,00	
												12.981.330.217,00	14.186.393.431,00	13.867.519.431,00					20.140.000.000,00	
												12.981.330.217,00	14.186.393.431,00	13.867.519.431,00					20.140.000.000,00	
												11.681.330.217,00	14.186.393.431,00	13.426.484.219,00					16.660.000.000,00	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	90.000.000,00	30.053.600,00	30.053.600,00	-	-	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	260.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen															

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.052.500,00	10.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.000.100,00	10.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			60.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	8.000.000.000,00	10.186.453.375,00	10.186.453.375,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		10.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80/12 Orang/ Bulan	80/12 Orang/ Bulan	0,00	10.186.453.375,00	10.186.019.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			10.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5					NON URUSAN																20.140.000.000,00	
	5	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																20.140.000.000,00	
263	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	11.681.330.217,00	13.602.176.419,00	13.426.484.219,00							16.660.000.000,00		
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	8.000.000.000,00	10.186.453.375,00	10.186.453.375,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		10.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																20.140.000.000,00	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																20.140.000.000,00	
264	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	11.681.330.217,00	13.602.176.419,00	13.426.484.219,00							16.660.000.000,00		
	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2.093.574.480,00	1.495.475.944,00	1.495.475.944,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		2.750.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	1.843.574.480,00	1.299.080.544,00	1.299.080.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			2.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	196.395.400,00	196.395.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	770.000.000,00	853.447.050,00	853.447.050,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	100.809.000,00	100.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	253.836.050,00	252.413.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	150.006.000,00	150.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	348.796.000,00	174.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	04	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	150.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	350.000.000,00	704.921.550,00	704.921.550,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		900.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08	0002	Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	552.770.000,00	552.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	152.151.550,00	152.151.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	227.755.737,00	331.824.900,00	331.824.900,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		750.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	123.574.900,00	123.574.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	107.755.737,00	208.250.000,00	208.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
265	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	100 persen	100 persen	1.300.000.000,00	584.217.012,00	441.035.212,00							3.480.000.000,00	
	5	04	02	1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	-	500.000.000,00	103.087.997,00	103.087.997,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.450.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	103.087.997,00	91.103.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-	-	800.000.000,00	481.129.015,00	481.129.015,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		2.030.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			280.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	157.702.765,00	157.702.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																	
						Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	116.666.250,00	87.772.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	206.760.000,00	104.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH											18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00				20.000.000.000,00					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00				20.000.000.000,00				
	5	04	PENGIDIKAN DAN PELATHAN											18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00				20.000.000.000,00			
266	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00						20.000.000.000,00			
	5	04	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	-	18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	20.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5	04	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				BPSDM Unit Kerja	BPSDM Unit Kerja	18.416.995.000,00	15.737.194.040,00	15.737.194.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		20.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											9.262.705.666,00	10.859.843.740,50	9.865.815.282,50				10.935.000.000,00					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											9.262.705.666,00	10.859.843.740,50	9.865.815.282,50				10.935.000.000,00				
	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											9.262.705.666,00	10.859.843.740,50	9.865.815.282,50				10.935.000.000,00			
267	5	05	01			Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.232.300.181,00	8.609.469.957,50	8.073.183.105,50						8.535.000.000,00			
	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	75.571.800,00	30.002.622,00	30.002.622,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik	-	95.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.653.623,00	9.997.732,00	9.997.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.119.663,00	10.003.002,00	10.003.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.798.514,00	10.001.888,00	10.001.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik		35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	275.028.075,00	186.545.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	630.405.485,00	1.025.171.306,00	988.767.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.165.727,00	100.165.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH						10.355.811.097,00	12.660.228.165,25	13.980.683.617,25							13.677.678.581,00	
5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.355.811.097,00	12.660.228.165,25	13.980.683.617,25							13.677.678.581,00	
					PENGLOLAAN PENGHUBUNG						10.355.811.097,00	12.660.228.165,25	13.980.683.617,25							13.677.678.581,00	
271	5	07	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	9.112.408.559,00	11.641.755.633,25	11.970.604.015,25							12.309.935.810,00	
	5	07	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	204.457.856,00	192.190.595,75	192.190.595,75			-	-	-		224.903.642,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	40.923.300,00	37.676.619,75	37.466.619,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			45.015.630,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	47.988.556,00	30.903.860,00	30.903.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			52.787.412,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	42.658.000,00	32.450.000,00	32.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			46.923.800,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.444.000,00	58.356.256,00	33.188.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.088.400,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.444.000,00	32.803.860,00	32.803.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.088.400,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	4.422.611.097,00	7.067.056.717,50	7.067.056.717,50			-	-	-		6.432.978.827,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	4.105.811.097,00	6.779.973.545,50	6.779.973.545,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.011.318.027,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas																
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	316.800.000,00	287.083.172,00	287.083.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			421.660.800,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	549.292.630,00	430.671.250,00	430.671.250,00			-	-	-		604.221.893,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	91.666.630,00	86.575.250,00	86.575.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.833.293,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	457.626.000,00	344.096.000,00	180.686.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			503.388.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.009.105.300,00	657.477.600,00	657.477.600,00			-	-	-		1.110.015.830,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	135.804.900,00	106.721.600,00	106.721.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			149.385.390,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	817.700.400,00	504.248.000,00	289.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			899.470.440,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	55.600.000,00	46.508.000,00	46.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			61.160.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	-	312.392.521,00	253.668.513,00	253.668.513,00			-	-	-		563.631.773,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
					Urusan Pemerintah Daerah																
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	148.668.637,00	148.668.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.07	0011	Peneediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunanan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								2 Unit	2 Unit	212.392.521,00	104.999.876,00	104.999.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		453.631.773,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	1.727.200.555,00	1.997.184.007,00	1.997.184.007,00			-	-	-	2.398.100.385,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	79.705.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	87.675.500,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	393.701.425,00	404.603.025,00	404.603.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	433.071.568,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	235.379.750,00	115.155.394,00	115.155.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	258.917.725,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.018.414.380,00	1.399.425.588,00	1.458.564.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	1.618.435.592,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	887.348.600,00	1.043.506.950,00	1.043.506.950,00			-	-	-	976.083.460,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				26 Unit	26 Unit	629.444.500,00	629.444.500,00	769.949.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	692.388.950,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	72.194.100,00	236.772.450,00	769.804.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	79.413.510,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	80.250.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	88.275.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	105.460.000,00	73.690.000,00	73.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	116.006.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
272	5	07	02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	1.243.402.538,00	1.018.472.532,00	2.010.079.602,00							1.367.742.771,00	
	5	07	02	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	-	-	1.243.402.538,00	1.018.472.532,00	1.018.472.532,00			-	-	-	1.367.742.771,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat														
						Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				2 Laporan	2 Laporan	243.619.554,00	139.509.782,00	139.509.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	267.981.510,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	230.148.505,00	158.016.660,00	158.016.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	253.163.356,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan														
						Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				2 Laporan	2 Laporan	235.680.828,00	66.536.080,00	42.536.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	259.248.889,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1 Laporan	1 Laporan	158.255.251,00	140.032.330,00	133.238.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	174.080.776,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	375.698.400,00	514.377.680,00	1.536.778.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	413.268.240,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	6				INSPEKTORAT					36.465.278.865,00	31.851.803.831,78	30.540.030.331,78							44.943.916.872,00	
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					36.465.278.865,00	31.851.803.831,78	30.540.030.331,78							44.943.916.872,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH					36.465.278.865,00	31.851.803.831,78	30.540.030.331,78							44.943.916.872,00	
273	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	26.928.261.790,00	24.320.072.906,78	24.765.395.406,78							30.023.508.872,00	
	6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	240.704.375,00	432.187.500,00	432.187.500,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		294.128.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	110.355.000,00	142.608.750,00	74.778.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	151.243.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	35.349.375,00	41.049.375,00	41.049.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			37.822.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	248.529.375,00	124.839.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			105.062.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.806.003.653,00	19.550.390.911,00	19.550.390.911,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		24.009.636.400,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	19.465.278.868,00	17.700.680.486,00	17.700.680.486,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			21.637.096.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.069.960.000,00	1.486.160.000,00	1.486.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			2.069.960.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	244.707.410,00	326.093.050,00	326.093.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			271.061.200,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.057.375,00	37.457.375,00	37.457.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			31.518.700,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.107.453.000,00	842.955.000,00	842.955.000,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.786.062.400,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	151.151.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			210.125.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	570.736.000,00	474.765.000,00	307.732.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.050.625.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	262.650.000,00	368.190.000,00	259.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			262.656.200,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	122.916.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			262.656.200,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.714.820.790,00	1.421.314.861,78	1.421.314.861,78			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.773.454.800,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.210.000,00	92.715.000,00	92.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			31.518.700,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.123.330,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			210.125.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	274.889.010,00	307.604.897,78	307.604.897,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			347.756.800,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.650.000,00	75.650.000,00	75.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			63.037.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			37.822.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.002.450,00	40.064.964,00	40.064.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			32.569.300,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.272.346.000,00	879.480.000,00	784.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			1.050.625.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.352.819.972,00	1.346.764.634,00	1.346.764.634,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.358.579.272,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			15.759.300,00	INSPEKTORAT
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
	8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
276	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	19.917.000.000,00	11.699.914.286,97	11.178.813.881,97						19.842.000.000,00		
	8	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.525.000.000,00	106.342.315,00	106.342.315,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	45.000.000,00	25.329.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	20.000.000,00	10.920.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8				NON URUSAN					372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
277	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	19.917.000.000,00	11.699.914.286,97	11.178.813.881,97						19.842.000.000,00		
	8	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.525.000.000,00	106.342.315,00	106.342.315,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					372.069.823.262,00	54.288.308.724,97	64.346.480.124,97						373.494.823.261,00		
278	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	19.917.000.000,00	11.699.914.286,97	11.178.813.881,97						19.842.000.000,00		
	8	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.525.000.000,00	106.342.315,00	106.342.315,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	1.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	11.342.315,00	11.342.315,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	15.000.000,00	8.190.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	9.535.000.000,00	10.044.779.888,00	10.044.779.888,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-	9.535.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	7.800.000.000,00	8.799.914.288,00	8.799.842.883,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		7.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0002. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas															
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	415.825.000,00	415.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0003. Pelaksanaan Penatausahaan dan															
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	693.480.800,00	693.480.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0004. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0005. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	69.999.800,00	69.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0006. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan															
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.02	0007. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		-	-	35.000.000,00	65.560.000,00	38.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.857.000.000,00	93.556.250,00	93.556.250,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.857.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan					70 Paket	70 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					44 Dokumen	44 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	18.392.000,00	18.392.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	0 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
						Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan					1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	10 Orang	250.000.000,00	75.164.250,00	75.164.250,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.735.000.000,00	1.197.320.252,00	1.197.320.252,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		2.735.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	24.720.905,00	24.720.905,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					50 Paket	50 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					60 Paket	60 Paket	250.000.000,00	15.977.947,00	15.977.947,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	45.000.000,00	14.975.400,00	14.975.400,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	41.646.000,00	41.646.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	641.792.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	-	3.200.000.000,00	0,00	0,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Urusan Pemerintah Daerah																		
8	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paskibraka				36 Orang	36 Orang	0,00	1.000.000.000,00	1.498.230.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%- Papua-Administrasi Pemerintahan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
280	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				100 Persen	100 Persen	3.813.678.124,00	3.563.394.438,00	3.453.448.438,00							3.813.678.123,00		
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	-	3.813.678.124,00	3.563.394.438,00	3.563.394.438,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-			3.813.678.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	2.813.678.124,00	3.313.394.438,00	3.313.394.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambahan Gas Alam-Papua-Infrastruktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat				2.813.678.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				52 Orang	52 Orang	1.000.000.000,00	250.000.000,00	140.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat				1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
281	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina dan diawasi				100 Persen	100 Persen	342.736.145.138,00	36.225.000.000,00	46.069.189.405,00								342.736.145.138,00	
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina dan diawasi Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Presentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tersusunnya Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	-			100 % 100 Persen 1 Dokumen 1 Laporan 40 Orang	100 % 100 Persen 1 Dokumen 1 Laporan 40 Orang	342.736.145.138,00	36.225.000.000,00	36.225.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-			342.736.145.138,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			200 Orang	200 Orang	342.236.145.138,00	36.075.000.000,00	45.971.924.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			342.236.145.138,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	97.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
282	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	100.000.000,00	85.450.000,00							500.000.000,00	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-		-	-	-	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	85.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
283	8	01	06					100 Persen	100 Persen	1.703.000.000,00	1.350.000.000,00	1.297.632.000,00							1.703.000.000,00					
	8	01	06	1.01				-	-	1.703.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.703.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	125.000.000,00	88.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		73.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					30 Orang	30 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	225.000.000,00	209.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pengutan Kelembagaan Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	9					SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIA BARAT														62.063.696.154,00				
	9	03				UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN															62.063.696.154,00			
284	9	03	01			KEKHUSUSAN PAPIA BARAT															62.063.696.154,00			
	9	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-	-	58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	300.000.000,00	298.093.374,00	298.093.374,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIA BARAT
	9	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	20.621.260,00	17.771.260,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIA BARAT		
	9					NON URUSAN															62.063.696.154,00			
	9	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															62.063.696.154,00			
285	9	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Rangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2025		Pagu indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	9	03	01	1.01											PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru								
	9	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN																62.063.696.154,00	
	9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT																62.063.696.154,00	
286	9	03	01				-	-										26.681.196.154,00					
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	19.904.313,00	17.054.313,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	9					NON URUSAN																62.063.696.154,00	
	9	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																62.063.696.154,00	
287	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN																62.063.696.154,00	
	9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT																62.063.696.154,00	
288	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	19.752.351,00	15.952.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	9					NON URUSAN																62.063.696.154,00	
	9	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																62.063.696.154,00	
289	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN																62.063.696.154,00	
	9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT																62.063.696.154,00	
290	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	20.014.382,00	16.214.382,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	9					NON URUSAN																62.063.696.154,00	
	9	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																62.063.696.154,00	
291	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN																62.063.696.154,00	
	9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT																62.063.696.154,00	
292	9	03	01				-	-											26.681.196.154,00				
	9	03	01	1.01			-	-															
	9	03	01	1.01			-	-							PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	20.136.018,00	16.336.018,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9		NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
293	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	300.000.000,00	298.093.374,00	298.093.374,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
	9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03		KEKHUSUSAN PAPIUA BARAT					58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
294	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	300.000.000,00	298.093.374,00	298.093.374,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	197.665.050,00	197.665.050,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9		NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
295	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	300.000.000,00	298.093.374,00	298.093.374,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03		KEKHUSUSAN PAPIUA BARAT					58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
296	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	0,00	9.084.880.139,00	9.084.880.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			15.500.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9		NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
297	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03		KEKHUSUSAN PAPIUA BARAT					58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
298	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	16.383.335,00	16.383.335,00	Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru			55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9		NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
	9	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	
299	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00	
	9	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPIUA BARAT
	9	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2025		Pagu indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
300	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.02				-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
301	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.02				-	-	15.100.000.000,00	9.119.857.754,00	9.119.857.754,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	15.610.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
302	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.03				-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
303	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.03				-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
304	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.03				-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
305	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.03				-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	9																						
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
306	9	03	01						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03	01					100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-																
	9	03	01	1.03				-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00				PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA PROVINSI PAPUA BARAT				
	9	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																	
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					
	9	03							58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00							62.063.696.154,00					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
307	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																	
	9	03			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			KEKHUSUSAN PAPUA BARAT								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
308	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9				NON URUSAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
309	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	35.243.930,00	35.243.930,00			-	PD. 04. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatanjangkauan pelayanan publik	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
	9	03			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			KEKHUSUSAN PAPUA BARAT								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
310	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.164.723.777,00	123.597.500,00	123.597.500,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.281.196.154,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		440.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9				NON URUSAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
311	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.164.723.777,00	123.597.500,00	123.597.500,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.281.196.154,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut																	
	9	03			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			KEKHUSUSAN PAPUA BARAT								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
312	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.164.723.777,00	123.597.500,00	123.597.500,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.281.196.154,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		110.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9				NON URUSAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
313	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.164.723.777,00	123.597.500,00	123.597.500,00			-	PD. 01. Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	-		1.281.196.154,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																	
	9	03			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03			KEKHUSUSAN PAPUA BARAT								58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
314	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00							26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.164.723.777,00	123.597.500,00	123.597.500,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-		1.281.196.154,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	9	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
315	9	03	01																
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
	9																		
	9	03																	
316	9	03	01																
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
317	9	03	01																
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
318	9	03	01																
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
319	9	03	01																
	9	03	01	1.05															
	9	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
320	9	03	01																
	9	03	01	1.06															
	9	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	9																		
	9	03																	
	9	03	01																
321	9	03	01																
	9	03	01	1.06															
	9	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	9																		
	9	03																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Target 2025		Pagu indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	9	03	01	1.06																				
	9	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN																		
	9	03																						
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.07																				
	9	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel																		
	9																							
	9																							
	9	03																						
	9	03	01																					
	9	03	01	1.08																				
	9	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Target 2025		Pagu indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9			NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
337	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9			0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
	9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
338	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	435.135.500,00	435.135.500,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		330.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9			NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
339	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
340	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9			NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
341	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
342	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				75 Laporan	75 Laporan	0,00	2.855.261.640,00	2.855.261.640,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9			NON URUSAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
343	9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	25.164.723.777,00	15.011.662.482,00	14.559.656.482,00						26.681.196.154,00		
	9	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	3.900.000.000,00	3.290.397.140,00	3.290.397.140,00			-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
	9	03	01	1.08	Pemerintahan Daerah															
	9			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		
	9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT						58.464.723.777,00	50.468.589.700,00	47.639.095.700,00						62.063.696.154,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Peraturan MRP yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provisi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		275.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan		6 Laporan	6 Laporan	600.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provisi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		660.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provisi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		110.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provisi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		110.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	482.006.736,00	280.877.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		165.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	482.006.736,00	280.877.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		165.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	482.006.736,00	280.877.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		165.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP		33 Orang	33 Orang	4.000.000.000,00	700.296.000,00	700.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		4.400.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	02	4.02	0013	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus-Provisi Papua Barat [BLOCK GRANT]	-	PD. 02. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru		110.000.000,00		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
J U M L A H							5.075.139.278.188,00	3.570.278.052.654,00	3.570.275.002.658,90								6.475.093.875.886,54		

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Yoris Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001